

PENDIDIKAN



PENELITIAN DOSEN

HUKUM ISLAM DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA DI SLTA
(Studi Analisis Isi Kurikulum Mata Pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah di
SMA/SMK Muhammadiyah Kota dan Kabupaten Magelang)

Oleh:

Dr. Imam Mawardi, M.Ag. (Ketua) | NIS: 017308176/FAI

Agus Miswanto, MA (Anggota) | NIS: 007209166/FAI

Dibiayai oleh LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang

Tahun Anggaran 2011/2012

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2012

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DOSEN

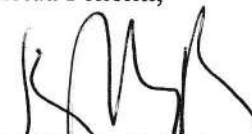
1. a. Judul penelitian : HUKUM ISLAMDALAM KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA DI SLTA(Studi Analisis Isi Kurikulum Mata Pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah di SMA/SMK Muhammadiyah Kota dan Kabupaten Magelang)
- b. Bidang kajian : Pendidikan
2. Ketua peneliti
 - a. Nama lengkap dan gelar : Dr. Imam Mawardi, M.Ag
 - b. Jenis kelamin : Laki-laki
 - c. N I S : 017308176
 - e. Pangkat/Golongan : Penata Tk I /III d
 - f. Jabatan fungsional : Lektor
 - g. Fakultas/Program studi : Agama Islam/PAI
3. Alamat ketua peneliti
 - a. Alamat kantor/telp/fax/e-mail : Jl. Mayjen Bambang Sugeng Km 4 Mertoyudan Kab, Magelang
 - b. Alamat rumah/telp/e-mail : Perum Bumi Gemilang C-1 Banjarnegoro Mertoyudan Magelang 08122514462 /mawardi_rz@yahoo.co.id
4. Jumlah anggota peneliti : 1 orang
Nama anggota : Agus Miswanto, MA
5. Lokasi penelitian : Kota dan Kabupaten Magelang
6. Kerjasama dengan instansi lain : SMA/SMK Muhammadiyah di wilayah Kota/Kabupaten Magelang
7. Lama penelitian : 7 bulan
8. Biaya yang diperlukan
 - a. LP3M UMM : Rp 4.250.000,00
 - b. Mandiri : Rp 1.000.000,00JUMLAH : Rp 5.250.000,00

Menyetujui Ketua LP3M,



Dr. Suliswiyadi, M.Ag
NIS 966610111

Magelang, Pebruari 2013
Ketua Peneliti,



Dr. Imam Mawardi, M.Ag
NIS 017308176

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai kurikulum pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di sekolah-sekolah Muhammadiyah di wilayah Magelang. Secara spesifik penelitian ini difokuskan mengkaji muatan kurikulum hukum Islam yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah tersebut. Dengan melalui wawancara dan metode analisis kualitatif dan isi, ditemukan bahwa kurikulum hukum Islam, selama ini masih sangat menekankan tentang ibadah praktis, dan kurang apresiatif terhadap muatan muamalah. Dari sisi praktis ibadah, kurikulum tersebut memang sudah sangat memadai untuk siswa, hanya saja dari sisi keterampilan muamalah, kurikulum tersebut belum memenuhi kebutuhan siswa yang ada. Lebih jauh lagi, bahwa kurikulum AIK, khususnya hukum Islam diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan pendekatan dikotomik, tidak integrative (organism). Sehingga yang terjadi adalah bahwa antara satu Mapel dengan Mapel yang lain dalam rumpun AIK tidak terkait, apalagi dengan Mapel pelajaran umum yang lain. Dengan demikian, kurikulum AIK menjadi beban yang berat tidak saja bagi para siswa yang menerima materi, tetapi juga bagi para guru yang mengajarkan AIK tersebut. Bagi para murid merasa *overload* terhadap materi yang ada, karena banyaknya materi yang harus diselesaikan. Sementara bagi para guru mengalami kesulitan dalam pengajaran karena ketersediaan waktu yang terbatas, padahal materi yang disampaikan cukup banyak. Dari keadaan yang ada dan terjadi, para guru merekomendasikan untuk adanya perubahan kurikulum sehingga kurikulum yang ada relevan dengan kebutuhan siswa dan juga cukup dengan ketersediaan waktu yang ada.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Al-hamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tealh melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hamba-nya yang mukmin dan shaleh. Semoga shalawat dan salam kepada junjungan umat, teladan kehidupan, Nabi al-Musthafa, Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut setainya sampai akhir zaman. Amin.

Kami sangat bersyukur atas selesainya penelitian yang kami lakukan ini. Penelitian yang berjudul “Hukum Islam dalam Kurikulum Pendidikan Agama di SLTA (Studi Analisis Isi Kurikulum Mata Pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah di SMA/SMK Muhammadiyah di Kota dan Kabupaten Magelang)”, merupakan usaha untuk melihat bagaimana kurikulum hukum Islam di lapangan. Mudah-mudahan saja, hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang akan, terutama wilayah Magelang. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi positif bagi penelitian lebih lanjut tentang kurikulum AIK, khususnya hukum Islam.

Terima kasih, kami ucapkan kepada beberapa pihak yang telah memberikan kesempatan dan juga dukungan dana terhadap terlaksananya penelitian tersebut. Pertama, kepada bapak rektor UMM yang memberikan motivasi dan dorongan kepada segenap civitas akademika untuk giat melakukan penelitian dalam rangka untuk pengembangan kapasitas dan kemampuan akademik. Kedua, kepada LP3M UMM yang telah memberikan dukungan dana bagi penelitian yang kami lakukan ini. Ketiga, kepada Dekan fakultas Agama Islam yang telah mensupport dan memberikan motifasi untuk dilaksanakan penelitian ini. Keempat, kepada beberapa pihak yang selama ini menjadi subjek penelitian ini. Kesedian waktu dan juga tenaga mereka merupakan suatu hal tak ternilai bagi terwujudnya penelitian ini. Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada Mas Sundarto, S.Ag, Guru AIK di SMK Muhammadiyah Salaman, Mas Karmadi, S.Ag., S.Pd, Guru AIK di SMK Muhammadiyah Bandongan, Pak Murtadho NU, S.Pd.I, guru AIK di SMA Muhammadiyah Kota Magelang, Pak Widodo, S.Ag, Guru AIK di SMK Muhammadiyah Kota Magelang, dan Pak Prayogo, S.Ag, guru AIK di SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan.

Tiada gandingan yang tak retak, tidak ada kesempurnaan tanpa kekurangan. Oleh sebab itu kritik yang positif dan konstruktif demi perbaikan kualitas penelitian-penelitian untuk yang akan datang, sangat diperlukan. Semoga bermanfaat

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 10 Maret 2013

Tim peneliti

Dr. Imam Mawardi Rz, M.Ag (ketua)

Agus Miswanto, MA (Anggota)

Daftar isi

Table of Contents

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DOSEN	2
ABSTRAK.....	3
KATA PENGANTAR	4
Daftar isi	5
DAFTAR TABEL.....	7
Daftar Gambar	8
Daftar lampiran	9
BAB I.....	10
PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang Masalah.....	10
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kontribusi Penelitian	13
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. KONSEP PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH	15
1. Tahap Perintisan Lembaga (1905-1945).....	16
2. Refomulasi Identitas Pendidikan (1945-1975).....	17
3. Pencarian Model-Model Pendidikan Alternatif (1975-2000)	17
4. Rintisan Gerakan Ilmu (2000-Sekarang)	19
B. IDENTITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH	21
1. Pendidikan Ulama Berkemajuan.....	21
2. Pendidikan Profetik.....	22
3. Pendidikan Holistic Transformative	23
4. Pendidikan Etos Pembaharuan.....	23
5. Pendidikan Agama <i>Confessional</i>	24
C. CITA-CITA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH	26
D. KEUNIKAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH.....	27
E. FILSAFAT PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH	28
F. MANAJEMEN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH.....	30
G. KURIKULUM PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH.....	31
BAB III	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Subjek dan Objek Penelitian	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN: PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH DI MAGELANG.....	39
B. HASIL PENELITIAN: KURIKULUM HUKUM ISLAM.....	41
1. Pengertian	41
2. Majelis Dikdasmen Dan Kebijakan Kurikulum Pendidikan	45
3. Model Pengembangan dan Struktur Kurikulum di Sekolah Muhammadiyah	49
4. Isi Kurikulum Hukum Islam di Sekolah Muhammadiyah	54
5. Kesesuaian Kurikulum dengan Kebutuhan Siswa	60
6. Hambatan Kurikulum di sekolah Muhammadiyah	62
7. Perubahan Kurikulum di Sekolah Muhammadiyah	72
BAB V	76
KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. KESIMPULAN.....	76

B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
Lampiran 1 :Pedoman wawancara.....	81
Lampiran 2: Biodata Peneliti	82

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Amal Usaha Muhammadiyah	14
2. Tabel 2: Perbandingan Jumlah Kecamatan/Desa dan PCM/PRM.....	40
3. Tabel 3: Jumlah dan Ragam AUM di Magelang.	41
4. Tabel 4: Posentase Perbandingan Mapel PAI SLTA Muhammadiyah	52
5. Tabel5: Sebaran Mapel AIK SLTA	52
6. Tabel 6: Struktur Mapel Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan	53
7. Tabel 7: Perbandingan Materi Mapel Hukum Islam	55
8. Tabel 8: Sebaran Mapel Fiqh Kelas X-XII SLTA Muhammadiyah	56
9. Tabel 9: Jumlah Materi dan Standar Kompetensi Kelas X	56
10. Tabel 10: Standar Kompetensi & Kompetensi Dasar Kelas X	57
11. Table 11: Jumlah Materi dan Standar Kompetensi Kelas XI	58
12. Tabel 12: Standar Kompetensi &Kompetensi dasar kelas XI	58
13. Tabel 13: Jumlah Materi dan Standar Kompetensi Kelas XII	59
14. Tabel 14: Standar Kompetensi & Kompetensi Dasar Kelas XII	60
15. Tabel 15: Kegiatan Ekstra Keagamaan untuk Siswa dan Guru d SMKM Salaman.	64

Daftar Gambar

1. Gambar 1: Peta Wilayah Magelang 39

Daftar lampiran

1. Pedoman wawancara	82
2. Pedoman observasi	85
3. Biodata Peneliti.....	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum merupakan bagian penting dalam suatu pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan agama. Berhasil dan tidaknya suatu pendidikan agama sangat ditentukan oleh keberadaan kurikulum yang bersangkutan. Manakala kurikulumnya baik dan memadai bagi proses dan berlangsungnya pendidikan, maka akan tercapai tujuan pendidikan agama dengan kualitas *out put* yang diharapkan. Selama ini pendidikan agama dituduh telah gagal dalam menyemai moralitas dan etika sosial bagi masyarakat. Tuduhan ini tentunya menyakitkan, karena agama sudah menjadi maklum merupakan ajaran yang sacral dan menjadi acuan nilai bagi setiap pemeluknya. Sehingga kegagalan pendidikan agama selama ini, tentu bukan karena factor ajaran dan pendidikan agama yang bersangkutan, tetapi lebih pada aspek metodologis dan juga kurikulum yang kurang tepat dan relevan untuk diberikan kepada peserta didik.

Dengan segala kekurangannya, pendidikan agama selama ini telah berkontribusi positif dan berperan penting dalam membangun religiusitas dan moralitas bangsa. Bahkan menurut Kuntowijoyo, formalisasi pendidikan agama di sekolah merupakan factor penting yang mempengaruhi terjadinya konvergensi sosial dan Islam di Indonesia, yaitu konvergensi sosial antara wong cilik dengan priyayi, konvergensi budaya antara abangan dengan santri, serta konvergensi aliran antara tradisional, modernis, dan puritan. Kewajiban mengikuti pendidikan agama di sekolah memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang sosial mempelajari agama melalui guru agama dan sumber belajar yang sama.¹ Sehingga kalau selama ini, pendidikan agama dinyatakan tidak berhasil di dalam melaksanakan transformasi nilai, pokok masalahnya bukan terletak pada substansi agama dan pendidikan agama, melainkan pada aspek metodologi pemahaman dan pendidikan agama. Sehingga akar masalahnya adalah terletak pada system pendidikan agama termasuk di dalamnya adalah kurikulum pendidikan agama yang tidak mampu mengakomodasi peta sosiologis masyarakatnya.²

Untuk itulah, penelaahan, pengkajian, bahkan penelitian terhadap kurikulum sangat diperlukan. Sehingga keberadaan kurikulum tersebut bisa dievaluasi dan ditelaah relevansinya dengan kebutuhan peserta didik, baik menyangkut kebutuhan yang bersifat pribadi (kompetensi personal), tetapi juga meliputi kebutuhan social, yaitu lingkungan dimana siswa tersebut tinggal pada saat ini dan yang akan datang, dan juga kompetensi spiritual.

Dalam penelitian ini, kurikulum yang dibahas adalah kurikulum Al-Islam dan kemuhammadiyah di SLTA Muhammadiyah wilayah Magelang. Sudah menjadi maklum, bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang sangat konsern dalam bidang pendidikan dari semenjak berdirinya. Kontribusi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan di Indonesia tidak diragukan lagi. Amal usaha di bidang pendidikan tersebar di seluruh Indonesia, dari

¹Kuntowijoyo, "Konvergensi dan Politik Baru Islam", dalam Abdul Munir Mulkan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, (Yogyakarta: Sopress, 1999), Cet. ke-2, hlm xi.

²Abdul Mu'thi dan Fajar Reza Ulhaq, *Kristen Muhammadiyah: Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan*, (Jakarta: Al-Wasat, 2009), hlm 11.

Sabang sampai Marauke, yang jumlahnya mencapai ribuan buah. Untuk itulah penelitian ini sangat penting, karena akan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan kurikulum al-Islam dan Kemuhammadiyah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Out put yang berkualitas, dan lulusan yang berkarakter sangat ditentukan dari model kurikulum yang diberikan oleh sekolah, sebagai penyelenggara pendidikan. Dalam penelitian ini, tidak memotret seluruh kurikulum al-Islam dan Kemuhammadiyah, tetapi hanya secara khusus mengkaji kurikulum hukum Islam, yang merupakan bagian dari kurikulum al-Islam dan kemuhammadiyah, yang diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Secara tradisional, istilah hukum Islam lebih populer dengan ilmu fiqh, yang secara istilah dimaknai sebagai “ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang mengkaji perbuatan seorang mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang rinci”.³ Sehingga dari definisi tersebut, maka orientasi pokok kajian hukum Islam atau fiqh adalah tentang perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Maksud perbuatan disini adalah perbuatan yang bersifat dahir, yang dapat dilihat oleh mata. Sehingga perbuatan-perbuatan hati tidak masuk dalam ranah kajian dan penelitian fiqh (hukum Islam). Sementara yang dimaksudkan dengan mukallaf adalah orang Islam yang sudah dewasa dan pantas mendapatkan beban hukum Islam. Untuk itu, cakupan pembahasan hukum Islam sangat luas sekali, yaitu meliputi ibadah, munakahat, mawaris, muamalah, jinayah, siyasah, qadha (peradilan). Sehingga materi yang begitu banyak tidak mungkin untuk diajarkan keseluruhannya di SLTA yang waktunya sangat terbatas dan padat. Oleh karena itu, pembelajaran hukum Islam perlu adanya prioritas dan relevansi dengan kebutuhan peserta didik yang sudah beranjak dewasa.

Secara syar’i, anak usia SLTA dipandang sebagai orang yang sudah dewasa (mukallaf), walaupun menurut hukum nasional belum dikatakan dewasa. Berbeda dengan hukum nasional yang mengidentifikasi seseorang dianggap sudah dewasa ketika berumur 18 tahun, hukum Islam menganggap seseorang sebagai dewasa/mukallaf (terbebani hukum) adalah ketika mereka sudah *baligh* (bermimpi basah bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan) dan *ruysd* (dapat membedakan yang baik dan buruk). Sehingga, sampainya umur dewasa, secara syar’i, berimplikasi bagi mereka untuk menjalankan beban hukum yang dituntut oleh syara’ dalam kehidupan sehari-hari. Disamping kebutuhan kedewasaan umur tersebut, lulusan SLTA selain meneruskan ke perguruan tinggi, kebanyakan mereka bekerja dan tidak meneruskan studi ke perguruan tinggi (PT), dan ada sebagian menikah. Oleh karena itu, seiring dengan kebutuhan siswa tersebut, maka muatan kurikulum hukum Islam yang relevan dan tepat (*link and mach*) untuk mereka, akan memberikan bekal pengetahuan dan kecakapan hidup ketika mereka bersosialisasi dan berhadapan dengan problematika dan godaan kehidupan yang real di masyarakat.

Dalam realitas empirik, banyak ditemukan problematika hukum Islam yang mengindikasikan lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam itu. Berdasarkan beberapa survei yang pernah dilakukan, membuktikan bahwa ternyata banyak siswa SLTA yang melakukan hubungan seksual di luar nikah. Di samping itu, kasus hamil di luar nikah, nikah di bawah tangan, atau nikah sirri banyak terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan indikasi nyata dimana masyarakat atau siswa kurang memahami tentang prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam. Demikian juga, banyaknya perilaku koruptif di

³Abdul Wahhab Khallaf, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Dar al-fikr, 1968), hlm.11

tengah masyarakat seperti mencuri, korupsi, nyontek dan sebagainya juga memberikan satu indikasi lemahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Seandainya, masyarakat memahami secara benar terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, tentu mereka (masyarakat, khususnya siswa) tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. Karena konsekuensi perbuatan yang melawan dan bertentangan dengan hukum Islam sangat berat sanksinya baik dunia maupun akhirat. Contoh, sanksi untuk pidana perzinahan adalah rasm atau hukum jilid (100 kali cambukan) dan sanksi untuk pidana pencurian adalah dipotong tanganya. Dengan sanksi yang begitu berat, bagi orang yang akan melakukan pelanggaran tentu akan berhitung dan berhati-hati untuk berbuat. Karena, walaupun sanksi di dunia tidak terlaksanakan, tentu sanksi di akhirat lebih dahsyat.⁴

Disamping itu, banyak kritikan tajam dialamatkan kepada fiqh yang tidak lagi konkrue dengan realitas dan tuntutan kebutuhan modern. Hal ini, karena pemahaman fiqh yang begitu kaku, tidak memberikan ruang bagi perbedaan di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, kritikan tajam terhadap fiqh dilakukan oleh Noor Chozin Agham, dalam bukunya *Teologi Muhammadiyah dan Penyelewengannya*. Dalam buku ini, Noor Chozin Agham, menilai bahwa fiqh selama ini telah mewarnai belantika pemikiran umat Islam sangat dominan, sehingga umat Islam menjadi terkungkung dan tidak lagi kreatif dalam mencandra persoalan hidup yang dihadapinya. Dengan demikian Umat Islam mengalami kemunduran yang begitu luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kemudian, Noor Chozin Agham menekankan kepada warga dan intelektual Muhammadiyah untuk mengabaikan fiqh dan tidak memakainya kembali dalam menentukan berbagai persoalan yang dihadapi umat Muhammadiyah. Kemudian beliau merekomendasikan untuk kembali kepada teologi, yang dianggapnya lebih available dan kongruen untuk era modern saat ini. Lebih jauh lagi, Noor Chozin Agham, memberikan satu tawaran untuk mengembalikan makna fiqh sebagaimana makna awalnya, yaitu fiqh tidak dipahami sebagai kumpulan hukum, fatwa, ijtihad, dan ijma' yang sebagaimana ada saat ini.⁵ Tetapi fiqh harus dipahami sebagai metodologi dalam memahami al-Qur'an dan as-sunnah. Dengan demikian, fiqh lebih dinamis dan tidak kaku, terpaku pada produk pemikiran masa lalu yang sudah usang.⁶

Kritikan lainnya terhadap fiqh, adalah yang dilakukan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya *Dahulukan Akhlak di atas Fiqih*. Beliau secara tajam mengkritik paradigma fiqh yang berkembang dalam kehidupan umat Islam saat ini. Cara berfikir fiqh ini menurutnya telah membuat umat Islam terpecah-pecah, terfragmentasi dalam berbagai aliran, dan menimbulkan konflik di mana-mana. Karena paradigma fiqh telah melakukan simplifikasi persoalan menjadi dua kutub yang berseberangan, tidak saling menyapa, yaitu hitam dan putih, salah dan benar, halal dan haram. Sehingga ketika terjadi perbedaan di kalangan umat, yang kemudian muncul dan mengemuka adalah klaim pendapat (mazhab) yang paling benar aliran tertentu yang tidak mentoleransi pendapat lain, sehingga pendapat yang tidak sejalan dianggap salah (keliru). Cara berfikir yang simplistic tersebut telah begitu parah

⁴Imam Mawardi Rz, *Pranata Sosial dalam Islam*, (Magelang: P3SI UMM, 2012), hlm. 220

⁵Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah ini dapat disebutkan di sini bahwa Abu Hanifah mendefinisikan al-fiqh dengan ma'rifat an-nafs ma laha wa ma 'alaihi (pengetahuan seseorang tentang hak-hak dan kewajibannya). Definisi ini memberikan gambaran bahwa fiqh meliputi semua aspek kehidupan, dari aqidah dan hukum hingga akhlak dan tingkah laku kehidupan.

⁶Noor Chozin Agham, *Teologi Muhammadiyah dan Penyelewengannya: Agenda Persyarikatan Abad ke- AKAN-an*, (Jakarta: UHAMKA Press, 2010), hlm. 196-231

menghinggapi umat Islam saat ini, bahkan bisa dikatakan sudah sampai tingkat akut, yaitu sindrom fiqhisme.⁷

Problematisan fiqh (hukum Islam) dan kritikan yang dialamatkan kepada fiqh tersebut mengindikasikan keharusan adanya perubahan paradigma terhadap pengajaran fiqh di sekolah-sekolah, baik sekolah Muhammadiyah maupun lainnya. Karena contoh-contoh kasus hukum yang terjadi di atas memberikan suatu ilustrasi bahwa pembelajaran hukum Islam dan kurikulumnya nampaknya belum memberikan wawasan dan ketrampilan hidup yang memadai. Untuk itu, rancangan isi kurikulum yang tepat merupakan kebutuhan yang mendesak. Karena, ketidaktepatan dan katidakrelevanan isi kurikulum sesuai konteks hukum Islam kontemporer akan berimplikasi pada kesadaran peserta didik di dalam memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, isi kurikulum pembelajaran hukum Islam perlu adanya suatu review dan evaluasi, sehingga nantinya dapat ditemukan suatu solusi dan alternatif kurikulum yang relevan dan efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana potret kurikulum hukum Islam saat ini di SLTA?
- b. Model kurikulum hukum Islam yang bagaimanakah yang relevan dapat dikembangkan sesuai konteks usia siswa SLTA?
- c. Apa yang menjadi penghambat bagi pengembangan kurikulum hukum Islam di sekolah-sekolah Muhammadiyah selama ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

- a. Memotret kurikulum hukum Islam yang selama ini dikembangkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan merekomendasikan kurikulum hukum Islam yang relevan untuk diajarkan kepada siswa SLTA Muhammadiyah.
- b. Menemukan model kurikulum hukum Islam yang efektif di sekolah-sekolah Muhammadiyah.
- c. Mengetahui berbagai faktor pendukung dan juga penghambat dalam pengembangan kurikulum pembelajaran hukum Islam untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berkontribusi positif bagi pengembangan kurikulum hukum Islam untuk SLTA, khususnya sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dimana penyusunan kurikulum hukum Islam hendaklah mempertimbangkan kebutuhan peserta didik yang sudah beranjak dewasa (taklif) dan juga kebutuhan saat lulus menghadapi situasi dan kondisi sosial baik itu lingkungan pekerjaan, keluarga, dan masyarakat.

⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqh*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 33-51

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Muhammadiyah adalah organisasi dakwah dan gerakan Islam modern terbesar di Indonesia dengan jumlah amal usaha ribuan, dari mulai Mushala, pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan ekonomi. Organisasi yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta memiliki tujuan utama, yaitu menyebarkan ajaran Islam yang benar dan murni di kalangan masyarakat, khususnya di antara para anggotanya. KH Ahmad Dahlan merasa gelisah terhadap kondisi bangsa yang terjajah. Termasuk dunia pendidikan juga telah diracuni oleh penjajah demi kepentingan kolonial dan kelangsungan hidup mereka di bumi pertiwi. Berawal dari keprihatinan yang mendorong perjuangan melalui bidang pendidikan menjadi perhatian para tokoh – tokoh pejuang bangsa ini, Diantara yang melatarbelakangi perlunya didirikan lembaga – lembaga pendidikan melalui organisasi Muhammadiyah oleh Kyai Ahmad Dahlan. Pada saat itu masa penjajahan Belanda abad ke 17 s/d 18 M, bidang pendidikan di Indonesia harus berada dalam pengawasan dan control ketat VOC.⁸

Tabel 1: Data Amal Usaha Muhammadiyah⁹

No	Jenis Amal Usaha	Jumlah
1	TK/TPQ	4.623
2	Sekolah Dasar (SD)/MI	2.604
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs	1.772
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA	1.143
5	Pondok Pesantren	67
6	Jumlah total Perguruan tinggi Muhammadiyah	172
7	Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dll	457
8	Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dll.	318
9	Panti jompo *	54
10	Rehabilitasi Cacat *	82
11	Sekolah Luar Biasa (SLB) *	71
12	Masjid *	6.118
13	Musholla *	5.080
14	Tanah *	20.945.504 M ²

Melihat realitas sejarah pendidikan Islam, maka pada akhir abad ke 19, banyak kaum cendekiawan Muslim dari Indonesia belajar di Timur Tengah untuk melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang dibangun KH Ahmad Dahlan adalah pendidikan yang berorientasi pada pendidikan modern dengan menggunakan system klasikal. Landasan KH Ahmad Dahlan dalam mengadopsi pendidikan dari luar banyak diilhami oleh ajaran Rasulullah, "Hendaknya mempelajari bahasa musuhmu agar tidak diperdaya musuh." Serta sabda Nabi "Tuntutlah Ilmu walau sampai ke Negeri Cina". Oleh karena itu system pendidikan yang dibangun Muhammadiyah berupaya untuk mengintegrasikan antara system pendidikan pesantren dan sekuler dalam bentuk lembaga sekolah.

⁸ Agus Miswanto, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*, (Magelang: P3SI UMM, 2012), hlm. 195.

⁹<http://www.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html>, diakses 22 januari 2013

Pendidikan Muhammadiyah sebagai amal sholeh professional yang pendiriannya dilandasi oleh motivasi teologis bahwa manusia akan mampu mencapai derajat keimanan dan ketaqwaan yang sempurna apabila mereka memiliki kedalaman ilmu pengetahuan (Q.S Al Mujadalah: 11) dan ketaqwaan sejati hanya akan diraih mereka yang berilmu pengetahuan (Q.S Fathir :28 dan Q.S Az Zumar :9). Motivasi inilah yang mendorong KH Ahmad Dahlan menyelenggarakan pendidikan diemperan rumahnya yang diberi nama Madrasah Qismul Arqo dan memberikan pembelajaran agama di OSVIA dan Kweekschool. Demikian karena kegigihan KH Ahmad Dahlan pendidikan di Indonesia terus berkembang bahkan boleh dikatakan sebagai raksasa pendidikan dan yang bisa mengimbangi jumlah pendidikan milik Muhammadiyah hanya Negara.¹⁰

Penelitian tentang Muhammadiyah sudah banyak dilakukan oleh para ahli, baik dari Indonesia maupun para ahli dari luar negeri. Ketertarikan mereka terhadap Muhammadiyah juga sangat beragam, sehingga kajian tentang Muhammadiyah sangat lebar, mulai dari persoalan teologi, sejarah, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, hubungan antar umat beragama, demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Karena luasnya kajian tentang Muhammadiyah itu sendiri, maka dalam penelitian ini kajian pustaka dibatasi dalam satu hal yaitu tentang pendidikan dan kurikulum di sekolah Muhammadiyah.

A. KONSEP PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Permasalahan sosial dan pendidikan di masa yang akan datang akan semakin rumit dan kompleks sehingga tidak memungkinkan dapat diselesaikan dengan cara konvensional seperti tempo dulu. Dalam hal ini, diperlukan kerangka konseptual baru yang ade kuat untuk memahami dan menyelesaikan berbagai kendala yang muncul. Oleh karena itu konsepsi pendidikan Muhammadiyah merupakan hal yang sangat vital, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menurut Muhammad Ali, bahwa perbincangan tentang konsep pendidikan Muhammadiyah nyaris terabaikan. Menurutnya, satu abad lebih gerakan Muhammadiyah berjalan, tetapi Muhammadiyah tidak memiliki konsepsi pendidikan yang jelas. Hal ini paling tidak ada empat faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Pertama, Muhammadiyah menganggap konsep si tidak penting, jauh lebih penting adalah aksi, yaitu mendirikan lembaga pendidikan sebanyak mungkin. Kedua, persoalan konsepsi pendidikan memang belum terbayangkan bagi Muhammadiyah sehingga tidak pernah menjadi agenda dalam pengembangan pendidikannya. Ketiga, sebenarnya membutuhkan konsepsi pendidikan sebagai pemandu praksis pendidikan, kendalanya tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan pekerjaan itu. Keempat, sikap akomodatif yang berlebihan pada pemerintah sehingga alam pendidikan Muhammadiyah mengikuti begitu saja kebijakan pemerintah dengan menambahkan materi al-Islam dan kemuhammadiyahannya.¹¹

Ada tiga modal utama yang dimiliki Muhammadiyah untuk mengembangkan konsepsi pendidikan Muhammadiyah. Pertama, kekayaan khazanah pemikiran dan tradisi yang telah berjalan 100 tahun. Kedua, sumber daya manusia yang mumpuni dan menguasai persoalan kependidikan. Ketiga, kekayaan lembaga pendidikan dan para praktisi pendidikan mulai dari taman kanak-kanak (TK) sampai dengan perguruan Tinggi (PT) yang tersebar luas di seluruh

¹⁰Agus Miswanto, *Sejarah Islam..*, hlm. 194.

¹¹Muhammad Ali, *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah*, (Jakarta: al-Ausat, 2010), hlm. 6

pelosok tanah air.¹²Bahkan, Menurut Abdul Mu'thi pendidikan Muhammadiyah menjadi kiblat pendidikan Islam modern di Indonesia.Meskipun lebih banyak muncul karena tuntutan pragmatisme model-model pendidikan sekolah dan madrasah yang dikembangkan pemerintah merupakan template dari model pendidikan Muhammadiyah. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan pendidikan nasional dan Islam tidak dapat dipisahkan dari Muhammadiyah. Pendidikan menjadi trademark Muhammadiyah.¹³Dalam penelitiannya, MT Arifin-Muhammad Ali memilah tahapan elaborasi konsep ke dalam empat tahap, yaitu Perintisan lembaga, reformulasi identitas, pencarian model pendidikan alternatif, dan gerakan ilmu.¹⁴

1. Tahap Perintisan Lembaga (1905-1945)

Tahap perintisan lembaga ini berlangsung dari mulai Muhammadiyah belum berdiri hingga era kemerdekaan Indonesia. Pada tahap ini, KH Ahmad Dahlan mengalami kegeliasahan mencari model lembaga pendidikan yang terbaik, yaitu mulai dari model pondok pesantren sampai dengan lahirnya sistem sekolah *Met de Quran*. Temuan KH Dahlan tersebut kemudian menjadi model berdirinya sekolah-sekolah Muhammadiyah di berbagai pelosok tanah air.¹⁵

Yahdan Ibn Humam Saleh melakukan penelitian tentang pendidikan Muhammadiyah di era colonial.Menurut penelitian Yahdan Ibnu Human Saleh, bahwa Muhammadiyah memperkenalkan perubahan sosial (1912-1942) dalam system pendidikan,¹⁶ yaitu diadopsinyasystem pendidikan Barat dengan sistem pendidikan formal dan non-formalnya.¹⁷Muhammadiyah menekankan pentingnya sekolah sebagai sarana pendidikan di kedua mata pelajaran umum dan agama. Kombinasi dari dua jenis pendidikan sehingga menjadi khas di semua sekolah Muhammadiyah, dari TK sampai dengan SMA. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada masa kolonial Belanda pada saat sekolah masih terbatas.Kebijakan pendidikan Belanda yang diskriminatif dan hanya mendidik orang untuk memenuhi kebutuhan industri belanda, tidak membebaskan rakyat Indonesia dari keterbelakangan.¹⁸

Ruswan dalam penelitian tesisnya, melakukan studi komparatif tentang reformasi pendidikan yang diprakarsai oleh gerakan Aligarh di India dan Muhammadiyah di Indonesia.

¹²Muhammad Ali, *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah*, (jakarta: al-Ausat, 2010), hlm. 7

¹³ Abdul Mu'ti, "mencari Identitas Pendidikan Muhammadiyah, dalam Muhammad Ali Reinvensi pendidikan Muhammadiyah, (Jakarta: al-wasat, 2010), hlm.xxv.

¹⁴Muhammad Ali, *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah*, (jakarta: al-Ausat, 2010), hlm. 11

¹⁵Muhammad Ali, *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah*, (jakarta: al-Ausat, 2010), hlm. 11

¹⁶Di samping itu, Muhammadiyah, bisa dianggap sebagai gerakan Islam, sosial, pendidikan dan sosial telah diatur dan didedikasikan untuk bertujuan untuk mencapai cara hidup bebas dari penjajahan.Dalam situasi kolonialisme pada saat itu, Muhammadiyah dapat dilihat sebagai kekuatan sosial dan moral yang memiliki dan orientasi ke masa depan. Karena pada saat itu, Muhammadiyah melakukan kegiatan kolektif untuk menghadapi suatu kondisi keterbelakangan masyarakat, dengan kekuatan moral yang berpengaruh, yang memberikan pencerahan bagi umat, tanpa ambisi politik apapun, sebagai respon terhadap kondisi politik, budaya dan sosial. Yahdan Ibnu Human Saleh, "Colonial Educational Policy And Muhammadiyah's Education (Analitical History Of Muhammadiyah In Yogyakarta 1912-1942)", *Al-Jami'ah* No. 47 Th. 1991

¹⁷ Untuk tujuan ini, pada masa-masa awal, dasar pendirian pendidikan dan sosial telah diatur dan didedikasikan untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.Kontribusi sosial yang diberikan oleh Muhammadiyah di bidang kesejahteraan sosial dari 1912-1942 adalah proses rasionalisasi organisasi, pembentukan sistem baru lembaga pendidikan (1912, 1920, 1921, 1926, 1934, 1937), pembentukan gerakan kepanduan Hizb al-wathan (1918) untuk mendidik generasi muda, pendirian rumah sakit dan klinik (1923) dan panti asuhan (1925). Itu semuanya didedikasikan untuk Indonesia pada umumnya, dan Islam pada khususnya, yang pada saat itu mengalami keterbelakangan, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, sebagai akibat dari kolonialisme Belanda.Yahdan Ibnu Human Saleh, Ibid.

¹⁸ Kebijakan pendidikan kolonial hanya untuk memasok tenaga kerja terampil dan semi-terampil untuk industri dan perkebunan yang dimiliki oleh Belanda dan untuk mengisi pekerjaan sebagai pejabat pemerintah yang lebih rendah. Yahdan Ibnu Human Saleh, Ibid

Penelitian ini mencakup tiga poin utama, yaitu (1) Ahmad Khan dan filsafat pendidikan Ahmad Dahlan, (2) sistem pendidikan dari Muhammad dan Anglo-Oriental College (MAOC) dan sekolah Muhammadiyah, dan (3) dampak dari reformasi pendidikan dari dua gerakan untuk pendidikan Islam pada umumnya dalam dua negara. Menurut Ruswan, bahwa Ahmad Khan dan Ahmad Dahlan memiliki keprihatinan yang sama terhadap masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh umat Islam karena kebijakan kolonial. Kedua ulama berkeyakinan bahwa pendidikan adalah salah satu cara yang paling penting untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk itu, kedua ulama tersebut merancang sistem pendidikan baru bagi umat Islam, yang menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi tuntutan modern dalam konteks sosio-politik yang berubah sementara tetap mempertahankan iman mereka. Ide-ide mereka akhirnya diwujudkan dalam pembentukan MAOC dan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Meskipun kedua lembaga ini tidak dapat memenuhi semua aspirasi umat Islam, mereka berhasil membuat Muslim di India dan Indonesia menyadari perlunya pendidikan pragmatis, yang memberikan kontribusi untuk pemberdayaan umat Islam di era kolonial.¹⁹

2. Refomulasi Identitas Pendidikan (1945-1975)

Pada tahap ini, adanya kemunculan dan pembakuan materi al-Islam dan kemuhammadiyah sebagai identitas pendidikan Muhammadiyah.²⁰ Menurut penelusuran sejarah, MT Arifin menemukan bahwa mata pelajaran Kemuhammadiyah mulai muncul tahun 1962 di beberapa sekolah Muhammadiyah yang dijadikan sebagai *pilot project* (percontohan). Dan baru pada tahun 1970, Kemuhammadiyah diajarkan di seluruh perguruan Muhammadiyah. Ini menunjukkan bahwa materi ini hadir ketika perguruan Muhammadiyah sudah berjalan lebih dari 50 tahun.²¹

Menurut Muhammad Ali, perlu pemikiran kembali dalam melihat identitas pendidikan Muhammadiyah. Ciri khusus berupa mata pelajaran al-Islam dan Kemuhammadiyah lebih tepat dilihat sebagai identitas subyektif (intern) Muhammadiyah yang sulit untuk diobjektifkan (objektifikasi). Noeng Muhadjir, Muhammad Ali dan Marpuji Ali, kemudian menawarkan lima identitas (objektif) pendidikan Muhammadiyah. Kelima identitas itu adalah (1) menumbuhkan cara berfikir tajdid (inovatif/pembaharuan), (2) memiliki kemampuan antisipatif, (3) mengembangkan sikap pluralistic, (4) memupuk watak mandiri, dan (5) mengambil langkah moderat. Lima identitas inilah yang didikan kepada siswa di lembaga pendidikan Muhammadiyah awal dan generasi awal penggerak Muhammadiyah. Namun sayang, bahwa kelima identitas pendidikan Muhammadiyah tersebut, menurut Muhammad Ali, telah memudar seiring berjalan dan berlalunya waktu, dan yang tersisa adalah ciri khusus intern yang berupa al-Islam dan Kemuhammadiyah.²²

3. Pencarian Model-Model Pendidikan Alternatif (1975-2000)

Persoalan muncul ketika pemerintah mulai melakukan modernisasi madrasah dan kelompok-kelompok muslim generasi baru melakukan gerakan psiritualisasi sekolah. Modernisasi madrasah yang digerakan dengan sokongan penuh dari kementerian agama

¹⁹Ruswan, *Colonial experience and Muslim educational reforms: A Comparison of the Aligarh and the Muhammadiyah Movements*, (M.A. Thesis) (Canada: McGill University, 1997)

²⁰Muhammad Ali, *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah*, (Jakarta: al-Ausat, 2010), hlm. 11

²¹Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 34.

²²Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 35.

membuat madrasah perlahan-lahan mengangkat citra dan mutu madrasah swasta yang dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya Nahdhatul Ulama (NU). Tampilnya para kader NU di puncak pimpinan kementerian agama di hampir semua tingkatan membuat posisi madrasah Muhammadiyah mulai terhimpit. Dengan mutu pendidikan yang sama-bahkan dalam beberapa hal lebih baik-animo masyarakat mengirimkan anaknya ke madrasah Muhammadiyah jauh berkurang. Berkurangnya subsidi pemerintah dan rendahnya animo masyarakat membuat nafas madrasah Muhammadiyah semakin terengah-engah.²³

Keadaan yang tidak jauh berbeda juga terjadi di sekolah Muhammadiyah. Munculnya sekolah-sekolah model baru dengan penguatan pada sisi kegiatan keagamaan membuat sekolah-sekolah Muhammadiyah kurang diminati. Pengembangan pendidikan yang “government oriented” membuat lemahnya ciri keislaman dalam tubuh pendidikan Muhammadiyah. Pertanyaan kritis yang sering mencul dikalangan internal dan eksternal Muhammadiyah adalah apakah perbedaan sekolah Muhammadiyah dengan non-Muhammadiyah? Pada level tertentu, terjadilah krisis identitas pendidikan Muhammadiyah.

Pada tahap ini, adanya kemunculan kesadaran yang sangat kuat tentang adanya krisis yang menimpa pendidikan Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah dalam tahap mencoba untuk mengurai problematika pendidikan dan mencari model-model pendidikan alternatif yang selaras dengan perkembangan zaman. Salah satu model yang dicoba untuk dikembangkan Muhammadiyah adalah model pondok pesantren.²⁴ Menurut Khozin bahwa latar belakang dikembangkannya pesantren sebagai model pendidikan oleh Muhammadiyah, karena berangkat dari keprihatinan terhadap sarjana Muhammadiyah lulusan perguruan tinggi Islam yang tidak menguasai bahasa Arab dan kitab kuning.²⁵

Pendapat Khozin tersebut diamini oleh Rusli Karim yang menyatakan bahwa kurangnya perhatian Muhammadiyah terhadap pendidikan pesantren dan madrasah, membuat Muhammadiyah mengalami “krisis ulama”.²⁶ Kritik yang mengemuka tentang krisis ulama yang terjadi di Muhammadiyah, menurut Khozin, adalah ketika menjelang Mukhtamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta. Pada saat itu, Kyai AR Fahrudin menyatakan tidak bersedia untuk dipilih kembali untuk memimpin Muhammadiyah dengan alasan usia dan kesehatan. Ternyata sikap Kyai AR tersebut membuat repot dan bingung warga Muhammadiyah, untuk mencari penggantinya.²⁷ Dengan realitas demikian itu, maka pada saat itu, kecenderungan untuk membangun sistem pendidikan pesantren menjadi gejala umum di lingkungan Muhammadiyah. Hal ini kemudian diakomodir oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan merekomendasikannya ke pimpinan wilayah, daerah, dan bahkan ke perguruan tinggi Muhammadiyah untuk mendirikan pondok pesantren di wilayahnya masing-masing. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk kader dan melahirkan ulama tarjih (kadersisasi ulama) di lingkungan Muhammadiyah.

²³ Abdul Mu'ti, “mencari Identitas Pendidikan Muhammadiyah”, dalam Muhammad Ali, *Reinvensi pendidikan Muhammadiyah*, (Jakarta: al-Wasat, 2010), hlm xxv.

²⁴ Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 12

²⁵ Khozin, *Menggugat Pendidikan Muhammadiyah*, (Malang: UMMPress, 2005), hlm 132,

²⁶ Khozin, *Menggugat Pendidikan...*, hlm. 133. Lihat juga M Rusli Karim (ed), *Muhammadiyah dalam kritik dan Komentor*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1986).

²⁷ Khozin, *Menggugat Pendidikan...*, hlm. 137.

4. Rintisan Gerakan Ilmu (2000-Sekarang)

Menurut Abdul Mu'ti, tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Muhammadiyah yang begitu kompleks dan berat, melahirkan kesadaran baru di Muhammadiyah. Melalui forum “muhasabah” pendidikan, Muhammadiyah berusaha membangkitkan kembali etos tajdid untuk mengembalikan atau mempertahankan kejayaanya dalam bidang pendidikan. Beruntung sekali, kesadaran baru tumbuh pada saat nama harum Muhammadiyah masih bertahan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah “berkelas” berkembang di basis-basis tradisional Muhammadiyah, seperti Yogyakarta dan Surakarta. Yang cukup menggembirakan, sekolah-sekolah Muhammadiyah unggulan juga mulai berkembang di basis-basis baru, seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Malang Jawa Timur, Banjar Masin, dan Martapura di Kalimantan Timur, serta Pontianak di Kalimantan Barat. Baru-baru ini, di Denpasar, Bali juga didirikan sekolah Muhammadiyah Internasional.²⁸

Sejak tahun 2000, Muhammadiyah mulai merintis gerakan ilmu, yang implikasinya dalam dunia pendidikan, adalah lahirnya konsep-konsep orisinalitas berangkat dari pemikiran KH Ahmad Dahlan dan mengaktualisasikannya sesuai dengan perkembangan masyarakat kontemporer. Ahmad Syafi'i Ma'arif menegaskan bahwa gerakan ilmu sudah tidak bisa ditawarkan lagi untuk merebut masa depan bangsa yang gemilang. Gerakan ilmu, lanjutnya, adalah gerakan masyarakat yang gemar terhadap kegiatan membaca, menulis, berfikir dan bertindak secara efektif dan efisien. Namun, menurut Ahmad Syafi'i Maarif, kesadaran bangsa Indonesia terhadap pentingnya gerakan ilmu masih lemah. Tingkat konsumsi membaca buku masih rendah. Terlebih terhadap kemampuan menulis dengan baik, juga malah lebih rendah lagi. Masalah lebih kompleks lagi tatkala melihat tingkat buta aksara masih tinggi ditambah dengan tingkat anak yang putus sekolah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat.²⁹

Gerakan ilmu adalah gerakan pencerdasan dan pencerahan bagi peradaban.³⁰ Pada periode gerakan ilmu ini, Muhammadiyah dalam konteks pendidikan mendorong amalan untuk melahirkan konsepsi pendidikan, bukan hanya terpaku dalam urusan keuangan dan administrative semata. KH Ahmad Dahlan, sang Founding Fathers Muhammadiyah sudah merintis dengan mendidik warganya di perkampungan Kauman Yogyakarta. Perlahan tapi pasti, sepeninggal KH Ahmad Dahlan, lembaga pendidikan berpayung Muhammadiyah berkembang dengan pesat. Ribuan sekolah se Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA berdiri dengan pesatnya. Demikian pula, ratusan perguruan tinggi berdiri dengan megah lengkap dengan fasilitasnya yang modern dan berkualitas.³¹ Teladan KH Dahlan dalam menemukan model pendidikan memberikan inspirasi untuk terus melakukan inovasi dalam pendidikan. Sehingga pencarian terus dilakukan sehingga ditemukan model yang ideal untuk era kekinian. Setelah konsep ditemukan, kemudian diujicobakan dalam praksis pendidikan.

²⁸ Abdul Mu'ti, “mencari Identitas Pendidikan Muhammadiyah, dalam Muhammad Ali Reinvensi pendidikan Muhammadiyah, (Jakarta: al-wasat, 2010), hlm.xxvi.

²⁹ Jabrohim (Ed.), *ibid*

³⁰ Alfin Toefler dalam bukunya *Power Shift* menyatakan bahwa kekuatan yang paling dahsyat, canggih dan kuat bukan semata dari fisik ataupun mesin yang modern, akan tetapi kekuatan yang tiada tandingannya adalah kekuatan yang bertumpu pada ilmu pengetahuan dan system yang maju. Analisis toefler itu menunjukkan betapa ilmu pengetahuan merupakan kunci utama untuk menapaki abad 21. Benar pula apa yang dikatakan mantan presiden RI, B.J.Habibie bahwa ilmu adalah modal utama untuk merebut masa depan yang cerah bagi bangsa Indonesia tercinta ini.

³¹ Jabrohim (Ed.), *dkk, Membumikan Gerakan Ilmu Dalam Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 231.

Benih-benih pemikiran dan gerakan ke arah pembangunan konsepsi pendidikan sudah mulai muncul, namun belum dikelola secara sungguh-sungguh dan belum mendapatkan perhatian yang serius.³² Menurut Muhammad Ali, bahwa upaya rintisan yang dapat menjadi contoh adalah gagasan kurikulum syariah yang diimplementasikan di SD Muhammadiyah Program khusus Kotabarat Surakarta. Gagasan kurikulum syariah ini merupakan temuan atau inovasi dari Prof. Moch. Sholeh YAI. Demikian juga, temuan Prof Zamroni tentang pendidikan holistic transformative, yang diimplementasikan di sekolah Muhammadiyah Condong catur group. Dan kedua temuan tersebut sukses diimplementasikan di lapangan.³³

Walaupun sekolah unggul tersebut belum menjawab persoalan, menurut Abdul Mu'ti, bahwa harus diakui bahwa sekolah-sekolah unggulan tersebut terus mencari model-model khas pendidikan Muhammadiyah untuk menjawab amar filosofis pendidikan Muhammadiyah yang disampaikan KH Ahmad Dahlan: "Dadiyo kyai sing kemajuan, ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah" (jadilah kyai yang berkemajuan, jangan pernah letih berjuang di Muhammadiyah).³⁴

Pesan kyai Dahlan tersebut, menurut Abdul Mu'ti, mengandung tiga makna. Pertama, kata "kyai" mengandung pesan keislaman-keulamaan. Bagaimana pendidikan Muhammadiyah mencetak pelajar yang menguasai ilmu keislaman yang mendalam, taat menjalankan ibadah, dan berakhlakul karimah. Kedua, kata "kemajuan" mengandung pengertian kemodernan. Bagaimana pelajar Muhammadiyah mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi semesta, mengangkat harkat dan martabat perdaban umat manusia. Ketiga, kata "ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah" memiliki makna kekaderan. Pendidikan hendanya menjadi pusat perkaderan, yaitu lembaga yang menghasilkan kedar-kader persyarikatan, umat dan bangsa. Pendidikan adalah kawah candra dimuka yang mencetak kader-kader Muhammadiyah handal.³⁵

Untuk mewujudkan pesan Kyai Dahlan tersebut, paling tidak harus ada usaha yang dilakukan. Menurut Abdul Mu'ti, untuk mewujudkan pesan kyai dahlan tersebut paling tidak ada tiga usaha yang dapat dilakukan. Pertama, membangun konstruk epistemologi keilmuan sebagai fondasi pembelajaran integralistik. Banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah gagasan sains syariah yang secara konseptual filosofis telah berhasil dirumuskan. Yang lebih penting lagi adalah bahwa model kurikulum tersebut telah berhasil dikembangkan di lingkungan pendidikan Muhammadiyah di Surakarta. Kedua, mengembangkan inovasi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat pelajar belajar dengan gembira dan menjadikan sekolah sebagai second home (rumah kedua). SMP Muhammadiyah Gresik Kota baru telah mengembangkan program pembelajaran model ini. sejauh ini mereka berhasil dan telah menjadi sekolah alternative yang dikembangkan di Jawa Timur. Ketiga, menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang mencerminkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah. Sebagai misalnya adalah menciptakan sekolah sebagai minatur masyarakat Muhammadiyah. Hal ini dapat dikembangkan dengan membangun sekolah yang bersih dengan halaman luas, yang terpadu dengan masjid, dan

³²Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 14

³³Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 12

³⁴ Abdul Mu'ti, "mencari Identitas Pendidikan Muhammadiyah, dalam Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm xxvi.

³⁵ Abdul Mu'ti, "mencari Identitas Pendidikan Muhammadiyah, dalam Muhammad Ali *Reinvensi ...*, hlm. Xxvii.

semua guru dan pelajar berakhlak islam. Begitu berada di sekolah, pelajar sudah merasakan manisnya ber-muhammadiyah.³⁶

B. IDENTITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Menurut Abdul Mu'ti, bahwa tidak ada yang menyangkal, Muhammadiyah adalah peletak dasar dan pelopor pembaharuan pendidikan Islam di Indoensia. Gelisah dengan disintegrasi social yang bermuara pada dikotomi dua kutub pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah, Kyai Haji Ahmad Dahlan memulai gerakan pembaharuan pendidikan dengan memasukan pendidikan agama di sekolah dan memasukan pendidikan umum di madrasah. Spiritualisasi sekolah dimulai dari kegiatan pendidikan agama ekstrakurikuler yang diselenggarakan kyai haji Ahmad Dahlan di dua sekolah pemerintah Belanda, yaitu Kweekschool di Jetis, Yogyakarta dan OSVIA di Magelang. Kyai Dahlan melihat potensi sangat strategis pelajar di kedua sekolah tersebut sebagai calon guru dan pamong praja. Jika mendapatkan pelajaran agama maka mereka akan menjadi sosok intelktual yang ulama sebagai pioneer dakwah. Selain itu, Kyai dahlan juga melakukan modernisasi pendidikan Islam dengan merintis lembaga pendidikan Madrasah yang di dalamnya diajarkan studi umum.³⁷

Beberapa tokoh Muhammadiyah telah berusaha untuk mencari dan menemukan identitas pendidikan Muhammadiyah. Usahayang mereka lakukan adalah menimba inspirasi dari gagasan dan praktek pendidikan yang dilakukan KH Ahmad Dahlan.

1. Pendidikan Ulama Berkemajuan

Konsep isi merupakan hasil temuan dari penelitian permulaan tentang pendidikan Muhammadiyah yang dilakukan oleh Amir hamzah Wirjosukarto tahun 1968. Menurut penelitian tersebut bahwa Pembaharuan penddidikan yang dilakukan oleh KH Ahmad dahlan diawali dengan penemuan konsep atau cita-cita baru. Yaitu perluasan konsep cita-cita pendidikan islam tradisional yang tertumpu pada upaya melahirkan kyai kemudian mengalami perluasan menjadi ulama/kyai plus intelektual, dengan istilah KH Dahlan ulama berkemajuan. Perluasan konsep ini berimplikasi pada muncul dan berkembangn pendidikan model baru yang integralsitik. Dengan kata lain, konsep ini berupaya untuk mengintegrasikan pola pesantren tradisional dengan model sekolah barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial belanda.³⁸

Konsep pendidikan ulama berkemajuan ini, didasarkan pada pesan atau wasiat disampaikan kyai haji Ahmad Dahlan: “Dadiyo kyai sing kemajuan, ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah” (jadilah kyai yang berkemajuan, jangan pernah letih berjuang di Muhammadiyah).³⁹Pesan kyai dahlan tersebut, menurut Abdul Mu'ti, mengandung tiga makna. Pertama, kata “kyai” mengadung pesan keislaman-keulamaan. Bagaimana pendidikan Muhammadiyah mencetak pelajar yang menguasai ilmu keislaman yang mendalam, taat menjalankan ibadah, dan berakhlakul karimah. Kedua, kata ‘kemajuan’ mengandung pengertian kemodernan. Bagaiman pelajar Muhammadiyah mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi semesta, mengangkat harkat dan martabat perdaban umat manusia. Ketiga, kata “ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo

³⁶ Abdul Mu'ti, “mencari ...”, hlm.xxvii.

³⁷ Abdul Mu'ti, “mencari ...”, hlm.xxiv.

³⁸Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 8

³⁹ Abdul Mu'ti, “mencari ...”, hlm xxvi.

Muhammadiyah” memiliki makna kekaderan. Pendidikan hendanya menjadi pusat perkaderan, yaitu lembaga yang menghasilkan kedar-kader persyarikatan, umat dan bangsa. Pendidikan adalah kawah candra dimuka yang mencetak kader-kader Muhammadiyah handal.⁴⁰

Hanya saja, ada suatu kritikan terhadap konsep pendidikan Muhammadiyah model ini. M. Rusli karim dalam tulisanya “pendidikan Muhammadiyah dalam perspektif islam, menilai bahwa upaya pembaharuan pendidikan muhammadiyah yang berupaya mengintegrasikan pesantren dan sekolah umum, atau ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, secara tidak sadar malah justru menumbuh suburkan dan mempertajam dikotomi ilmu. Realitas tersebut, menurut Rusli karim, dapat dilihat dari lulusan pendidikan Muhammadiyah yang cenderung menjadi pribadi yang terbelah, yaitu memiliki kemampuan yang tanggung dalam penguasaan ilmu agama dan ilmu umum.⁴¹

Apa yang dikekmukan oleh M Rusli karim tersebut, menurut Muhammad Ali tidaklah aneh. Karena Rusli karim membaca pengalaman Muhammadiyah dalam kaca mata islamisasi ilmu yang digagas oleh Ismail Razi al-Faruqi. Menurut Muhammad Ali, bahwa menggunakan atau meletakkan perspektif haruslah hati-hati. Boleh jadi kesalahan perspektif akan berimplikasi pada simpikasi persoalan. Sehingga, seolah-olah pendidikan Muhammadiyah sudah tidak lagi merupakan manifestasi Islam.⁴²

Kritik yang lain adalah dari hasil penelitian Muahmmad Fuad tentang program pendidikan Muhammadiyah untuk merespon modernitas. Menurut Fuad, bahwa kebutuhan untuk mempersiapkan siswa untuk hidup di zaman modern telah menyebabkan sekolah Muhammadiyah menekankan pengajaran pengetahuan umum modern dan keterampilan, yang sering kali dengan mengorbankan pelajaran agama. Realitas demikian ini telah menjadisa sumber energi bagi pemikir Muhammadiyah untuk mencari formula baru pendidikan, untuk mendamaikan Islam dan ilmu pengetahuan modern, serta menjadikan Islam tetap menjadisistem nilai yang layak di tengah-tengah masyarakat industry.⁴³

2. Pendidikan Profetik

Istilah profetik sudah banyak dielaborasi oleh para ahli untuk merujuk kepada konsep yang berasal dari Nabi SAW.⁴⁴ Bagi umat Islam, Nabi merupakan figure teladan (*uswah hasanah*) dalam berbagai bidang kehidupan termasuk di dalamnya adalah model pendidikan Nabi SAW. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang bersemboyan ruju’ ilal qur’an was-sunnah dalam area pergerakannya senantiasa untuk menjadikan Nabi SAW sebagai sentral rujukan bagi dinamika dan etos gerakan. Model pendidikan Nabi di sini tidak dimaksudkan sebagai pengambilan konsep dalam pengertian yang bersifat kaku, yaitu praktik pendidikan pada zaman nabi, tetapi pengambilan konsep yang bersifat substantif, yaitu nilai-

⁴⁰ Abdul Mu’ti, “mencari ...”, hlm. Xxvii.

⁴¹ Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 24-25.

⁴² Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 25

⁴³ Fuad, Muhammad: *Islam, modernity and Muhammadiyah's educational Programme*, Inter-Asia Cultural Studies, (Routledge, part of the Taylor & Francis Group, 2004) Volume 5, Number 3, pp. 400-414(15)

⁴⁴ Abdul Munir Mulkhan dalam salah satu karyanya menulis tentang kepemimpinan profetik. Dalam karyanya tersebut, Mulkhan mengintrodusir tentang nilai-nilai dasar kepemimpinan nabi yang dapat dijadikan suri tauladan bagi kepemimpinan Muhammadiyah Kontemoprer. Abdul Munir Mulkhan, dkk, *Kepemimpinan Profetik untuk Gerakan Tajdid :Jelang se-Abad Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005)

nilai pembelajaran yang dilakukan dan dioperasikan oleh Nabi dalam rangka memberikan pencerahan (tanwir) dan pembebasan (tahrir) bagi manusia.

Konsep pendidikan profetik ini, menurut Muhammad Ali berangkat dari tawaran konsep Kontowijoyo tentang ilmu sosial profetik. Walaupun Kuntowijoyo tidak berbicara tentang pendidikan profetik, tetapi teorinya tentang ilmu sosial profetik dapat ditarik dalam ranah kependidikan. Dalam kerangka teori yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo tersebut, bahwa hakekat atau karakter pendidikan profetik memiliki karakter humanisasi, liberasi, dan transendensi.⁴⁵ Humanisasi maksudnya bahwa proses pendidikan harus dapat mengembalikan fitrah manusia, yaitu memanusaiakan dan menumbuhsadarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Liberasi maksudnya adalah bahwa pendidikan yang diberikan hendaknya mampu membebaskan siswa, peserta didik dari ketertindasan dan ketergantungan kepada manusia lainya. Sedangkan transedensi, maksudnya bahwa pendidikan itu harus dapat mengenalkan manusia akan hakekat yang maha tinggi., Allah SWT.

3. Pendidikan Holistic Transformative

Konsep pendidikan *holistik transformative* merupakan gagasan Prof Dr. Zamroni. Gagasan ini muncul berdasarkan hasil perjumpaan dengan belajar kepada tokoh-tokoh Muhammdiyah yang pernah belajar langsung pada KH Ahmad Dahlan. Yang dimaksudkan dengan pendidikan *holistik transformative* adalah pendidikan yang berusaha mendidik manusia secara utuh dan mengubah masyarakat menjadi lebih baik, yaitu masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Karakteristik pendidikan *holistik tarnsformative* ini antara lain, yaitu (1) memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang secara utuh; (keterpaduan proses formal, non-formal, dan keluarga. (3) keterpaduan antara teori, praktek, dan apa yang ada dalam masyarakat. (4) menekankan pengembangan secara optimal dalam diri individu dan kelompok. (5) partisipatif.

4. Pendidikan Etos Pembaharuan

Teori ini dielaborasi oleh Mohammad Djazman dalam tulisanya “Implementasi Ajaran Pendidikan KH Ahmad Dahlandalam Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang tahap II”. Muhammad Djazman menegaskan bahwa Kyai Dahlan tidak sekedar mendirikan satuan pendidikan saja, tidak pula sistem, tetapi yang dikembangkan oleh Kyai Dahlan adalah etos kerja berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dan inilah yang menjadi dasar seluruh amal usaha Muhammadiyah. Sehingga, menurut Djazman bahwa KH Dahlan tidak bermaksud mewariskan “sistem pendidikan” tetapi mewariskan etos pembaharuan (kerja) pendidikan. Menurut Muhammad Ali bahwa etos pembaharuan dapat dianalogikan dengan api, sedangkan sistem pendidikan adalah arangnya (hasil nyala api). Oleh karena itu, Djazman menegaskan bahwa yang penting untuk diwarisi adalah etos pembaruannya, bukan sekedar sistem pendidikannya. Dengan demikian, pewarisan etos pembaharuan akan melahirkan sistem pendidikan baru yang bisa jadi berlainan dengan sistem pendidikan temuan KH Ahmad Dahlan, tetapi lebih relevan dengan konteks dan situasi zaman tersebut.⁴⁶

Hal senada diungkapkan oleh Prof. Dr. A. Munir Mulkhan. Dalam konteks pembaharuan Muhammadiyah, Mulkhan berpendapat, bahwa orang lebih banyak menangkap modelnya,

⁴⁵ Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 9

⁴⁶ Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 10.

tetapi kurang berhasil memahami etos pembaharuan ketika KH Dahlan mendirikan sekolah modern. Menurut Mulkhan, jika kita ingin menangkap ide dasar dan etos pembaharuan Kyai Dahlan dari banyak usaha kreatif adalah penting untuk mencermati kesimpulan Alfian dalam penelitiannya yang menyebutnya sebagai pragmatisasi dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dan atau revitalisasi inklusif.⁴⁷ Mulkhan menyarankan, bahwa Amal usaha Muhammadiyah perlu dibedah kembali supaya ditemukan etos pembaharuan seperti yang dipelopori oleh pendirinya. Dengan cara itu menurutnya dapat dikembangkan “model-model baru” pembaharuan, bukan sekedar menerima atau melanjutkan model yang dulu dikembangkan oleh Kyai Dahlan seperti model sekolah modern atau berbagai bentuk gerakan social yang kini mungkin sudah “usang”.⁴⁸

5. Pendidikan Agama *Confessional*

Penelitian Abdul Mu'thi mengungkapkan bahwa dalam konteks pendidikan agama atau keagamaan, terdapat tiga aliran (model) pendidikan agama. *Pertama*, pendidikan agama tidak perlu diajarkan sebagai studi wajib dalam kurikulum sekolah tetapi cukup diberikan di dalam keluarga dan masyarakat melalui lembaga-lembaga keagamaan. Pendapat ini dielaborasi oleh Daoed Joesoef, menteri pendidikan dan kebudayaan RI (1978-1983). Dalam hal ini, Joesoef berkata:

“Pendidikan agama, agar efektif, sebaiknya diberikan di luar jalur pendidikan umum formal, berupa *Zondagschool* bagi agama Kristen dan katolik. Bila mengenai Islam kiranya baik pula surau difungsikan sebagai tempat pengajian... dengan begitu penduduk juga didorong menjadi semakin erat hubungannya dengan surau yang ada di RT atau RW masing-masing”.⁴⁹

Kedua, pendidikan agama diajarkan disekolah dalam kedudukannya sebagai ilmu sosial (*social science*) yang bersifat *non-confessional*. Pendidikan agama bertujuan semata-mata untuk mempelajari agama sebagai ilmu dan pengetahuan tentang masyarakat (*learning to know about religion*), bukan untuk menanamkan keyakinan dan membentuk manusia taat kepada agamanya (*learning to be religious persons*). *Ketiga*, pendidikan agama diajarkan di sekolah sebagai studi wajib yang bersifat *confessional*. Sistem pendidikan agama bertujuan untuk menanamkan dan memperteguh keyakinan terhadap agama untuk memperkuat identitas bangsa.⁵⁰

Dalam konteks Indonesia, pemerintah mengembangkan sistem pendidikan agama *confessional*. Secara historis menurut Mu'thi, sistem pendidikan agama *confessional* bukanlah sistem yang baru karena pernah diberlakukan pada masa penjajahan Portugis dan Belanda. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pendidikan agama *confessional* bersifat pilihan, bukan merupakan studi wajib bagi setiap siswa. Pada pemerintahan orde baru melakukan formalisasi dan institusionalisasi pendidikan agama sebagai studi wajib yang diajarkan kepada seluruh siswa di semua jenjang pendidikan.⁵¹ Menurut Mu'thi

⁴⁷Dr. Abdul Munir Mulkhan, “Pembaharuan Muhammadiyah dalam Ilmu dan gerakan Sosial”, dalam Maryadi dan Abdullah Aly (ed), *Muhammadiyah dalam Kritik*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm.90.

⁴⁸Dr. Abdul Munir Mulkhan, “Pembaharuan...”, hlm. 91.

⁴⁹Daoed Joesoef, *Dia Dan Aku: Memoar Pencari Kebenaran*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm 814.

⁵⁰ Abdul Mu'thi, *Kristen Muhammadiyah...*, hlm. 12. Lihat juga Denise Cush, “Should religious Studies be part of the Compulsory state school Curriculum?” *British Journal Of Religious Education*, 29 (3), september 2007, hlm 221-227.

⁵¹ Abdul Mu'thi, *Kristen Muhammadiyah...*, hlm. 13. Lihat juga M Saerozi, *Politik Pendidikan Agama dalam era Pluralisme*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004).

pengembangan sistem pendidikan agama *confessional* di dasarkan atas tiga alasan. Pertama, alasan konstitusional yang mengacu pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 (1) UUD 1945: “Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang maha Esa”. Kedua, alasan sosiologis untuk memelihara karakteristik bangsa Indonesia yang religius. Ketiga, alasan politis, yaitu agama sebagai hak azai manusia dan pengalaman politik indonesia dengan komunisme. Sistem pendidikan agama *confessional* ditegaskan dalam undang undang no 2/1989 tentang Pendidikan nasional juncto undang-undang no 20/2003 tentang pendidikan Nasional terutama pada rumusan tujuan pendidikan nasional, pengembangan dan muatan kurikulum, dan hak peserta didik. Disamping itu pemerintah indonesia juga mengeluarkan peraturan pemerintah no 55/2007 tentang pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.⁵²

Namun dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan tentang pendidikan agama yang sudah ada tidak terimplementasi sebagaimana mestinya. Ada dua alasan utama mengapa pendidikan agama tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pertama, keterbatasan tenaga pendidik (guru). Karena sekolah tidak memiliki guru agama maka pendidikan agama diajarkan oleh guru bidang studi lain yang dinilai memiliki kompetensi pengetahuan agama. Kedua, alasan ideologis. Sekolah mengembangkan system pendidikan agama tersendiri karena lebih mengutamakan “misi” agama sebagaimana dikembangkan oleh Muhammadiyah, Ahmadiyah, Kristen, dan katolik.⁵³

Menilik system pendidikan agama yang ada, secara umum terdapat tiga model system pendidikan agama yang diterapkan oleh sekolah-sekolah berciri khas agama. Pertama, model “eksklusif” dimana siswa yang berbeda-beda agama hanya menerima satu pendidikan agama *confessional* yang sesuai dengan agama sekolah yang diajarkan oleh guru agama. Sebagai contoh, tanpa memperhatikan agamanya seluruh siswa yang belajar di sekolah Kristen wajib mengikuti pendidikan agama Kristen yang diajarkan oleh guru Kristen. Kedua, model “inklusif” dimana siswa yang berbeda-beda agama mempelajari ajaran beberapa agama. Dalam model ini, pendidikan agama bersifat non-*confessional* yang menekankan aspek kognitif, yaitu siswa memahami dan membandingkan ajaran beberapa agama, menemukan nilai-nilai persamaan antar agama. Selama proses pembelajaran siswa dipandu oleh seorang guru agama yang berperan sebagai fasilitator. Model “pendidikan religiusitas” ini dikembangkan sebagai strategi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang pluralitas agama dalam masyarakat.⁵⁴ Ketiga, model “pluralis” dimana siswa

⁵² Pasal 3 UU no 20/2003 Tentang sistem Pendidikan nasional: “Pendidikan nasional ...bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, ...”. Pasal 36 (3: a,b,h) UU 20/2003: “kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan ...dengan memperhatikan (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; ... (h) agama.” Pasal 37 (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (a) pendidikan agama... (2) kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (a) pendidikan agama... UU 20/2003, pasal 12 (1) : setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Abdul Mu’thi, Kristen Muhammadiyah, hlm. 13-14

⁵³ Idealnya, sekolah agama dapat mengintegrasikan tiga fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan social. Tetapi, sekolah agama kadang kala berada dalam posisi yang dilematis, yaitu antara mematuhi undang-undang dengan pengembangan dakwah agama. Jika sekolah lebih mengutamakan misi, maka ada kecenderungan sekolah melanggar undang-undang. Dan sebaliknya, jika sekolah lebih mengutamakan pelaksanaan undang-undang, maka perannya sebagai lembaga misi tidak maksimal. pilihan-pilihan prioritas inilah yang menyebabkan pendidikan agama di sekolah agama bisa menjadi sumber konflik dan ketegangan antar umat beragama. Abdul Mu’thi, Kristen Muhammadiyah, hlm. 14 dan 16

⁵⁴ Listia, et al, *Problematikan Pendidikan Agama di Sekolah: Hasil Penelitian Tentang Pendidikan Agama di Yogyakarta 2004-2006*, (Yogyakarta: Interfidei, 2007)

mendapatkan dua “pendidikan agama”. Yang pertama, siswa menerima pendidikan *confessional* sebagaimana diatur di dalam per-undang-undangan pendidikan. Selain ini, siswa wajib mengikuti “pendidikan keagamaan” non *confessional* sesuai dengan agama sekolah.⁵⁵

Dalam konteks pendidikan agama di sekolah, Muhammadiyah mengadopsi pola pendidikan agama *confessional*. Hanya saja, dalam prakteknya di lapangan, Muhammadiyah sangat memperhatikan situasi dan lingkungan di mana Muhammadiyah berkembang. Di wilayah-wilayah, di mana umat Islam mayoritas Muhammadiyah menggunakan model *confessional* eksklusif, yaitu pendidikan agama yang mengajarkan agama sesuai dengan kepercayaan Muhammadiyah saja. Sementara untuk wilayah-wilayah dimana umat Islam adalah minoritas, Muhammadiyah mengembangkan pendidikan agama *confessional* pluralis, yaitu sekolah Muhammadiyah menyediakan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan para siswanya, tetapi disisi lain, murid-murid juga diharuskan untuk ikut pendidikan keagamaan yang menjadi keyakinan sekolah. Model ini dikembangkan Muhammadiyah di wilayah NTT dan Papua.

C. CITA-CITA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah mendirikan sekolah bukan tanpa maksud dan tujuan. Hanya saja, secara historis dicatat, bahwa selama seperempat abad, dari tahun 1912 sampai dengan tahun 1936, Muhammadiyah tidak mempunyai rumusan tertulis tentang apa itu cita-cita Pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan dijalankan berdasarkan pandangan dan pemikiran KH.A. Dahlan tentang profil hasil didikan yakni ulama yang intelek dan intelek yang ulama.⁵⁶ Barulah seperempat abad kemudian, Muhammadiyah merumuskan cita-cita tersebut secara tertulis, yaitu pada Kongres Seperempat Abad Muhammadiyah. pada tahun 1936 yang berlangsung di Betawi. Rumusan ini kemudian terkenal dengan nama Rumusan Betawi. Secara utuh, rumusan Betawi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Riwayat Kolonial Onderwijs Politik memberi peringatan yang terang dengan kuatnya, bahwa perbuatannya tidak memberi keputusannya dan kegembiraan bagi rakyat Indonesia.
- b. Mulai pertama bekerja Kolonial Onderwijs itu tidak lain dan tidak bukan akan mencari sebanyak orang-orang yang cakap membaca dan menulis untuk menjadi pegawai sebagai kaum buruh.
- c. Pada waktu malaese ini semakin nyatalah: pendapat kami seperti tersebut di atas.
- d. Muhammadiyah ini dibangun oleh umat Islam, bertempat di Indonesia untuk kepentingan makhluk Tuhan, ia mengetahui, ia melihat, yakin dan rakyat Indonesia pada umumnya tidak mengerti seluk-beluk acara Islam; rakyat Indonesia jatuh ke dalam kemiskinan, meskipun Indonesia sendiri yang dapat menghasilkan rezeki
- e. Rakyat Indonesia tidak mengerti kesehatan menjaga diri supaya jangan dihindangi penyakit, demikianlah menyebabkan tidak bernaflu dan bangun bergiat mencari sesuap nasi.

⁵⁵Perbedaan model system pendidikan agama di sekolah-sekolah agama disebabkan oleh perbedaan ijtihad dalam mensinergikan ketentuan undang-undang, misi agama dan konteks social budaya masyarakat. Pertama sekolah sebagai lembaga public terikat oleh hokum dan perundangan. Sekolah tidak hanya terikat oleh undang-undang pendidikan nasional, tetapi juga undang-undang tentang perlindungan anak, peraturan pemerintah tentang penyebaran agama dan perundang-undangan lainnya. Kedua, sekolah sebagai lembaga agama (an agent of religious missionary). Ketiga, sekolah sebagai lembaga social terikat oleh konteks social budaya dan agama masyarakat. Sebagai lembaga social berperan untuk memelihara kerukunan social dan memberikan pelayanan kepada sesama. Abdul Mu'thi, Kristen Muhammadiyah, hlm. 15-16

⁵⁶M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm. 85

f. Dengan sebab itu semua maka merasai wajiblah Muhammadiyah mengembalikan, membangunkan, dan mengobar-ngobarkan semangat akan datangnya perbaikan kemuliaannya, dengan jalan perlahan-lahan tetapi tentu dapatnya, maka buat eerste periode Muhammadiyah membangun perguruan-perguruan itu dengan berdasarkan atas tiga tingkatan, yakni: (1) Menggiring anak-anak Indonesia menjadi orang Islam yang berkobar-kobar semangatnya; (2) Badannya sehat tegap bekerja; dan (3) Hidup tangannya mencari rezeki sendiri, sehingga kesemuanya memberi faedah yang besar dan berharga hingga bagi badannya dan hidup bersama.⁵⁷

Setelah berjalan 19 tahun, tepatnya pada tahun 1954 berlangsunglah. Konferensi Pengajaran Muhammadiyah di Bandung. Konferensi ini, di samping untuk kebutuhan menampung aspirasi dan perkembangan pendidikan Muhammadiyah yang semakin lama semakin marak juga atas usul dari Soekarno, yang serngaja menulis sebuah artikel dalam surat kabar ADIL, nomor 9. tahun X, 1941 yang berjudul *Adakanlah Satu Onderwijs Congres Muhammadiyah yang Spesial*.⁵⁸ Dalam Konferensi ini dirumuskan tujuan pendidikan Muhammadiyah. yang baru. Namun, karena rumusan itu baru berskala keputusan lokal Bandung, maka kemudian rumusan ini dibawa ke dalam konferensi yang berskala nasional, yakni Sidang Tanwirpada tahun 1955, di Pekajangan Pekalongan. Hasil rumusan Sidang Tanwir Pekajangan ini berbunyi: *Tujuan Pendidikan Muhammadiyah ialah membentuk manusia Muslim, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat*. "Rumusan ini secara populer dikenal dengan nama Rumusan Pekajangan."⁵⁹

Menurut Abdul Mu'thi bahwa sekolah sebagai amal usaha Muhammadiyah memiliki tiga fungsi, yaitu pendidikan, dakwah Islam amar makruf nahi mungkar, dan pengkaderan. Ketiga fungsi tersebut nampak dalam visi dan misi Majelis Pendidikan dasar dan Menengah (Dikdasmen) sebagai majelis yang secara khusus berkhidmat dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah. Visi majelis Dikdasmen adalah tertatanya manajemen dan jaringan pendidikan yang efektif sebagai gerakan Islam yang maju, profesional, dan modern serta untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas pendidikan Muhammadiyah. Adapun misi majelis Dikdasmen adalah: (1) menegakan keyakinan tauhid yang murni, (2) menyebarkan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah, (3) mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat, (4) menjadikan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pengkaderan.⁶⁰

D. KEUNIKAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Kehadiran pendidikan Muhammadiyah dalam mencerdaskan bangsa sudah berlangsung satu abad. Daya tahan eksistensi ini tentu karena pendidikan Muhammadiyah memiliki ciri khas ataupun keunikan yang melekat padanya, dan tidak ada pada lembaga pendidikan lain.

⁵⁷M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm.86

⁵⁸M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm 86

⁵⁹M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm. 86

⁶⁰Abdul Mu'thi dan Fajar Reza Ulhaq, *Kristen Muhammadiyah: Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan*, (Jakarta: al-Wasat, 2009), hlm. 18. Lihat juga surat keputusan Majelis Pendidikan dasar dan Menengah tentang tanfidz Keputusan rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Pendidikan dasar dan Menengah (Dikdasmen) se-Indonesia).

Hanya saja, menyangkut keunikan tersebut dalam konteks teori ataupun praksis, masih menyisahkan perdebatan dan pertanyaan.⁶¹

Secara kasat mata, melalui pengelihatian praksis pendidikan di lapangan, sangatlah sulit membedakan kehadiran sekolah Muhammadiyah dengan sekolah negeri, kecuali ada tambahan mata pelajaran al-Islam dan Kemuhammadiyah. Padahal mestinya keunikan pendidikan Muhammadiyah lebih luas dan lebih mendalam dari hal itu. Sebab konsep pendidikan Muhammadiyah berbeda dengan konsep pendidikan nasional. Corak perbedaan tersebut dimulai dari sistem pendidikannya, mulai dari tujuan pendidikannya, kurikulum, metode, dan cara evaluasi.⁶²

E. FILSAFAT PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata Philo yang berarti cinta, dan kata Sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Terhadap pengertian ini al-Syaibani mengatakan bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Selanjutnya ia menambahkan bahwa filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Selain itu terdapat pula teori lain yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari kata Arab falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani, *Philosophia*: *philos* berarti cinta, suka (*loving*), dan *sophia* yang berarti pengetahuan, hikmah (*wisdom*). Jadi, *Philosophia* berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran atau lazimnya disebut *Philosopher* yang dalam bahasa Arab disebut *failasuf*.⁶³

Rekonstruksi filsafat pendidikan Muhammadiyah adalah perumusan kembali filsafat pendidikan yang khas Muhammadiyah sesuai watak tajdid yang menjadi identitasnya. Diakui bahwa selama ini filsafat pendidikan Muhammadiyah belum terformulasiikan seperti halnya filsafat pendidikan Islam yang sudah menjadi diskursus di jurusan pendidikan agama Islam pada UIN, IAIN, dan fakultas-fakultas agama Islam. Sehingga sampai saat ini filsafat pendidikan Muhammadiyah masih meraba-raba dari berbagai referensi yang ada kaitanya dengan Muhammadiyah dan juga pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah.⁶⁴

Menurut Khozin, untuk merekonstruksikan pemikiran filsafat pendidikan Muhammadiyah paling tidak ada beberapa hal yang harus menjadi titik pijak. *Pertama*, harus meletakkan Islam sebagai sumber nilai, sementara Muhammadiyah diletakan sebagai metodologi. Sebagai metodologi, Muhammadiyah harus dinamis dalam menggali nilai-nilai islam untuk diimplementasikan dalam bidang pendidikan. Hal ini, menurut Khozin, relevan dan sejalan dengan keputusan muktamar ke 43 di banda Aceh, yang mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk merumuskan filasafat pendidikannya. Dan ternyata, tugas tersebut

⁶¹ Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 17

⁶² Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 17

⁶³A. Hanafi, M.A. mengatakan bahwa pengertian filsafat telah mengalami perubahan-perubahan sepanjang masanya. Pitagoras (481-411 SM), yang dikenal sebagai orang yang pertama yang menggunakan perkataan tersebut. Dari beberapa kutipan di atas dapat diketahui bahwa pengertian fisafat dari segi semantik adalah cinta terhadap pengetahuan atau kebijaksanaan. Dengan demikian filsafat adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Filsafat juga memiliki pengertian dari segi istilah atau kesepakatan yang lazim digunakan oleh para ahli, atau pengertian dari segi praktis. Ahmad Hanafi, M.A., *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), Cet. IV.

⁶⁴Khozin, *Menggugat Pendidikan Muhammadiyah*, (Malang: UMMPress, 2005), hlm. 79

belum terealisasi sampai saat ini. ⁶⁵ *Kedua*, perumusan filsafat pendidikan Muhammadiyah, harus berangkat dari titik singgung antara normativitas wahyu dan historisitas pemahaman manusia tentang wahyu. Dengan merujuk pendapat Amin Abdullah, Khozin berpendapat bahwa sejak awal gerakan dakwah Muhammadiyah selalu mempertautkan antara normativitas wahyu dan historisitas pemahaman manusia terhadap wahyu. Yang pertama adalah wilayah *ruju' ilal qur'an wa al-sunnah*, sedangkan yang kedua adalah wilayah ijtihad dan tajdid. ⁶⁶ Secara historis, model pendidikan Muhammadiyah merupakan wujud pembacaan KH Ahmad Dahlan terhadap realitas kesejarahan pendidikan yang dialami dan dimiliki umat Islam saat itu dan pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah Kolonial pada saat itu. Di samping itu, pembacaan realitas sejarah yang dilakukan KH Dahlan pada saat itu, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman beliau yang mendalam terhadap teks (nash) baik al-Qur'an dan as-Sunnah. Sehingga beliau berhasil melakukan ijtihadnya sendiri yang berbeda dengan yang difikirkan oleh umat Islam pada zamanya. Sehingga, *ketiga*, untuk dapat merumuskan filsafat pendidikan Muhammadiyah yang menjanjikan masa depan, perlu pemahaman yang mendalam terhadap realitas historis pembangunan system pendidikan Muhammadiyah oleh generasi awal. Dan *keempat*, perlu penajaman kemampuan dalam menelaah realitas sekarang dan menyusun estimasi tantangan-tantangan ke depan yang mesti harus dihadapi out put lembaga pendidikan Muhammadiyah. Data tentang perkiraan kompleksitas kehidupan di masa depan ini sangat dibutuhkan dalam penyusunan program dan penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah di masa sekarang dan yang akan datang. ⁶⁷

Dari ekspresi kerangka filosofis pendidikan di atas, perumusan ide dasar dan filosofi pendidikan Muhammadiyah bisa dilakukan dengan melakukan penelaahan idealitas wahyu tentang pendidikan yang dipertautkan dengan realitas secara kontekstual. Pendekatan itu telah menjadi karakteristik yang tidak bisa dipisahkan dari Muhammadiyah seperti yang sudah dicontohkan generasi awal Muhammadiyah. ⁶⁸

Sementara itu, Syafii Maarif dalam salah satu tulisannya, berpendapat bahwa Muhammadiyah punya hak dan kewajiban untuk merumuskan filsafat pendidikan Islam berdasarkan pemahaman yang cerdas dan kreatif terhadap Al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurut Buya Syafii' bahwa secara umum filsafat pendidikan Muhammadiyah harus mampu mengawinkan antara tuntutan otak dan tuntutan hati. Tidak seperti yang berkembang dalam dunia modern sekarang. Barat terlalu sibuk dengan urusan otak dan teknik, sementara dunia Timur sebagian masih saja tenggelam dalam spiritualisme dan ilmu tenung. Dalam isyarat Al-Qur'an, system pendidikan yang mampu menyatukan kekuatan *fikr* dan *dzikr* yang ujungnya akan melahirkan kelompok *ulu al-albab*, sosok manusia yang otak dan jantungnya hidup secara dinamis-kreatif dalam memahami dan merasakan kehadiran Sumber segala yang ada dalam pengembangan dan pengembaraan intelektual dan spiritualnya. ⁶⁹

Lebih jauh Buya Syafii menegaskan bahwa dunia modern yang bertumpu pada doktrin *cogito ergo sum* (saya tahu, oleh sebab itu saya ada) yang terlalu mengandalkan capaian otak,

⁶⁵ Khozin, *Menggugat...*, hlm. 80.

⁶⁶ Khozin, *Menggugat...*, hlm. 91.

⁶⁷ Khozin, *Menggugat...*, hlm. 97.

⁶⁸ Khozin, *Menggugat...*, hlm. 97.

⁶⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Ke Arah Perumusan Filsafat Pendidikan Islam/Muhammadiyah*, dalam Ahmad Syafii, *Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan: Sebuah refleksi sejarah*. (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 229.

telah lama sepi dari kultur kearifan. Menurut Al-Qur'an, kelompok *ulu al-albab* adalah mereka yang sarat dengan muatan kebajikan dan kearifan itu. Sejalan dan senapas dengan apa yang terurai di atas, dimensi penting lainnya yang harus menjadi muatan filsafat pendidikan Muhammadiyah ialah perlunya mempertegas hubungan segitiga antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan sesama.⁷⁰

F. MANAJEMEN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Dari segi bahasa manajemen berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata *management* yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata *pimpinan*. Dalam kamus Inggris, kata *management* berasal dari akar kata *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan.⁷¹ Dan dalam bahasa Arab, bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah *al-tadbir* (pengaturan).⁷² Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an seperti firman Allah SWT :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (Al Sajdah : 05).

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt adalah pengatur alam (manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadaikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

Sementara menurut istilah, manajemen adalah proses mengkordinasikan aktifitas-aktifitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.⁷³ Sedangkan pendapat lain menyatakan, bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.⁷⁴

Bila kita perhatikan dari kedua pengertian manajemen di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain dan bekerjasama dengannya, agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, efisien, dan produktif. Sedangkan Pendidikan Muhammadiyah merupakan proses internalisasi nilai-nilai Islam sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah kepada peserta didik sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Dengan demikian maka yang disebut dengan manajemen pendidikan Muhammadiyah adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki oleh Muhammadiyah atau Amal Usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien,

⁷⁰Ahmad Syafii Maarif, *Ke Arah Perumusan Filsafat ...*, hlm. 229-231

⁷¹John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995), hlm.372.

⁷²Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 362.

⁷³Robbin dan Coulter, *Manajemen (edisi VIII)*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), hlm.8

⁷⁴Sondang P Siagian, *Filsafah Administrasi*, (Jakarta: CV Masaagung, 1990), hlm.5.

dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Khozin bahwa diskursus manajemen pendidikan Muhammadiyah belum begitu marak hingga tahun 2000. Rekonstruksi manajemen Pendidikan Muhammadiyah dimulai pada tahun 2000 menyongsong Muktamar Muhammadiyah ke-44, di Jakarta. Pandangan Khozin tersebut seandainya benar, maka hal ini sangat memprihatinkan. Karena Muhammadiyah dari semenjak awal yang menegaskan sebagai gerakan Islam modern dan focus dalam bidang pendidikan, ternyata sangat terlambat dalam diskursus manajemen. Kalau begitu, maka wajar kalau kemudian problematika pendidikan yang begitu kompleks terjadi di Muhammadiyah. Oleh karena itu, mencuatnya diskursus manajemen pendidikan menjelang muktamar Muhammadiyah disambut antusias karena dinilai tepat, urgen, dan strategis. Dipandang tepat, karena pendidikan adalah amal usaha persyarikatan yang pertama dan “utama”. Dikatakan urgen mengingat prestasi kuantitatif pendidikan Muhammadiyah belum diimbangi dengan prestasi kualitatif. Kemudian dinilai strategis, karena dengan peningkatan kualitas pendidikan Muhammadiyah, akan berdampak positif terhadap kebangkitan dunia pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa.⁷⁵

Fadjar, sebagaimana dikutip oleh Khozin, berpandangan bahwa setidaknya ada empat wilayah penting dalam mengkaji manajemen pendidikan Muhammadiyah, yaitu: (1) *educational philosophies*, yaitu pandangan mengenai nilai-nilai kefilosofan yang mencakup pemahaman mengenai Islam, cita-cita dan tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. (2) *educational in puts*, pandangan seputar unsur-unsur masukan yang meliputi kurikulum, guru, dan seluruh sarana dan prasarana pendidikan. (3) *educational process*, yaitu pandangan seputar proses pendidikan yang mencakup interaksi didaktis-metodis-pedagogis untuk implementasi serta aktualisasi pendidikan dan pengajranya. (4) *educational out puts*, yaitu pandangan seputar keluaran pendidikan yang meliputi kelulusan (tamatan) lembaga pendidikan Muhammadiyah, terkait dengan kesepadanan dan keragaman perilaku mereka dalam melaksanakan berbagai peranya di masyarakat.⁷⁶

Khozin dalam penelitiannya mengidentifikasi paling tidak ada lima nilai hal yang selama ini berkembang dalam manajemen pendidikan Muhammadiyah, yaitu tumbuh dan berkembang dari bawah (bottom up), Islam sebagai sumber nilai, mempertimbangkan budaya, ikhlas plus profesional, dan membangun sinergi.⁷⁷

G. KURIKULUM PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah dari sejak awal berdirinya, tidak hanya mengelola sekolah-sekolah agama saja, tetapi Muhammadiyah juga menyelenggarakan sekolah-sekolah yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengikuti system persekolahan pemerintah yang sudah ada. Sekolah-sekolah tersebut adalah HIS Muhammadiyah, MULO, HIK Muhammadiyah, dan schakel school Muhammadiyah. Dalam penyelenggaraan kurikulum sekolah-sekolah tersebut, pelajaran agama diberikan dengan perbandingan 10-15% untuk pelajaran agama dari keseluruhan kurikulum yang ada.⁷⁸

⁷⁵ Khozin, *Menggugat Pendidikan Muhammadiyah*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm 100-101.

⁷⁶ Khozin, *Menggugat...*, hlm. 101.

⁷⁷ Khozin, *Menggugat...*, hlm. 103-121

⁷⁸ Khozin, *Menggugat ...*, hlm. 46

Bila ditinjau dari aspek kurikulum, menurut KH Ahmad Dahlan ada dua landasan yang kokoh yaitu Al Qur'an dan Sunah. Pandangan beliau tentang pendidikan islam bertitik tolak dari upaya pengembangan akal melalui proses pendidikan yang akhirnya bermuara pada tumbuhnya kreatifitas dan memberikan implikasi bagi warga Muhammadiyah untuk memiliki semangat tajdid (pembaharuan). Menurut KH Ahmad Dahlan nilai dasar pendidikan yang harus ditegakkan dan dilaksanakan untuk membangun bangsa yang benar yaitu: pertama, pendidikan akhlak yang berdasarkan pada Al Qur'an dan sunah; kedua, Pendidikan Individu; ketiga, pendidikan Sosial. Dalam pendidikan KH Ahmad Dahlan menekankan pentingnya pengelolaan pendidikan islam yang modern dan professional. Dan ditinjau dari metode pengajaran KH Ahmad Dahlan mulai merintis sebuah sekolah yang memadukan pengajaran ilmu agama islam dan ilmu umum. Sistem pengajarannya klasikal dan cara tersebut masih dianggap asing bagi kalangan masyarakat santri, bahkan tak jarang dikatakan sekolah kafir, tetapi beliau selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Akhirnya setelah proses belajar mengajar terkelola, sekolah yang didirikan KH Ahmad Dahlan diresmikan pada tanggal 1 Desember 1911 M dan diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, ketika diresmikan sekolah itu mempunyai 29 siswa dan enam bulan kemudian dilaporkan terdapat 62 siswa.⁷⁹

Menurut Wirjosoekarto, pada 1965 mengemukakan dalam bukunya "Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran oleh Pergerakan Muhammadiyah", bahwa ada perbedaan yang menonjol antara sekolah Muhammadiyah dengan pondok pesantren tradisional pada saat itu. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah: (1) cara belajar dan mengajar. Di pondok pesantren tradisional masih memakai cara belajar dengan sistem sorogan⁸⁰ dan weton,⁸¹ tetapi di pondok Muhammadiyah digunakan system klasikal dengan memakai cara-cara yang terhitung modern, seperti yang dilakukan dalam pendidikan barat. (2) bahan pelajaran, di pondok pesantren tradisional, bahan pelajaran semata-mata hanya agama, kitab karangan para pembaharu belum dipakai. Tetapi di Pondok Muhammadiyah di samping pelajaran agama, juga diajarkan ilmu pengetahuan umum, dan kitab-kitab yang diajarkan terdapat karangan ulama khalaf. (3) rencana pelajaran, di pesantren tradisional, belum memiliki rencana pembelajaran yang teratur dan integral. Sedangkan di pondok pesantren Muhammadiyah sudah diatur dengan rencana kurikulum sehingga efisiensi belajar lebih terjamin. (4) pengasuh dan guru, di pesantren tradisional, para pengasuhnya hanya terdiri dari mereka yang berpengalaman agama saja, tetapi di pondok Muhammadiyah disamping ada guru-guru agama, juga terdapat guru-guru ilmu pengetahuan umum. (5) hubungan guru dan murid, di pondok pesantren tradisional, hubungan guru dan murid lebih bersifat otoriter. Sedangkan di

⁷⁹ Agus Miswanto, *Sejarah Islam..*, hlm. 194.

⁸⁰ Metode sorogan merupakan suatu metode yang ditempuh dengan cara guru menyampaikan pelajaran kepada santri secara individual, biasanya di samping di pesantren juga dilangsungkan di Mushola, masjid atau terkadang malah di rumah-rumah. Penyampaian pelajaran kepada santri secara bergilir ini biasanya dipraktekkan pada santri yang jumlahnya sedikit. Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 28.

⁸¹ Metode wetonan atau disebut bandongan adalah metode yang paling utama di lingkungan pesantren. Zamakhsyari dhofier menerangkan bahwa metode wetonan (bandongan) ialah suatu metode pengajaran dengan cara guru membaca, menerjemahkan, menerangkan dan mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab sedang sekelompok santri mendengarkannya. Mereka memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan (baik arti maupun keterangan) tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit. Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 28.

pondok Muhammadiyah, diusahakan suasana yang lebih akrab antara guru dengan para santrinya.⁸²

Sementara itu, Khozin dalam penelitiannya menyatakan bahwa, konsepsi teknik pengajaran adalah suatu pemikiran awal (cita-cita) pembaharuan pengajaran dengan segenap komponennya, sesuai dengan gagasan pembaharuan teknik pengajaran KH Ahmad Dahlan yang dipengaruhi oleh situasi sistem pendidikan Islam tradisional yang berbasis di pondok pesantren. Gagasan pembaharuan teknik pengajaran KH Dahlan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Sosrosoegondo, bahwa dalam setiap pertemuan, Kyai Dahlan sering membicarakan segi-segi positif pola pendidikan pemerintahan Kolonial Belanda kepada teman-temannya, dibandingkan dengan pola pendidikan Islam tradisional. Dalam pertemuan tersebut, Kyai Dahlan menawarkan ide-ide pembaharuannya tentang teknik pengajaran yang harus diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional tersebut. Kyai Dahlan berpendapat, bahwa sistem pendidikan Kolonial adalah sistem pendidikan yang paling modern. Seperti pola klasikal yang lebih efisien dan efektif, murid-murid mendapatkan fasilitas ruang belajar, meja kursi, metode dan materi pelajaran yang tersusun secara sistematis. Pada kesempatan yang lain, murid-murid juga mendapatkan pelajaran tambahan yang sekarang dikenal dengan istilah ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.⁸³

Terkait dengan kurikulum sekolah Muhammadiyah, Muhammad tafsir memberikan catatan kritis. Beliau melihat munculnya anomali pembaharuan Muhammadiyah tatkala menyimak materi kurikulum al-Islam dan kemuhammadiyah. Tafsir menambahkan, bahwa keluasan berfikir Muhammadiyah (tajdid) kemudian terperangkap dalam pemikiran sempit (taqlid). Ini terlihat dalam kurikulum sekolah Muhammadiyah, yaitu konsep al-Islam cukup dipahami dan dihayati, sedangkan untuk kemuhammadiyah itu dipahami, dihayati dan diamalkan.⁸⁴ Hanya saja catatan tafsir ini, menurut Muhammad Ali harus dikalifikasi. Karena menurut pengalaman Muhammad Ali bahwa kedua materi al-Islam dan kemuhammadiyah adalah merupakan satu kesatuan materi. Dan materi al-Islam merupakan pengejawantahan dari pemahaman keagamaan Muhammadiyah.⁸⁵

Dalam penelitian lain, Elisabeth Jackson, dalam penelitiannya pada 2007, membahas tentang model kurikulum *civic education* (pendidikan kewarganegaraan) di lembaga pendidikan Muhammadiyah, khususnya di perguruan tinggi. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengembangan kurikulum yang integrative menyangkut konsep-konsep Islam tentang negara dan kewarganegaraan dengan konsepsi dan praktek Barat tentang masyarakat sipil, demokrasi, dan pluralisme dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan praktek pengajaran.⁸⁶ Keberhasilan pengalaman Muhammadiyah,

⁸² Khozin, *Menggugat ...*, hlm. 47.

⁸³ Khozin, *Menggugat ...*, hlm. 44.

⁸⁴ Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 25

⁸⁵ Muhammad Ali, *Reinvensi ...*, hlm. 26

⁸⁶ Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma selama dekade terakhir dalam rangka mengelola keragaman masyarakat karena peningkatan dalam konflik etnis dan agama. Pergeseran ini berdampak pada pendidikan karena kurikulum sekolah harus mengatasi masalah hidup bersama sebagai bangsa bersatu meskipun perbedaan agama dan etnis. Hal ini terutama berlaku dari kurikulum pendidikan agama. Namun, sejak era Orde Baru (Soeharto rezim, 1966-1998), pendidikan agama telah disalahgunakan oleh negara untuk membatasi kebebasan beragama dan mempromosikan model yang tidak sensitif terhadap keragaman dan perbedaan. Hal ini penting, bagaimanapun, bahwa pendidikan agama harus berakar dalam perspektif multikultural didukung oleh wawasan teologis. Baidhaw, Zakiyuddin, "Building harmony and peace through multiculturalist theology-based religious education: an alternative for contemporary Indonesia", *British Journal of Religious Education*, (London: Routledge, part of the Taylor & Francis Group, 2007) Volume 29, Number 1, pp. 15-30

memberikan contoh bagaimana konsep-konsep Barat dan nilai-nilai Islam dapat berhasil diintegrasikan dalam pengajaran pendidikan kewarganegaraan.⁸⁷ Penelitian Jackson tersebut telah memberikan kontribusi untuk pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya Muhammadiyah dalam konteks pasca-1998, era transisi Indonesia menuju demokrasi.

Dalam lingkungan plural di Indonesia, integrasi konsep-konsep Islam tentang kewarganegaraan dengan gagasan-gagasan Barat tentang demokrasi dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan tidak menimbulkan konflik yang signifikan di antara para pendidik Muslim. Sebaliknya, dengan beberapa pengecualian, kurikulum telah disambut baik oleh universitas, staf pengajar, dan mahasiswa. Pengenalan pengajaran partisipatif dan berpusat pada siswa, juga telah diterima secara positif baik oleh mahasiswa dan staf pengajar. Hal yang menarik lain dari temuan Jackson adalah bahwa keberhasilan pendidikan kewarganegaraan di universitas Muhammadiyah, paling tidak ada dua hal. Pertama, pendekatan yang diambil dalam pengembangan program pendidikan kewarganegaraan adalah integrative, baik untuk buku teks pegangan bagi mahasiswa atau pegangan dosen di kelas, yaitu di mana prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil yang direpresentasikan sebagai dasarnya kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Kedua, proses pengembangan kurikulum baru itu sendiri yang demokratis, di mana semua stakeholder-universitas dari pimpinan, dosen, dan mahasiswa secara aktif dilibatkan dalam semua tahap.⁸⁸

Penelitian lain yang menyangkut kurikulum adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Miswanto. Dalam penelitian ini, dibahas tentang pendidikan HAM dalam kurikulum pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyah. Penelitian ini mengungkapkan fakta yang sebaliknya dari yang diungkapkan oleh Jackson di atas, yaitu adanya proses negosiasi dalam implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di sekolah Muhammadiyah. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa telah terjadinya perdebatan cukup sengit dalam Muhammadiyah antara kelompok progresif yang menerima dan konservatif yang menolak menyangkut model kurikulum pendidikan HAM, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam memperkenalkan pendidikan HAM. Melalui studi literatur dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa penolakan kelompok konservatif terhadap pendidikan HAM dalam kurikulum AIK di sekolah Muhammadiyah muncul karena pendidikan HAM dianggap

⁸⁷Pasca-1998 transisi Indonesia menuju demokrasi telah disajikan pendidik Muslim dengan kesempatan untuk ambil bagian dalam membentuk masa depan demokrasi Indonesia dengan cara yang konsisten dengan aspirasi sosial, politik, dan pendidikan Islam. Salah satu kendaraan utama untuk melakukannya adalah pendidikan kewarganegaraan. Untuk pendidik Muslim di sektor pendidikan tinggi Islam, tantangan telah mengembangkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang dapat mendidik generasi muda tentang kewarganegaraan demokratis sedangkan menggabungkan nilai-nilai dan perspektif Islam tentang civil society, demokrasi, dan hak asasi manusia. Jackson, Elisabeth. 2007. "Crafting A New Democracy: Civic Education In Indonesian Islamic Universities". *Asia Pacific Journal Of Education*. 27 (1): 41-54.

⁸⁸Pengalaman Indonesia inovasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan berlangsung dalam lingkungan desentralisasi meningkat dan devolusi otoritas pendidikan yang merupakan bagian integral dari transisi pasca-1998 dengan budaya politik yang lebih terbuka dan demokratis. Ini disediakan Indonesia lembaga-lembaga Islam pendidikan tinggi dengan otonomi untuk menentukan isi kurikulum. Namun, pelaksanaan kurikulum baru di kedua sistem universitas negeri Islam dan Muhammadiyah sistem universitas, dan penerapannya dalam semua lembaga dalam dua sistem, adalah proses yang relatif terpusat, di mana pengembangan kurikulum berlangsung dan keputusan penting dibuat oleh dua universitas yang paling berpengaruh dalam sistem universitas. Desentralisasi kewenangan untuk pendidikan tidak bermasalah. Di beberapa daerah di Indonesia, desentralisasi telah memungkinkan konservatif lokal untuk berusaha membatasi kebebasan publik. Upaya tersebut memiliki implikasi penting untuk kemerdekaan pendidikan, termasuk kebebasan dari intervensi politik dalam menentukan kurikulum. Perkembangan ini menggarisbawahi pentingnya kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang kuat di universitas Islam, yang akan menghasilkan warga negara yang mampu mengartikulasikan hak-hak dan kepentingan mereka dan secara terbuka mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai kebebasan politik. Jackson, Elisabeth. 2007. *ibid*.

sebagai representasi ideologi Barat yang dipandang sebagai memusuhi 'nilai-nilai Islam'. Ternyata ketakutan dan keraguan di kalangan aktifis, pemikir, dan pendidik konservatif terbukti tidak berdasar, karena pendidikan HAM di sekolah Muhammadiyah justru memperkuat pilar-pilar Islam dan sistem pendidikan Muhammadiyah, bukan sebaliknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan HAM di sekolah Muhammadiyah telah memberikan dampak positif pada pengalaman belajar siswa, dan telah meningkatkan kinerja pengajaran serta penilaian yang positif. Ini artinya bahwa pendidikan HAM telah terbukti menjadi tambahan yang berharga untuk kurikulum AIK.⁸⁹

⁸⁹ Miswanto, Agus. *Introducing Human Rights Education in Indonesia: the Experience of Muhammadiyah Schools 2005-2010*. (MA Thesis), (The Hague, Netherlands: Institute of Social Studies, 2010).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut E. Kristi Poerwandari, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.⁹⁰

B. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lima sekolah Muhammadiyah (SLTA dan SMK) di wilayah Magelang baik di Kota maupun Kabupaten. Dua sekolah diambil sebagai sampel untuk Kota Magelang, dan tiga sekolah diambil sebagai sampel untuk Kabupaten Magelang. Sementara untuk subjek dari penelitian ini adalah guru PAI, dengan karakteristik subjek adalah sebagai guru PAI di SMA/SMK Muhammadiyah wilayah Magelang, terutama yang mengampu mapel Fiqh (hukum Islam). Dan untuk objek penelitian ini adalah kurikulum yang digunakan dan diimplementasikan oleh para guru atau sekolah di masing-masing sekolah tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi, dan studi literatur.

1. Wawancara

Wawancara⁹¹ adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.⁹² Dilihat dari prosesnya, wawancara dapat disebut “seni menanyakan sesuatu dengan ‘alat’ pertanyaan yang benar” (*the art for asking the right question*).⁹³ Wawancara dilakukan untuk mengkonstruksikan orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan sebagainya baik yang berkenaan peristiwa masa lampau, sekarang, ataupun suatu prediksi masa datang.⁹⁴

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut E. Kristi Poerwandari, bahwa dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara, yakni interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat

⁹⁰E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, Fakultas Psikologi UI, 1998)

⁹¹Kerlinger (dalam Hasan 2000) menyebutkan 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara, yaitu (1) Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh interviewer dengan memberikan penjelasan. (2) Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu; (3) Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat tehnik lain sudah tidak dapat dilakukan. Menurut Yin (2003) disamping memiliki kekuatan, metode wawancara juga memiliki kelemahan, yaitu : (1) Retan terhadap bias yang ditimbulkan oleh kontruksi pertanyaan yang penyusunannya kurang baik; (2) Retan terhadap terhadap bias yang ditimbulkan oleh respon yang kurang sesuai; (3) *Probling* yang kurang baik menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang akurat; (4) Ada kemungkinan subjek hanya memberikan jawaban yang ingin didengar oleh *interviewer*.

⁹²Asep Saeful Muhatadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), hlm. 161. Lihat juga Imam Robandi, *Becoming the Winner: Riset, Menulis Ilmiah, Publikasi Ilmiah, dan Prsesentasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008), hlm. 121.

⁹³Asep Saeful Muhatadi dan Agus Ahmad Safei, *ibid*

⁹⁴Asep Saeful Muhatadi dan Agus Ahmad Safei, *ibid*, hlm 163.

umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.⁹⁵ Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Disamping itu, pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode observasi.⁹⁶ Observasi adalah salah satu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti.⁹⁷ Dan tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁹⁸ Untuk konsistensi observasi yang dilakukan, maka untuk itu digunakan Pedoman Observasi. Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara.

3. Studi Literatur

Dalam penelitian ini untuk proses pengumpulan data, disamping menggunakan observasi, dan wawancara, juga digunakan studi literatur. Studi literatur digunakan untuk melihat dan menganalisis kurikulum yang digunakan oleh guru atau sekolah.

D. Teknik Analisis Data

Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi), dan analisis kualitatif. Analisis isi digunakan untuk melihat isi kurikulum hukum Islam yang menjadi standard dan diajarkan di sekolah. Sementara analisis kualitatif dimanfaatkan untuk menganalisis hasil observasi, wawancara dari guru, dan buku-buku teks yang dipergunakan

1. Analisis Isi

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan-kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik secara sistematis dan objektif dari suatu teks. Analisis isi ini dilakukan melalui proses identifikasi dan telaah pesan-pesan yang

⁹⁵E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif ...*, *ibid.*

⁹⁶ Menurut Patton bahwa hasil observasi menjadi data penting karena : (1) Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi; (2) Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif; (3) Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari; (4) Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara; (5) Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasaan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti. E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif...*, *ibid.*

⁹⁷Surjanto, "Teknik Pengumpulan Data" dalam M. Amin Abdullah, et al, *Metodologi Penelitian Agama: Multi Disipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 205.

⁹⁸E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif...*, *ibid.*

tertuang dalam suatu teks.⁹⁹Tujuan utama analisis isi adalah menjelaskan karakteristik dari pesan-pesan yang termuat dalam teks-teks umum.¹⁰⁰

2. Analisis Kualitatif.

Analisis kualitatif adalah proses analisis untuk datapenelitian kualitatif, dengan beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan,¹⁰¹ diantaranya:

a) *Proses Pengumpulan data berdasar kerangka berfikir (teori) yang digunakan.*

Ketika mengumpulkan data di lapangan, peneliti tidak sembarangan mengambil data tanpa arah yang jelas, tetapi adanya kerangka berfikir sesuai dengan orientasi penelitian.

b) *Proses seleksi terhadap data yang relevan dengan fokus pembahasan.*

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam dan perhatian yang penuh terhadap data yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden.

c) *Proses Penyusunan data sesuai dengan alur pikir peneliti*

Data ibarat bahan bangunan yang belum disusun. Oleh karena itu, supaya data dapat dipahami pembaca, maka data yang ada disusun sesuai dengan kerangka dan alur berfikir peneliti. Dengan demikian, data akan semakin runtut, sehingga pembaca mudah untuk memahami penelitian tersebut.

d) *Proses penafsiran data sesuai dengan konteks yang dikembangkan dalam penelitian ini.*

Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

⁹⁹Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode...*, hlm. 112.

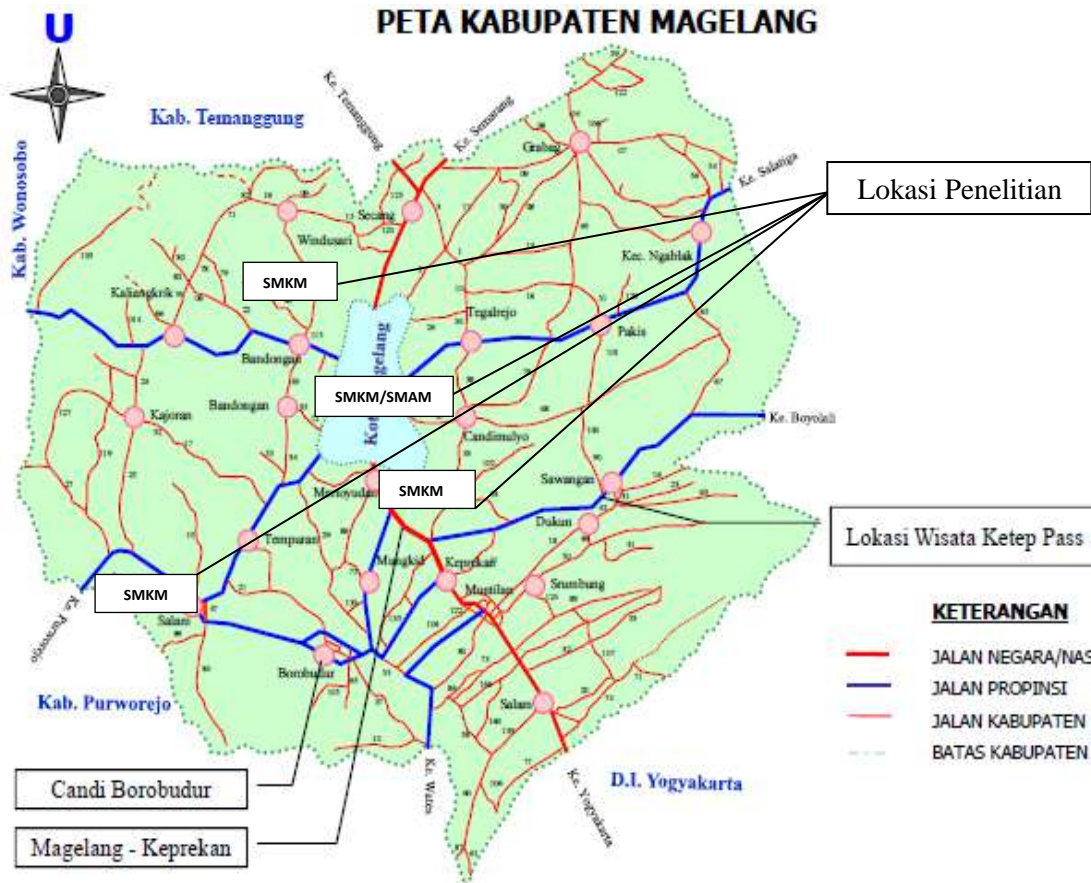
¹⁰⁰Asep Saeful Muhtadi dan Agus Safei, *Metode...*, hlm 113.

¹⁰¹Radjasa Mu'tasim, "Metode Analisis Data", dalam M. Amin Abdullah, et al, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 219-221.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN: PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH DI MAGELANG

Gambar 1:



Masuknya Muhammadiyah di Magelang merupakan pengaruh langsung dari gerakan Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Perkembangan Muhammadiyah di Magelang paling tidak melalui tiga fase, yaitu masa pertumbuhan awal, masa penyebaran, dan fase konsolidasi internal organisasi. Fase pertumbuhan awal, merupakan gerakan gelombang pertama, yang terjadi pada masa penjajahan Belanda. Pada era ini, terdapat 4 group (komunitas) utama Muhammadiyah, yaitu Borobudur, Muntilan, Magelang, dan Salam. Grup Borobudur dan Muntilan merupakan komunitas Muhammadiyah yang pertama kali mulai berkembang pada tahun 1927. Sementara komunitas Magelang yang bertempat di Kwarasan dan komunitas Salam yang beralamat di Jagalan, merupakan komunitas Muhammadiyah yang Mulai tumbuh pada tahun 1939.¹⁰²

Sementara fase gelombang kedua merupakan penyebaran dan pengembangan ke wilayah lain di Magelang. Pada fase ini, masing-masing grup, baik Borobudur, Muntilan, Magelang, dan Salam mengembangkan organisasinya melalui cara mereka disesuaikan dengan kekuatan dan potensinya, sehingga bisa mempengaruhi wilayah yang ada di sekitarnya. Seperti halnya Salam yang bisa melahirkan Ngluwar dan Srumbung. Muntilan mampu melahirkan ranting-

¹⁰²Muhammad Nasiruddin, et al, *Sejarah Muhammadiyah Magelang: Ada Untuk Bermakna*, (Magelang: PDM Kabupaten Magelang, 2006), hlm. 22-27.

ranting Dukun, Sawangan, Salaman dan Mungkid. Kemudian dari grup Magelang melebarkan pengaruhnya hingga bisa berdiri Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Mertoyudan, Secang, Grabag bahkan Windusari. Sedangkan grup Borobudur berbenah dalam wilayah kecamatannya.¹⁰³

Sedangkan gelombang ketiga atau gelombang terakhir lebih bersifat internal yakni sentimen sebagai akibat pemisahan PDM kabupaten dan kota Magelang, berupa berdirinya tiga PCM di kota dan berdirinya PCM Candimulyo dan rintisan Muhammadiyah di kecamatan Pakis.¹⁰⁴ Dan perkembangan Muhammadiyah, hingga saat ini, tersebar di hampir di setiap kecamatan yang ada di Magelang. Dari 3 kecamatan yang ada di Kota Magelang, dan 21 kecamatan di kabupaten Magelang, Muhammadiyah telah bersemi di daerah tersebut dan memiliki pengurus dan amal usaha, kecuali di Pakis.

Tabel2: Perbandingan Jumlah Kecamatan/Desa dan PCM/PRM

Wilayah	Kecamatan	PCM	Desa	PRM
Kabupaten	21	18	372	139
Kota	3	3	14	3

Sumber: Sejarah muhammadiyah Magelang, hlm. 28

Fokus utama usaha Muhammadiyah Magelang adalah di bidang pendidikan, walaupun bidang-bidang lain juga tidak diabaikan. Karena sekolah merupakan amal usaha utama persyarikatan Muhammadiyah yang sejak semula merupakan pilihan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika tokoh pergerakan lain mencoba melalui jalur politik dan ekonomi, KH Ahmad Dahlan focus di bidang pendidikan sebagai wahana perjuangan memajukan bangsa.¹⁰⁵ Beliau ini membuka cakrawala perlunya mengejar ketertinggalan dari Barat, terutama menyangkut penguasaan sains dan teknologi. Memperbanyak sekolah mirip sekolah Pemerintah Belanda yang lebih berkualitas dengan tidak meninggalkan mata pelajaran Islam untuk memberi kesempatan kepada pribumi muslim merupakan salah satu alasan keberadaan awal pendidikan Muhammadiyah.

AUM di bidang pendidikan, merupakan asset kebanggaan yang dimiliki oleh Muhammadiyah Magelang. Seiring berjalanya waktu, AUM di bidang pendidikan setahap demi setahap mengalami peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat dilihat dari kualitas lulusan dan juga animo masyarakat untuk memasukan putra-putri mereka ke sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bahkan beberapa sekolah Muhammadiyah di Magelang memiliki prestasi gemilang. Sebagai contoh adalah SMK Borobudur yang terkenal karena

¹⁰³Muhammad Nasiruddin, et al, *ibid*

¹⁰⁴Muhammad Nasiruddin, et al, *ibid*.

¹⁰⁵Pada periode dekade pertama abad ke-20 gerakan-gerakan politik mulai dibangun menggantikan pemberontakan bersenjata yang dilakukan secara sporadis sepanjang masa kolonial. Gerakan ekonomi juga dilakukan melalui asosiasi atau persyarikatan dagang seperti misalnya Syarikat Dagang Islam (SDI) yang juga dilakukan untuk mengimbangi firma dagang VOC. Gerakan Islam tradisional dilakukan melalui bentuk pendidikan pesantren yang hanya mempelajari ilmu agama. Belanda melaksanakan pendidikan secara diskriminatif. Pendidikan yang berkualitas diperuntukkan untuk keluarga Belanda di Indonesia dan anak pejabat atau bangsawan pribumi. Sementara untuk rakyat, Pemerintah Hindia Belanda membuat sekolah rakyat dan sekolah pedesaan. Sekolah kualitas dua didesain oleh pemerintah kolonial untuk memperoleh tenaga kerja murah yang bisa bahasa Belanda baik di perkebunan-perkebunan maupun di kantor-kantor pemerintah. KH Ahmad Dahlan membuat dua koreksi sekaligus, pertama beliau menyadari bahwa dunia Islam sangat tertinggal dibanding Barat yang karena ketertinggalan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi. Kedua, beliau ingin memperbanyak sekolah Barat yang berkualitas yang pada waktu itu hanya bisa dinikmati keluarga Belanda dan bangsawan. Guru-guru beliau seperti Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha banyak berinteraksi dengan Barat bahkan tinggal di berbagai negara Barat. Prof Bambang Setiaji, [Memperkokoh Pendidikan pada Seabad Muhammadiyah](#) *Seputar Indonesia*, Friday, 02 July 2010.

keberhasilannya membuat mobil ESMKA, SMK 2 Mertoyudan yang sering menjuarai lomba untuk tingkat propinsi bahkan nasional untuk bidang agro (pertanian).SD Mutual yang murid-muridnya banyak menjuarai lomba-lomba tingkat nasional bahkan internasional.Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Muhammadiyah di Magelang sangat diperhitungkan.

Tabel3: Jumlah dan Ragam AUM di Magelang

Wilayah	TK/BA	SD/MI	SMP/MTs	SMU/MA	SMK	PT	BKIA	PAY	PONPES
Kabupaten	138	67	36	14	10	1	5	6	4
Kota	8	3	1	2	1	1	0	1	0

Sumber: Sejarah Muhammadiyah Magelang, hlm. 29.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan Muhammadiyah di Magelang dari sisi kuantitas cukup banyak. Dan terdistribusi pada hampir merata ada di semua kecamatan baik di kota maupun kabupaten Magelang. Demikian juga kepengurusan organisasi Muhammadiyah juga hampir seluruh kecamatan yang ada di Magelang, kecuali Pakis. Di kecamatan Pakis, Muhammadiyah masih dalam tahap perintasan dakwah dan kader. Sehingga hingga sampai saat ini belum memiliki amal usaha dan juga kepengurusan organisasi.¹⁰⁶

B. HASIL PENELITIAN: KURIKULUM HUKUM ISLAM

1. Pengertian

1) Kurikulum

Secara bahasa, curriculum dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata *curir* yang artinya pelari; dan *curere* yang artinya tempat berpacu. Dan curriculum sendiri diartikan sebagai jarak yang harus di tempuh oleh pelari. Sedangkan kurikulum dalam pendidikan di artikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh anak didik untuk memperoleh ijazah.¹⁰⁷ Dalam bahasa Arab, kurikulum diartikan dengan *manhaj*, yaitu jalan yang terang, atau jalan yang harus dilalui manusia dalam kehidupannya. Merujuk kepada al-Khauly, Muhaimin menjelaskan bahwa *al-manhaj* adalah seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.¹⁰⁸

Secara istilah, kurikulum didefinisikan dengan suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Pendapat yang hampir sama menyatakan bahwa kurikulum adalah materi atau isi pelajaran. Hamalik, misalnya berpendapat bahwa kurikulum adalah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata pelajaran (subject matter) dipandang sebagai pengalaman orang tua atau orang-orang pandai masa lalu yang telah disusun secara sistematis dan logis.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Dr. Bambang Surendro, MT, M.Ag. (Ketua PDM Kab. Magelang Periode 2010-2015), *Pidato Pembukaan pada Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang*, di SMA Muhammadiyah Muntilan, pada Ahad, 27 Januari 2013.

¹⁰⁷ Dr. H. Nana Sudjana, *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2005), Hlm. 3,4,5,7,17

¹⁰⁸ Prof. Dr. H. Muhaimin, MA, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 3.

¹⁰⁹ Bachtiar S. backhri, *Implementasi Pengembanagan Content...*, hlm. 2

Dengan demikian, defnisi ini memberikan batasan bahwa kurikulum hanya terbatas pada rencana, materi (isi) pembelajaran. Hanya saja, kurikulum sebagai serangkaian bahan pembelajaran, tentu bukan merupakan suatu objek yang berdiri sendiri. Tetapi kurikulum memiliki keterkaitan dengan komponen lain, yakni komponen kurikulum lain seperti tujuan, metode, dan evaluasi. Menurut Mulyani Sumantri, kurikulum merupakan sebuah system yang saling terkait antara satu komponen dengan komponen lainnya.¹¹⁰

Sementara pendapat lain, misalnya menurut UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 19, yang dimaksudkan dengan kurikulum adalah:

“Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.¹¹¹

Ahli yang lain, Larry Wincoff, berpendapat bahwa kurikulum didefinisikan sebagai berikut:

“The Curriculum is generally defined as a plan developed to facilitate the teaching / learning process under the direction and guidance of a school, college or university and its staff member. Curriculum includes all of the planned activities and events which take place under the auspices of an educational institution both formal and informal.”¹¹²

Sehingga dari defnisi di atas, kurikulum memiliki pengertian yang luas, tidak terbatas pada materi pelajaran. Tetapi mencakup segala aktivitas baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan proses pendidikan yang dilaksanakan dalam sebuah lembaga pendidikan. Dengan demikian kurikulum mencakup materi, perencanaan, metode, aktivitas, guru, sekolah, dan lingkungan.

Hal ini selaras dengan pendapat ahli sosiologi pendidikan, yang melihat kurikulum lebih dari sekedar *text-book*, lebih daripada *subject-matter*, lebih dari rangkaian pelajaran, bahkan lebih daripada sekedar pelajaran kursus.¹¹³ Hal ini juga ditegaskan oleh Brown, yang menyatakan bahwa kurikulum merupakan situasi kelompok yang tersedia bagi guru dan pengurus sekolah (admisitrator) untuk membuat tingkah laku yang berubah dalam arus yang tidak terputus-putusnya dari anak-anak dan pemuda yang melalui pintu sekolah.¹¹⁴ Sehingga, kurikulum berarti situasi dan kondisi yang ada dalam proses belajar untuk mengubah sikap anak. Dengan demikian, bahwa situasi diarahkan atau diciptakan untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sehingga yang tercakup dalam kurikulum adalah subjek-matter, metode, organisasi sekolah, organisasi kelas, serta pengukuran proses belajar.¹¹⁵

¹¹⁰Bachtiar S. backhri, *Implementasi Pengembangan Content...*, hlm. 3.

¹¹¹Mashur Muslich, *Seri Standar Nasional Pendidikan Ktsp (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan): Dasar Pemahaman Dan Pengembangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 1.

¹¹² Terjemahannya: Secara umum kurikulum didefinisikan sebagai sebuah rencana yang dibangun untuk memfasilitasi proses pengajaran dan pembelajaran dibawah arahan dan bimbingan sekolah, kolej atau universitas, dan anggota stafnya. Yang termasuk dalam kategori kurikulum adalah segala aktivitas yang direncanakan dan kegiatan yang berlangsung dibawah pengasawan institusi pendidikan baik formal atau informal. Dr. H. Larry Wincoff, *Curriculum Development And Instructional Planning*, (Tt:Ttp, 1988), Hlm. 1.

¹¹³Dr. Muhammad Zainur Raziqin, MM, *Moral Pendidikan di Era Global: Pergeseran Pola Interaksi Guru-Murid di Era Global*, (Malang: Averroes Press, 2007), hlm. 45.

¹¹⁴Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 7.

¹¹⁵Dr. Muhammad Zainur Raziqin, MM, *Moral Pendidikan...*, hlm. 45

2) Hukum Islam

Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut istilah hukum Islam. Diantara istilah-istilah yang populer adalah al-hukm al-Islami, fiqh, syariah, ahkamul furu', Istilah hukum Islam, pada awalnya kurang populer. Seiring dengan perkembangan dan pertautan dengan undang-undang modern, istilah tersebut semakin menampakan popularitasnya. Walaupun demikian secara teknis, istilah tersebut sudah dikenal dan sering dipergunakan dalam pengkajian-pengkajian fiqh oleh para ulama dahulu. Penggunaan istilah *ahkamul khamsah* (hukum yang lima: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram), sebagai missal, memperlihatkan istilah ini telah menjadi bagian dari fiqh itu sendiri. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah (1) Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di satu masyarakat (negara); (2) undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan). Hukum¹¹⁶ menurut Ulama Ushul fiqh:

الْحُكْمُ هُوَ خِطَابُ اللَّهِ الْمُنْعَلَقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ إِقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

“Hukum adalah khithab (titah atau doktrin) Allah yang berhubungan dengan tindakan orang-orang dewasa (mukallaf), apakah itu dalam bentuk tuntutan (iqtidla’) atau kebebasan memilih untuk bertindak (tahyir) atau dalam bentuk ketetapan (taqrir, wadha’).

Sementara itu, istilah lain untuk menyebut hukum Islam adalah fiqh, atau *al-fiqh al-islami*. Secara bahasa, fiqh berarti faham, pengertian, atau pengetahuan. Dalam banyak tempat, al-Qura’n menggunakan kata fiqh dalam pengertian umum, yaitu “pemahaman”. Ekspresi al-Qur’an *Liyatafaqqahu fi al-din* (untuk memahami masalah agama, QS [9]: 122) memperlihatkan bahwa pada masa nabi saw istilah fiqh belum digunakan untuk pengertian hukum khusus, tetapi punya pengertian luas yang mencakup semua dimensi agama, seperti teologi, politik, ekonomi dan hukum. Fiqh dipahami sebagai ilmu tentang agama yang akan mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan. Pengertian ini berbeda dengan pemahaman orang-orang sebelum Islam yang mengartikan fiqh sebagai pemahaman ilmu agama sebagaimana dapat dipahami dari ayat-ayat al-qur’an. Dengan kata lain, seorang akan dikatakan faqih (ahli hukum) pada masa sebelum Islam (jahiliyah), apabila ia mempunyai ilmu yang luas. Pada masa-masa awal dari perkembangan Islam, istilah fiqh dipergunakan dalam pengertian ilmu tentang agama. Kemudian istilah itu berubah menjadi pengertian teknis dan spesifik.¹¹⁷

¹¹⁶Hukum-hukum fiqh ditinjau dari pengambilannya terdiri dari empat macam, yaitu: (1) Hukum yang diambil dari nas yang tegas, yakin adanya dan yakin pula maksudnya menunjukan kepada hukum itu; (2) Hukum yang diambil dari nas yang tidak yakin maksudnya terhadap hukum-hukum itu; (3) Hukum yang tidak ada nas, baik secara qat’i (pasti) maupun secara zanni (dugaan), tetapi pada suatu masa telah sepakat (ijma’) mujtahidin atas hukum-hukumnya; dan (4) Hukum yang tidak dari nas, baik qat’i ataupun zanni, dan tidak pula ada kesepakatan mujtahidin atas hukum itu.

¹¹⁷Pada periode-periode awal kita menjumpai beberapa istilah seperti fiqh, ilm, iman, tauhid, dan hikmah yang sama-sama digunakan dalam pengertian umum (makna meluas), tetapi kemudian berkembang dan menjadi lebih sempit (makna menyempit) dan spesifik. Beberapa alasan dapat dikemukakan di sini. Masyarakat Islam selama hidup Nabi saw belum begitu beragam dan kompleks sebagaimana terjadi kemudian. Persoalan-persoalan yang muncul seperti hubungan muslim dengan non-muslim dan beberapa implikasi akibat perluasan wilayah Islam, munculnya mazhab-mazhab fiqh dan sekte-sekte teologis, dan perkembangan dinamika pemikiran keagamaan merupakan factor utama yang menyebabkan perubahan beberapa peristilahan yang semula dipahami secara sangat sederhana itu. Pelacakan tentang peristilahan-peristilahan itu sangat urgen, namun dalam tulisan ini kita hanya akan melacak terminology fiqh – sebagaimana yang menjadi concern kajian kita kali ini. Perlu dicatat di sini bahwa pada masa-masa awal Islam, terminology ilm dan fiqh sama-sama digunakan untuk suatu pemahaman tentang Islam secara global. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi saw pada suatu ketika mendoakan Ibn Abbas, “Allahumma faqihhu fi ad-din” (ya Allah, berilah dia pemahaman tentang agama). Dari sini tampak sekali bahwa nabi saw tidak menegaskan suatu pengertian eksklusif tentang hukum, melainkan lebih sebagai suatu pemahaman yang mendalam tentang agama secara umum.

Sementara fiqh dalam tradisi ahli hukum Islam sama dengan istilah ilmu al-syari'ah (ilmu Syariah), yaitu pengetahuan tentang syari'ah; pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf secara terinci berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah dengan cara Istinbath al-ahkam. Secara istilah didefinisikan sebagai berikut: "*Hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan syariah yaitu hukum-hukum yang penggaliannya memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman, atau pengetahuan dan ijtihad*". Dengan demikian, makna fiqh telah menjadi suatu nama ilmu yang mempunyai makna tertentu atau istilah khusus di kalangan ahli hukum Islam, suatu pengetahuan hukum Islam yang sistematis.

Dan istilah lain, yang juga populer untuk menyebut hukum Islam adalah syari'ah. Secara bahasa, kata syariah dalam bahasa Arab berarti "tempat air minum yang selalu menjadi tempat tujuan baik manusia maupun binatang". Syariah dalam pengertian ini kemudian berubah menjadi sumber air kehidupan yang dapat menjamin kehidupan manusia, baik di dunia dan akhirat. Syariah dalam literature hukum Islam mempunyai tiga pengertian. Pertama, syariah dalam arti sumber hukum Islam yang tidak dapat berubah sepanjang masa yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Kedua, sumber hukum Islam baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah, yaitu meliputi al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan ijtihad. Ketiga, syariah dalam pengertian hukum-hukum yang digali berdasarkan istinbath dari al-qur'an dan Sunnah; hukum sebagaimana yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat, ijtihad para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan dengan metode qiyas dan metode-metode lainnya.

Yang terakhir, istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam adalah ahkam al-furu', yaitu hukum-hukum cabang. Karena pada umumnya kajian-kajian fiqhiah lebih banyak berorientasi pada persoalan-persoalan yang bersifat praktis dan belum ada kejelasan hukum final baik dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Istilah ahkam al-furu' digunakan untuk membedakan dengan usul (al-usul), yaitu persoalan-persoalan agama yang fundamental, mendasar, dan alur rincianya telah ditetapkan oleh al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dengan demikian, persoalan-persoalan usul adalah persoalan yang bersifat pokok dan tidak dapat diganggu gugat, karena ketentuannya sudah pasti. Sementara persoalan-persoalan furu' masih memungkinkan untuk digugat dan diuji kembali, seiring perkembangan dan tuntutan zaman, karena pijakannya tidak pasti dan problematic. Sehingga dengan demikian persoalan furu' akan senantiasa berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Penelitian yang cermat tentang masalah ini juga mengungkapkan bahwa terminologi fiqh juga mencakup pengertian asketis dalam pengungkapan tasawuf. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat permulaan dari organisasi sufi yang ditandai oleh berbagai aktivitas dari organisasi informal untuk membicarakan masalah-masalah agama dan melakukan latihan-latihan spiritual. Selama dua abad pertama, tasawuf tetap merupakan fenomena individual yang spontan, tetapi dengan berkembangnya disiplin formal hukum Islam dan teologi, dan sejalan dengan itu, pemunculan gradual kelas utama, maka dengan cepat ia berkembang menjadi suatu lembaga dengan daya tarik massa yang besar. Prof Ahmad Hasan dalam bukunya *The early Development of Islamic Jurisprudence*, mengatakan bahwa terminologi kalam (teologi) dan fiqh belum dipahami sebagai suatu kajian yang berspektrum khusus hingga masa pemerintahan al-Makmun (w. th 218 H). masalah ini dapat ditelusuri sampai pada abad ke-2 Hijriah dimana terminologi fiqh masih mencakup persoalan-persoalan teologi, akhlak dan hukum. Sebuah buku yang terkenal al-Fiqh al-Akbar yang disabdakan kepada Imam Abu Hanifah (w. th 150H) adalah bukti sejarah nyata dimana Abu Hanifah memasukan masalah-masalah aqidah, hukum dan akhlak sebagai bagian yang dicakup oleh terminology fiqh. Buku ini pun ditulis sebagai jawaban terhadap kepercayaan ahl al-Qadar tentang prinsip-prinsip dasar Islam, seperti aqidah, keesaan Allah, kehidupan akhirat, kenabian dan sebagainya. Masalah-masalah ini sebenarnya berkaitan dengan ilmu kalam dan tidak dengan ilmu hukum. Karena itulah, Abu Hanifah menamakan bukunya dengan al-fqh al-Akbar, yang berarti bahwa fiqh juga mencakup masalah-masalah teologis sebagaimana juga hukum.

2. Majelis Dikdasmen Dan Kebijakan Kurikulum Pendidikan

1) Sejarah Singkat

Dikdasmen adalah singkatan dari Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pembantu pembantu Pimpinan Pusat yang membidangi aktivitas bidang pendidikan dasar dan menengah. Sebelumnya, Majelis ini bernama Majelis Pengajaran dan selanjutnya disempurnakan menjadi Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan disingkat MPPK. Ia lahir sejak periode KH. Ahmad Dahlan yang waktu itu bernama urusan sekolahan "Qismul Arqo," yang di dalamnya terdapat jenis dan jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah sampai Aliyah, yang kemudian menjadi Madrasah Mu'allimin/ Mu'alimat Muhammadiyah.¹¹⁸

2) Kebijakan Kurikulum Pendidikan

Kebijakan kurikulum pendidikan sekolah Muhammadiyah adalah terletak pada pundak majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah, termasuk kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) atau sering juga disebut sebagai ISMUBA (al-Islam, kemuhammadiyah, dan Bahasa Arab). Hanya saja tugas dan wewenang tersebut, tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Hal ini, karena seiring perkembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah, Majelis Pengajaran mengelola, tidak saja sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas, tetapi juga Perguruan Tinggi.¹¹⁹ Majelis ini, di samping memikirkan kemajuan sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen serta kurikulum dan silabusnya, juga memikirkan generasi kader yang alim dan intelek, serta intelek yang alim, kader pemimpin bangsa yang andal dan cakap penuh iman dan takwa, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa dan bangsa.¹²⁰

Secara historis, selama seperempat abad, dari tahun 1912 sampai dengan tahun 1936, Muhammadiyah tidak mempunyai rumusan tertulis tentang apa itu cita-cita Pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan dijalankan berdasarkan pandangan dan pemikiran KH.A. Dahlan tentang profil hasil didikan yakni ulama yang intelek dan intelek yang ulama.¹²¹ Dengan demikian, pada seperempat abad kebijakan termasuk kurikulum pendidikan yang dijalankan disekolah-sekolah Muhammadiyah sepenuhnya didasarkan pada pemikiran dan pandangan KH Dahlan. Sehingga fungsi majelis Dikdasmen belum kelihatan atau tidak nampak.

Pada seperempat abad kemudian, Muhammadiyah baru dapat merumuskan cita-cita pendidikannya secara tertulis. Hal ini terjadi pada Kongres Seperempat Abad Muhammadiyah, pada tahun 1936 yang berlangsung di Betawi. Rumusan ini kemudian terkenal dengan nama Rumusan Betawi. Secara utuh, rumusan Betawi tersebut adalah sebagai berikut.

¹¹⁸M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada dan Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah, 2005), hlm. 84

¹¹⁹ Pada sekitar tahun 1955-an, Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dipecah menjadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Majelis Pendidikan Tinggi. Dengan dipecahnya menjadi majelis tersebut, berarti ada tiga institusi penyelenggara pendidikan dalam Muhammadiyah, yakni Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Tinggi dan Aisyiyah Bidang Pendidikan. M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm. 84.

¹²⁰M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm. 84

¹²¹M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm. 85

- a. Riwayat Kolonial Onderwijs Politik memberi peringatan yang terang dengan kuatnya, bahwa perbuatannya tidak memberi keputusannya dan kegembiraan bagi rakyat Indonesia.
- b. Mulai pertama bekerja Kolonial Onderwijs itu tidak lain dan tidak bukan akan mencari sebanyak orang-orang yang cakap membaca dan menulis untuk menjadi pegawai sebagai kaum buruh.
- c. Pada waktu malaese ini semakin nyatalah: pendapat kami seperti tersebut di atas.
- d. Muhammadiyah ini dibangun oleh umat Islam, bertempat di Indonesia untuk kepentingan makhluk Tuhan, ia mengetahui, ia melihat, yakin dan rakyat Indonesia pada umumnya tidak mengerti seluk-beluk acara Islam; rakyat Indonesia jatuh ke dalam kemiskinan, meskipun Indonesia sendiri yang dapat menghasilkan rezeki
- e. Rakyat Indonesia tidak mengerti kesehatan menjaga diri supaya jangan dihindangi penyakit, demikianlah menyebabkan tidak bernafsu dan bangun bergiat mencari sesuap nasi.
- f. Dengan sebab itu semua maka merasai wajiblah Muhammadiyah mengembalikan, membangunkan, dan mengobar-ngobarkan semangat akan datangnya perbaikan kemuliaannya, dengan jalan perlahan-lahan tetapi tentu dapatnya, maka buat eerste periode Muhammadiyah membangun perguruan-perguruan itu dengan berdasarkan atas tiga tingkatan, yakni: (1) Menggiring anak-anak Indonesia menjadi orang Islam yang berkobar-kobar semangatnya; (2) Badannya sehat tegap bekerja; (3) Hidup tangannya mencari rezeki sendiri, sehingga kesemuanya memberi faedah yang besar dan berharga hingga bagi badannya dan hidup bersama.¹²²

Kemudian, setelah berjalan 19 tahun, tepatnya pada tahun 1954, Muhammadiyah menetapkan tujuan pendidikan Muhammadiyah, di Konferensi Pengajaran Muhammadiyah di Bandung.¹²³ Konferensi ini merumuskan tujuan pendidikan Muhammadiyah yang baru. Namun, karena rumusan itu baru berskala keputusan lokal Bandung, maka dibawa selanjutnya ke dalam konferensi yang berskala nasional, yakni dalam Sidang Tanwir. Sidang Tanwir tersebut berlangsung pada tahun 1955, di Pekajangan Pekalongan. Hasil rumusan Sidang Tanwir Pekajangan ini berbunyi: Tujuan Pendidikan Muhammadiyah ialah membentuk manusia Muslim, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat. "Rumusan ini secara populer dikenal dengan nama Rumusan Pekajangan."¹²⁴

Pada masa periode KH. Ahmad Badawi, PP Muhammadiyah memberikan ketentuan dan program kepada majelis sebagai berikut: (1) Mengkoordinasi rencana pengembangan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah Muhammadiyah; (2) Meningkatkan kualitas guru-guru agama dan mengusahakan perbaikannya; (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas sekolah menengah guns acamma; (4) Menggiatkan dan memperkokoh pendirian-pendirian sekolah yang menghasilkan kader (Pemimpin) Muhammadiyah tingkat tinggi: dan menengah; (5) Perhubungan guru-guru Muhammadiyah tinggi dan menengah; (6) Mengusahakan berdirinya asrama-asrama pelajar dibawah pimpinan Muhammadiyah; dan (7) Menggiatkan

¹²²M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm.86

¹²³Konferensi ini berlangsung di samping untuk kebutuhan menampung aspirasi dan perkembangan pendidikan Muhammadiyah yang semakin lama semakin marak juga atas usul dari Soekarno, yang serngaja menulis sebuah artikel dalam surat kabar ADIL, nomor 9. tahun X, 1941 yang berjudul Adakanlah Satu Onderwijs Congres Muhammadiyah yang Spesial.M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm 86

¹²⁴M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm. 86

usaha pemberantasan buta huruf dalam lingkungan Muhammadiyah dimulai dengan kekeluargaan sendiri.¹²⁵

Pada periode KH. AR. Fachruddin, sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dipegang H.R. S. Prodjokusumo, Majelis melaksanakan program sebagai berikut: (1) Menanamkan kesadaran akan pentingnya bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan sebagai rangkaian usaha untuk mencapai tujuan Persyarikatan serta menggerakkan kegiatan anggota-anggota untuk beramal di bidang itu; (2) Memimpin dan membantu usaha cabang-cabang dalam usahanya dibidang pendidikan, pengajaran, dan. Kebudayaan; (3) Membantu dan mengkoordinasikan kegiatan anggota dan masyarakat serta organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan sesuai dengan maksud dan tujuan persyarikatan; (4) Mengusahakan bantuan dan fasilitas pada pemerintah dan badan-badan lain yang halal dan baik; (5) Mengadakan pendidikan untuk: (a) membentuk tenaga pendidikan dan pengajaran yang berjiwa Muhammadiyah; (b) mempertebal keyakinan umat beragama dan kesadaran ke-Muhammadiyah-an kepada tenaga pendidikan dan pengajar; (6) Mengusahakan alat dan kelengkapan pengajaran dan pendidikan, serta administrasi sekolah dan madrasah; (7) Membuka dan menyelenggarakan sekolah/madrasah, asrama, dan sebagainya di tempat yang strategis, dimana cabang-cabang yang bersangkutan menyelenggarakan sendiri; (8) Mengurus dan menyelenggarakan sekolah-sekolah percontohan atau teladan; dan (9) Menyelenggarakan dan memimpin musyawarah kerja Majelis Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada.¹²⁶

Pada tanggal 13-15 Agustus 1996 berlangsung Rapat Kerja Nasional Pendidikan Muhammadiyah di Jakarta. Rapat Kerja Nasional ini berlangsung dengan diikuti oleh tiga lembaga penyelenggara pendidikan dalam Muhammadiyah. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Majelis Pendidikan Tinggi dan Aisyiyah. Rakernas ini merumuskan kembali tujuan pendidikan Muhammadiyah, sebagai berikut :

Membentuk manusia Muslim yang beriman, bertakwa, cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan beramal menuju menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diradhai Allah SWT.¹²⁷

Tujuan ini kemudian dioperasionalisasikan oleh Majelis Dikdasmen dengan menuangkannya dalam Lima Kualitas Out-put pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah, yakni: Kualitas Keislaman, Kualitas Keindonesiaan, Kualitas Keilmuan, Kualitas Kebahasaan, dan Kualitas Keterampilan.

Secara berturut-turut Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah diamanatkan kepada Drs. Sutrisno Muchdam, Drs. Haiban. H.S. dan Prof. Dr. H.M. Yunan Yusuf. Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. H.M. Yunan Yusuf yang berlangsung dua periode, yakni 1995-2000 dan 2000-2005, Majelis Dikdasmen merumuskan kebijaksanaan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan menengah dan melaksanakan

¹²⁵M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm.86.

¹²⁶M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm.87

¹²⁷M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm.87

program-program yang dikenal dengan nama Lima Langkah Dikdasmen.¹²⁸Lima Langkah Dikdasmen meliputi:

- 1) Dikdasmendalam Angka dengan melakukan pendataan ulang sekolah/madrasah/pesantren Muhammadiyah yang memuat spesifikasi tiap wilayah/ daerah agar didapatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itu majelis menyiapkan system pelaporan yang secara terus-menerus menghasilkan data sekolah yang akurat guna penyusunan Peta Nasional Pendidikan Muhammadiyah.
- 2) Pengembangan kurikulum melalui penataan ulang Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyah-an, dan Bahasa Arab sebagai kekhasan sekolah/madrasah/pesantren Muhammadiyah.
- 3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Insani terutama tenaga guru dan kepala sekolah, melalui pelatihan-pelatihan bidang-bidang serta Pendidikan Khusus Kepala Sekolah yang disingkat dengan DIK-SUSPALA.
- 4) Pengembangan Suasana Al-Islam dan ke-Muhammadiyah-an di lingkungan sekolah / madrasah / pesantren Muhammadiyah sebagai wahana bagi terwujudnya visi dan misi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Gerakan Dakwah, dan Gerakan Tajdid.
- 5) Pengembangan Dana dengan melakukan kiat-kiat penggalan dana mandiri di lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.¹²⁹

Dalam pengembangan dana tersebut Majelis Dikdasmen melakukan upaya penggalan dana yang terkenal dengan nama Lima Kiat Penggalan Dana Mandiri. Lima kiat tersebut adalah: (1) Optimalisasi Uang Infaq Siswa dan Uang Infaq Guru; (2) Jasa Percetakan Melalui Satu Pintu; (3) Pendayagunaan Unit Produksi SMK dan BUMM; dan (4) Konsorsium Sekolah/Madrasah/ Pesantren Muhammadiyah dan Pembelian Saham.¹³⁰

3) Kritik dan Respon

Majelis Dikdasmen memainkan peran yang sangat strategis dalam upaya pengembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sebab ia berfungsi sebagai penyelenggara dan pengayom pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Namun sayang, menurut Muhammad Ali, fungsi tersebut belum diperankan secara baik sehingga terkesan sekolah Muhammadiyah berjalan sendiri. Menurut Istilah Prof dr. Zamroni, “kehidupan sekolah Muhammadiyah itu laksana anak ayam yang kehilangan induk, atau tidak diurus oleh induknya (Majelis Dikdasmen)”.¹³¹

Fenomena ini jelas tidak produktif dalam usaha pengembangan pendidikan Muhammadiyah. Jika ilustrasi ‘anak ayam’ yang dikemukakan oleh prof zamroni, ditarik dalam realitas empirik, akan terlihat luar biasa. Muhammad Ali memberikan ilustrasi bahwa bayilahir tumbuh-kembang sendiri tanpa pengasuhan dari ibunya, dan tidak memperkenankan orang lain mengasuhnya. Yang terjadi kemungkinan besar adalah bayi itu akan mati dengan sendirinya, atau kalau bisa hidupun hanya hidup-hidupan, dan kemungkin terkecil karena kesaktianya bisa tumbuh-kembang sendiri secara optimal menjadi manusia kuat. Oleh karena itu, menurut Muhammad Ali, majelis Dikdasmen haruslah direformasi dan ditata ulang.

¹²⁸M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm. 87

¹²⁹M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm.87

¹³⁰Hingga tahun 2004, Majelis Dikdasmen sudah berhasil menghimpun dana abadi sebesar 1,6 miliar rupiah.M. Yunan Yusuf, et al, *Ensiklopedi...*, hlm.87.

¹³¹Muhammad Ali, *Reinvensi...*, hlm.

Karena kondisi yang demikian itu akan mengakibatkan pendidikan Muhammadiyah tidak berkembang dengan baik.¹³²

Menjawab kritik yang selama ini berkembang, Majelis Dikdasmen dengan mentor utamanya Prof. Dr Imam Robandi mengobarkan dan menyemai sekolah Muhammadiyah unggul dimana-mana. Gerakan yang dilakukan oleh Prof Imam ternyata berdampak positif bagi perkembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Indonesia. Branding sekolah unggul menjadi tema diskusi dan sekaligus gerakan bagai bola salju bagi kebangkitan sekolah Muhammadiyah kembali. Ternyata gerakan yang dilakuakn oleh Prof Imam menemukan momentumnya di Magelang. Sekolah-sekolah milik Muhammadiyah membranding diri untuk menjadi sekolah pilihan masyarakat karena keunggulan yang dimiliki sekolah tersebut. Dengan demikian gerakan Majelis Dikdasmen saat memberikan nilai positif. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Prof. Zamroni tidak lagi terjadi di Muhammadiyah.

3. Model Pengembangan dan Struktur Kurikulum di Sekolah Muhammadiyah

Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran wajib di sekolah Muhammadiyah. Sehingga, Pendidikan Agama Islam (PAI), di seluruh perguruan Muhammadiyah diajarkan dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi Muhammadiyah. Berdasarkan Qoidah DIKDASMEN Bab IX pasal 33 bahwa untuk perguruan Muhammadiyah tingkat dasar dan menengah, menggunakan nomenklatur al-Islam, kemuhammadiyahahan, dan bahasa Arab (ISMUBA); sementara untuk perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) dengan merujuk kepada Qoidah PTM Bab VI pasal 27, menggunakan nomenklatur al-Islam dan kemuhammadiyahahan (AIK). Muatan materi inilah yang sekaligus membedakan pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan Muhammadiyah dengan perguruan pada umumnya. Di samping itu, perbedaan yang lain adalah terletak pada kesejarahan dan ideology yang menjadi spirit penyelenggaraan materi ISMUBA/AIK.¹³³

Secara historis, gagasan pendidikan Kemuhammadiyahahan konon berasal dari gagasan A.Mukti Ali yang disampaikan kepada PP. Muhammadiyah menjelang peringatan setengah abad dan Mukhtar Muhammadiyah yang ke-34 di Jakarta tanggal 18-22 Nopember 1962. Pada saat menurut Khozin, bahwa A. Mukti Ali menyinggung cita-cita Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dalam Islam untuk dapat terus berkembang dan berkesinambungan. Peringatan setengah abad Muhammadiyah pada saat itu, di tengah situasi dan suasana Negara berkecamuknya ideology NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang mana masing-masing kekuatan saling tarik menarik dan adu kekuatan untuk mengembangkan sayap dan pengaruhnya.¹³⁴

Dari latar belakang yang sarat dengan pergumulan politik-ideologis tersebut, sehingga dapat dimengerti kalau kemudian, bahwa pendidikan Kemuhammadiyahahan dalam pelaksanaannya lebih berorientasi pada nilai idelogis-politis pula. Dan pendekatan pengajaran kemuhammadiyahahan juga cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat indoktrinatif dan kurang memperhatikan aspek-aspek edukatif-pedagogis.¹³⁵

¹³²Muhammad Ali, *Reinvensi...*, hlm

¹³³Khozin, *Menggugat ...*, hlm. 143.

¹³⁴Khozin, *Menggugat ...*, hlm. 148.

¹³⁵Khozin, *Menggugat ...*, hlm. 148-149

Menurut Prof Muhaimin, bahwa dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, paling tidak ada tiga paradigma yang berkembang selama ini, yaitu paradigma dikotomis, paradigma mechanism, dan paradigma organism (Sistemik).

1. Paradigma Dikotomis

Dalam paradigma ini, segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan, ada dan tidak ada, dunia dan akhirat, hitam dan putih, Jasmani dan rohani, pendidikan keagamaan dan non keagamaan (pendidikan agama dan pendidikan umum). Dengan pandangan semacam ini, maka pendidikan keagamaan dihadapkan dengan pendidikan non-keagamaan, pendidikan keislaman dengan non-keislaman, pendidikan agama dengan pendidikan umum.¹³⁶ Sehingga, pendidikan agama diletakkan berhadapan dengan pendidikan umum. Dengan demikian juga, dalam konteks pendidikan agama itu sendiri, masing-masing Mapel juga diletakkan berhadapan. Masing-masing berkompetisi dengan yang lain, tidak saling mengisi dan mempengaruhi.

Pendidikan agama Islam seolah-olah hanya mengurus persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, seni-budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan non agama. Pandangan dikotomis inilah yang menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan. Ilmu pendidikan agama dan ilmu pendidikan umum, atau ilmu agama dan ilmu umum sebenarnya lahir dan muncul dari paradigma dikotomis tersebut.¹³⁷ Menurut Prof Muhaimin, Islam sesungguhnya tidak pernah membedakan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum (keduniaan), dan tidak berpandangan dikotomis mengenai ilmu pengetahuan. Namun dalam realitas sejarah, bahkan hingga kini justru supremasi lebih diberikan pada ilmu-ilmu agama (al-‘ulum al-diniyyah) sebagai jalan tol untuk menuju Tuhan.¹³⁸ Pada abad pertengahan misalnya, lembaga pendidikan Islam (madrasah atau al-jami’ah) tidak pernah menjadi universitas yang difungsikan semata-mata untuk mengembangkan tradisi penyelidikan bebas berdasarkan nalar. Ia banyak diabdikan kepada *al-‘ulum al-diniyyah* (ilmu-ilmu agama) dengan penekanan pada fiqh, tafsir, dan hadis. Sementara ilmu-ilmu non-agama, terutama ilmu-ilmu alam, dan eksakta sebagai akar pengembangan sains dan teknologi, sejak awal perkembangan madrasah dan al-jami’ah sudah berada dalam posisi marginal.¹³⁹

2. Paradigma Mechanism

Secara etimologi mechanism bernakna hal kerja mesin, cara kerja suatu organisasi, atau hal saling bekerja seperti mesin yang masing masing bergerak sesuai dengan fungsinya.¹⁴⁰ Paradigma mechanism memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya, bagaikan mesin yang terdiri atas beberapa

¹³⁶ Prof. Dr. Muhaimin, MA, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada [rajawali Pers], 2005), hlm 31.

¹³⁷ Prof. Dr. Muhaimin, MA, *Pengembangan Kurikulum...*, hlm 32.

¹³⁸ Prof. Dr. Muhaimin, MA, *Pengembangan Kurikulum...*, hlm 33.

¹³⁹ Prof. Dr. Muhaimin, MA, *Pengembangan Kurikulum...*, hlm.33.

¹⁴⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

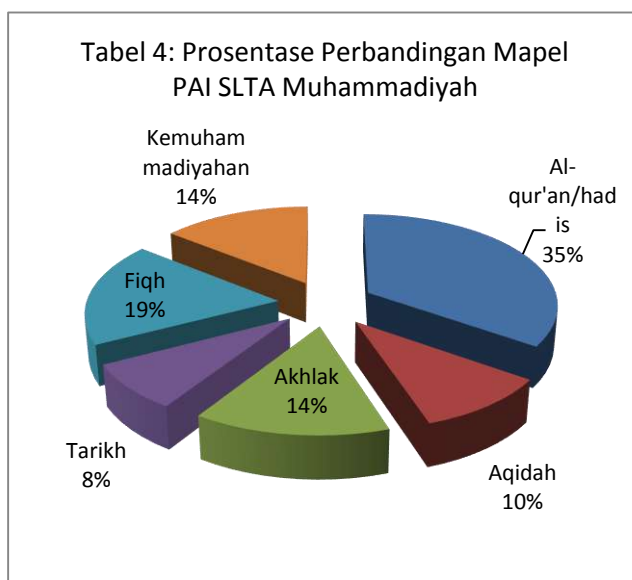
komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu dengan yang lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak.¹⁴¹

Dalam paradigma ini, mapel agama merupakan satu aspek dari aspek dari nilai-nilai lainnya. Hubungan antar nilai agama dengan nilai-nilai lainnya kadang-kadang bersifat horizontal-lateral (independent), atau bersifat lateral-sekuensial, tetapi tidak sampai kepada vertikal linier. Relasi horizontal-lateral mengandung arti bahwa beberapa mata pelajaran yang ada dan pendidikan agama mempunyai hubungan sederajat yang independent, dan tidak saling berkonsultasi. Relasi yang bersifat lateral-sekuensial, berarti di antara masing-masing mata pelajaran (mata kuliah) tersebut mempunyai relasi sederajat yang saling berkonsultasi. Sedangkan relasi vertikal-linier berarti mendudukan pendidikan agama sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi, sementara seperangkat mata pelajaran yang lain adalah termasuk pengembangan nilai-nilai insani yang mempunyai relasi vertikal-linier dengan agama.¹⁴²

Menurut pengamatan Prof Muhaimin, selama ini di sekolah-sekolah masih ada proses sekularisasi ilmu, yakni pemisahan antara ilmu agama dan pengetahuan umum. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan seolah-olah hanya merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan agama, sementara mata pelajaran yang lain mengajarkan bidang ilmunya seolah-olah tidak ada hubungannya dengan masalah nilai keimanan dan ketakwaan.¹⁴³

3. Paradigma Organism (sistemik)

Pada awalnya istilah organism merupakan istilah ilmu biologi, yang berarti susunan yang bersistem dari berbagai bagian jasad hidup untuk suatu tujuan hidup. Dalam konteks pendidikan Islam, paradigma organisme bertolak dari pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hisup bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius dan dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama.



Pandangan ini menurut Prof Muhaimin, menggarisbawahi pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari fundamental doctrines dan fundamental values yang tertuang dan terkandung dalam al-qur'an dan al-sunnah al-sahihah sebagai sumber pokok. Nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci didudukan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya didudukan sebagai nilai-nilai insani yang mempunyai hubungan vertikal-linier dengan nilai ilahi (agama). dengan upaya tersebut, menurut prof Muhamin, sistem pendidikan diharapkan dapat

mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etik, serta mampu

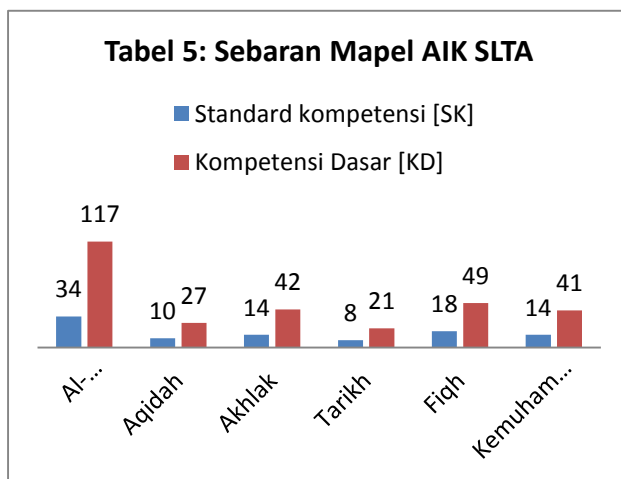
¹⁴¹Prof. Dr. Muhaimin, MA, *Pengembangan Kurikulum...*, hlm 35-36.

¹⁴²Prof. Dr. Muhaimin, MA, *Pengembangan Kurikulum...*, hlm.36

¹⁴³Prof. Dr. Muhaimin, MA, *Pengembangan Kurikulum...*, hlm 36

melahirkan manusia-manusia yang menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, memiliki kematangan profesional, dan sekaligus hidup di dalam nilai-nilai agama.¹⁴⁴

Dalam pandangan Prof Muhaimin, bahwa pendidikan agama di sekolah secara konseptual-teoritis berfungsi sebagai: (1) pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin. (2) penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; (3) penyesuaian mental peserta didik di lingkungan fisik dan sosial; (4) perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengalaman ajaran agama islam dalam kehidupan sehari-hari; (5) pencegahan dari hal-hal negatif budaya asing yang dihadapinya sehari-hari; (6) pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsionalnya; dan (7) penyaluran untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.¹⁴⁵



Dengan meminjam kerangka dari penjelasan Prof Muhaimin di atas, memperlihatkan bahwa pengembangan dan struktur kurikulum AIK/ISMUBA di perguruan Muhammadiyah masih bersifat mekanistik atau bahkan masih bersifat dikotomis. Hal ini dapat dilihat dari Struktur kurikulum AIK di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Yaitu mapel-mapel AIK berdiri sendiri, yang banyak tidak berhubungan dengan Mapel AIK yang lainnya. Sebagai contoh Mapel

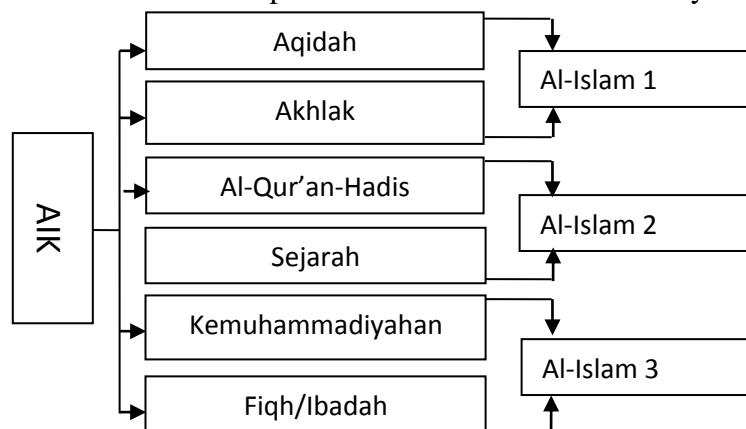
hukum Islam merupakan salah satu komponen yang menjadi bagian dari struktur (bagunan) kurikulum Al-Islam dan kemuhammadiyah (AIK) yang ada, tetapi terpisah dengan materi yang lain. Berdasarkan standar Isi dan Standar kompetensi lulusan yang dikeluarkan oleh Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah, kurikulum AIK (al-Islam dan Kemuhammadiyah) terdiri dari enam komponen pelajaran (mata pelajaran/Mapel). Keenam mapel tersebut adalah Al-qur'an hadis, Aqidah, akhlak, tarikh, Fiqh, dan Kemuhammadiyah. Berdasarkan tabel tersebut, mapel Al-qur'an dan hadis, dan fiqh merupakan mapel yang sangat dominan untuk diajarkan di SMK dan SMA Muhammadiyah. Dimana kedua mapel tersebut masing-masing menempati urutan pertama dan kedua. Dan untuk urutan berikutnya adalah akhlak, kemuhammadiyah, aqidah, dan tarikh yang masing-masing menempati urutan ketiga, empat, lima dan enam.

Berdasarkan observasi di lapangan dan juga wawancara yang dilakukan kepada guru Mapel, ditemukan bahwa enam mapel AIK yang diajarkan di sekolah, --al-qur'an-hadis, aqidah, akhlak, tarikh, fiqh, dan kemuhammadiyah--, dikelompokkan lagi ke dalam tiga subjek, yaitu al-Islam 1 untuk materi aqidah dan akhlak, al-Islam 2 untuk materi al-qur'an-hadis dan tarikh, serta al-Islam 3 untuk materi Kemuhammadiyah dan fiqh.

¹⁴⁴Prof. Dr. Muhaimin, MA, *Pengembangan Kurikulum....*, hlm.39.

¹⁴⁵Prof. Dr. Muhaimin, MA, *Pengembangan Kurikulum....*, hlm. 40

Tabel 6: Struktur Mapel Al-Islam dan Kemuhammadiyah



Sumber: diolah dari Wawancara dan Buku Modul

Berdasarkan struktur kurikulum di atas, pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah Muhammadiyah memiliki keunggulan komparative kalau dibandingkan dengan SLTA lainnya. Karena kurikulum pendidikan agama disekolah-sekolah tersebut pada umumnya hanya satu, yaitu agama Islam dan itupun hanya diajarkan dua jam selama satu minggu. Sementara di sekolah Muhammadiyah, pendidikan agama dipecah menjadi enam pelajaran yang diajarkan secara mandiri. Inilah yang diakui oleh para guru agama di sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut. Disamping itu, keunggulan lain dari kurikulum AIK adalah materi yang ada tentu lebih rinci dan detail, sehingga memudahkan anak untuk memahami al-Islam. Hal sebagaimana diungkapkan oleh Murtadho, guru SMAM Kota Magelang. Beliau berpendapat bahwa kelebihan kurikulum AIK adalah (1) Lebih rinci, kalau dibandingkan dengan kurikulum yang ada di SMU; (2) Sekolah dapat menambah sendiri materi /kurikulum yang ada sesuai dengan kebutuhan siswa; (3) Guru memiliki kewenangan untuk membuat indikator tersendiri sehingga memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan kurikulum yang ada; (4) Materi terkelompok, sehingga lebih mudah untuk dipelajari; dan (5) Membuka peluang guru untuk berkembang.¹⁴⁶

Walaupun demikian, kurikulum PAI yang ada di sekolah Muhammadiyah, bukanya tanpa kelemahan. Menurut para guru, materi yang terinci dan banyak tersebut membebani para murid dan kebanyakan mereka merasa overload terhadap materi yang ada. Konsekuensinya, anak-anak yang berlatar belakang keagamaan kurang baik dan memadai, mereka kebanyakan ketinggalan dan mengalami kesulitan untuk mengikuti pelajaran yang ada. Lebih-lebih bagi murid yang belum sama sekali mengenal al-qur'an, sehingga ini menjadi persoalan dan sekaligus tugas berat para guru yang ada.

Dari struktur kurikulum yang ada, menunjukkan bahwa materi hukum Islam merupakan bagian dari materi yang diajarkan kepada siswa. Sehingga, mapel hukum Islam (fiqh) merupakan materi wajib untuk diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, para guru sepakat bahwa materi hukum Islam adalah materi yang harus diajarkan kepada para siswa. Hal ini diamini oleh Karmadi, guru di SMK Bandongan. Beliau berpendapat bahwa materi hukum Islam menjadi komponen yang harus diajarkan paling tidak ada dua alasan utama, yaitu (1) supaya anak memahami dan mempraktekan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat; (2) Supaya anak memiliki

¹⁴⁶Wawancara dengan Murtadho, S.Pd.I, di kantor SMAM Kota Magelang, 19 Januari 2013.

kemampuan dan wawasan yang baik sewaktu ditanya oleh masyarakat tentang hukum Islam, terutama karena masyarakat melihat bahwa yang bersangkutan bersekolah di Muhammadiyah sehingga mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kemampuan anak.¹⁴⁷

Sementara itu Prayogo, guru SMK Mertoyudan, berpendapat bahwa pengajaran hukum Islam kepada siswa, paling tidak (1) Anak harus mengetahui tentang kewajiban yang harus ditunaikan terutama menyangkut dasar atau pijakan hukumnya; (2) Anak harus mengetahui tentang sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Islam; (3) Amalan praktis harus disertai pula dengan landasan hukum yang jelas. Sementara itu, Widodo dari SMK Kota Magelang beralasan bahwa dengan diajarkannya materi hukum Islam maka anak dapat (1) memahami dan mempraktekan ibadah sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah; (2) Membiasakan praktek kepada anak-anak agar terbiasa dengan kegiatan ritual yang bersifat praktis (ibadah), sehingga komitmen agama mereka tetap terjaga; dan (3) Memberikan keterampilan beragama, terutama menyangkut pengurusan jenazah, dan lainnya.

4. Isi Kurikulum Hukum Islam di Sekolah Muhammadiyah

Salah satu komponen penting dari kurikulum adalah materi (isi) yang berupa informasi, data, pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai yang hendak diwariskan, dan diajarkan kepada peserta didik. Dan pengetahuan merupakan inti dari isi kurikulum. Hanya saja diantara para ahli ada perbedaan pendapat menyangkut pemahaman tentang isi dan pengetahuan. Menurut sebagian ahli, bahwa isi dan pengetahuan adalah sama, tidak ada perbedaan. Sementara ahli yang lain berpendapat bahwa isi dan pengetahuan adalah berbeda. Isi tidak lain adalah rekaman pengetahuan berupa grafik, symbol, atau audio, sedangkan pengetahuan adalah makna dan arti sebagai konsekuensi transaksi dari pada materi.¹⁴⁸

Saylor dan Alexander menyatakan bahwa materi kurikulum meliputi fakta-fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, desain, pemecahan masalah, yang berasal dari fikiran manusia, dari pengalaman, dan hasil konstruksi fikiran yang diatur, diorganisasikan dalam bentuk gagasan, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah.¹⁴⁹ Tugas sekolah adalah menyeleksi, mengorganisasi bahan pengalaman, sehingga tujuan pendidikan tercapai. Tugas ini tidaklah mudah dan bersifat kompleks. Penelaahan tentang wujud dan struktur materi kurikulum sangat perlu sebab materi merupakan salah satu factor yang menentukan kualitas pendidikan. Untuk mencapai tujuan mengajar yang telah ditentukan diperlukan bahan ajar. Bahan ajar tersusun atas topic-topik dan sub topic tertentu. Tiap topic mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang ditetapkan. Topic atau sub topic tersebut, tersusun yang membentuk sekuens bahan ajar. Sekuens bahan ajar terdiri dari sekuens kronologis, sekuens kausal, sekuens structural, sekuens logis dan psikologis, sekuens spiral, rangkaian ke belakang, dan sekuens berdasarkan hirarki belajar.¹⁵⁰

Di sekolah Muhammadiyah, muatan (isi) kurikulum hukum Islam dari kelas X, XI, dan XII, berdasarkan standar kompetensinya berjumlah 18 materi, sedangkan untuk kompetensi dasarnya berjumlah 49. Dari 18 standar kompetensi yang kemudian dijabarkan ke dalam 49

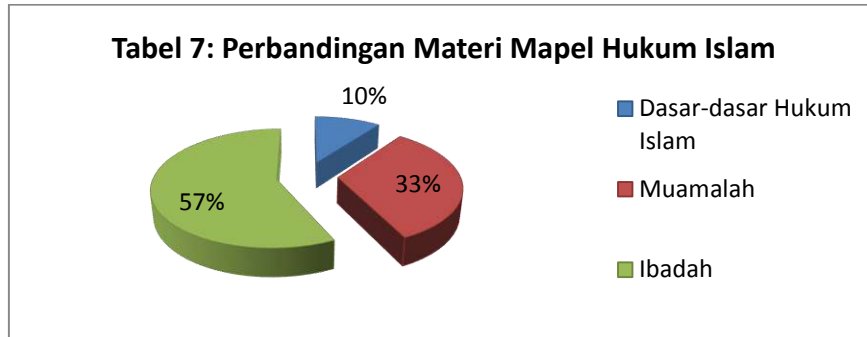
¹⁴⁷Wawancara dengan Karmadi, S.Ag, di kantor SMK Bandongan, 18 Januari 2013.

¹⁴⁸Bachtiar S. backhri, *Implementasi Pengembangan Content Curriculum dalam proses Perencanaan Pembelajaran*, dalam Jurnal Teknologi Pendidikan, (Surabaya: Fakultas Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Surabaya, 2010), Vol.10 No. 2, hlm. 5.

¹⁴⁹Bachtiar S. backhri, *Implementasi Pengembangan Content...*, hlm. 5

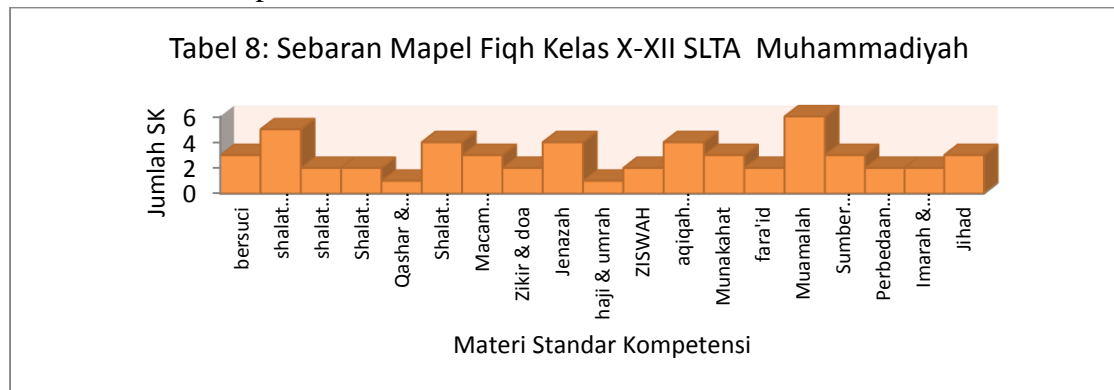
¹⁵⁰Bachtiar S. backhri, *Implementasi Pengembangan Content...*, hlm. 6.

kompetensi dasar yang ada, materi hukum Islam dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok materi, yaitu dasar-dasar hukum Islam, ibadah, dan muamalah. Dan dari ketiga materi tersebut, materi ibadah merupakan materi yang paling banyak (dominan) (57%), sementara muamalah dan dasar-dasar hukum Islam, menempati urutan kedua dan ketiga, yaitu (33%) dan (10%).



Sumber: data yang diolah

Dari ketiga komponen materi hukum Islam di atas, yaitu ibadah, muamalah, dan dasar-dasar hukum Islam, materi ibadah memuat toharah, shalat fardhu, shalat sunnah, shalat berjama'ah, qashar dan jama', shalat jum'at, zikir dan doa, jenazah, haji dan umrah, ZISWAH (Zakat, infak, shadaqah, waqaf), serta qurban dan aqiqah. Sementara materi muamalah dibedakan dalam tiga kategori, yaitu *ahkamu al-usrah* (hukum-hukum keluarga) yang meliputi *munakahat* (pernikahan) dan *faraid* (pembagian harta waris); *Ahkamul al-maliyyah* (hukum-hukum harta/kebendaan) yang meliputi muamalah khusus seperti jual beli dan lain-lain; *Ahkamul jinaiyyah wa siyasa* (hukum-hukum pidana dan politik) yang meliputi *imarah* (pemerintahan), *hudud* (hukum-hukum pidana), *jihad* (hukum-hukum peperangan). Sedangkan prinsip-prinsip hukum Islam (*usulul ahkam*) meliputi sumber hukum Islam dan masalah perbedaan dalam hukum Islam.



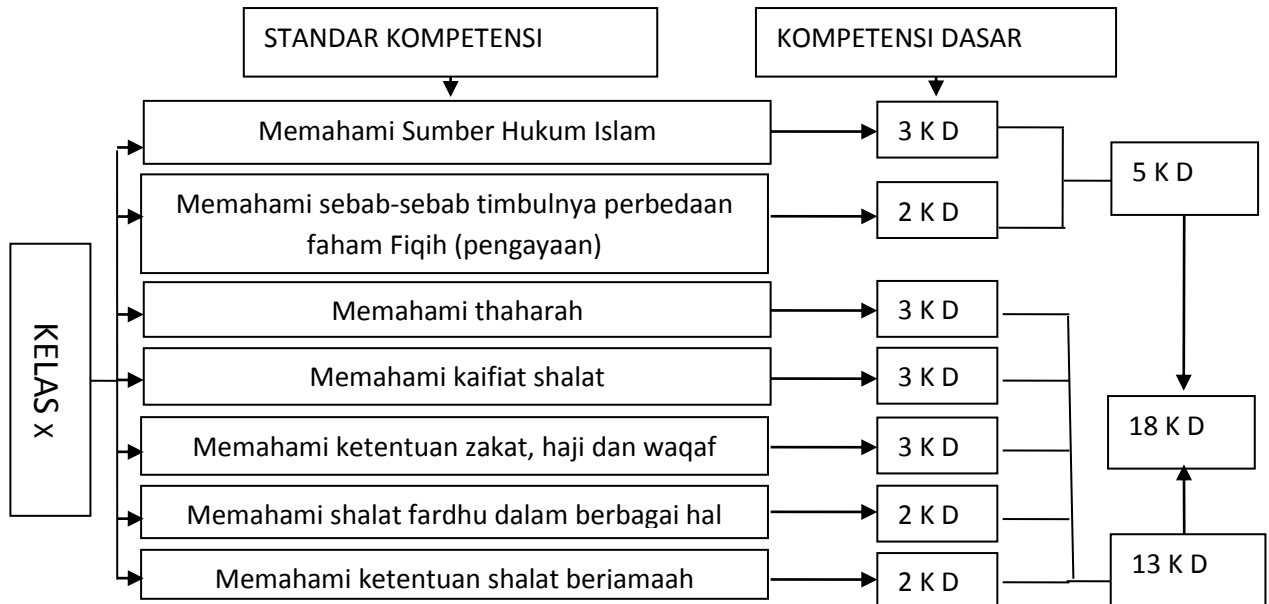
Sumber: Data diolah

1) Materi Pembelajaran Kelas X

Materi Mapel Hukum Islam untuk kelas X ada tujuh standar kompetensi yang harus ditempuh dan diselesaikan dalam pembelajaran. Ketujuh standar kompetensi itu adalah (1) taharah, (2) kaifiyat shalat, (3) shalat fardhu, (4) shalat jama'ah, (5) zakat, haji dan wakaf, serta ditambah dengan dua materi tentang (6) pemahaman sumber hukum dan (7) akar perbedaan pendapat di dalam hukum Islam. Poin 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah materi tentang ibadah mahdhoh. Hanya saja untuk materi poin 5, yaitu zakat, haji dan wakaf, walaupun itu

ibadah mahdhoh, tapi ada sentuhan nilai-nilai muamalah terutama zakat dan wakaf. Karena kedua hal itu, yaitu zakat dan wakaf berhubungan dengan charity, pemberian kepada orang lain yang membutuhkan, dan nilai kemanusiaan. Sementara poin 6 dan 7, yaitu tentang sumber hokum dan akar perbedaan dalam hokum Islam, adalah prinsip-prinsip dasar pemahaman hokum Islam.

Tabel 9: Jumlah Materi dan Standar Kompetensi Kelas X



Kalau dilihat dari standar isi dan kompetensi, bahwa muatan materi untuk kurikulum hukum Islam untuk kelas X adalah ibadah mahdhah yang bersifat praktis. Dengan demikian, standar kompetensi untuk ibadah mahdah ada lima materi, sementara standar kompetensi untuk dasar-dasar hokum Islam ada 2 materi.¹⁵¹ Ini menunjukkan bahwa materi pembelajaran untuk kelas x adalah 71% adalah ibadah mahdhah (ibadah praktis). Sedangkan pengenalan hokum yang bersifat wawasan 29 % saja, yaitu menyangkut sumber hukum, perbedaan pendapat.

Tabel 10: Standar Kompetensi & Kompetensi Dasar Kelas X

	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
KELAS X, SEMESTER 1	1. Memahami sumber hukum Islam	1) Menyebutkan pengertian kedudukan dan fungsi Al-Qur'an, Al Hadis sebagai sumber hukum Islam dan ijtihad sebagai metode penetapan hukum 2) Menjelaskan pengertian, kedudukan dan fungsi hukum taklifi dalam hukum Islam 3) Menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari
	2. Memahami thoharoh	1) Menjelaskan hadas kecil dan besar serta cara mensucikannya 2) Menjelaskan macam-macam najis dan cara

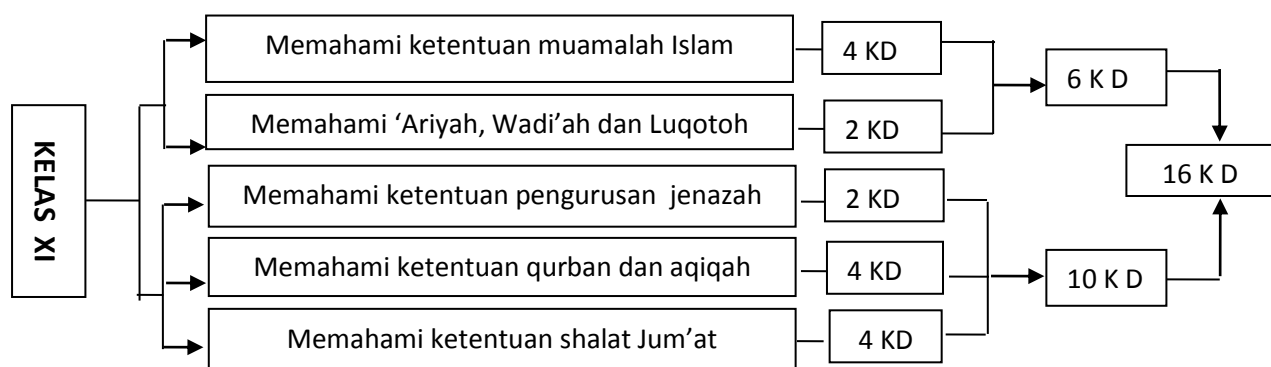
¹⁵¹Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, *Standar Isi dan Kompetensi Lulusan Pendidikan Al-Islam dan Kemuhimmadiyah*, (Jakarta: Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah, 2007), hlm.68-71.

	3. Memahami kaifiyat sholat	1) Menjelaskan kaifiyat sholat wajib dan sunnah. 2) Menjelaskan sanksi bagi yang meninggalkan sholat 3) Membiasakan sholat wajib dan kegiatan sunnah setelah sholat wajib
	4. Memahami sebab-sebab timbulnya perbedaan Faham fiqih (pengayaan)	1) Menjelaskan penyebab timbulnya perbedaan dalam fiqih (penggunaan metode dan factor social) 2) Menjelaskan hikmah perbedaan faham dalam fiqih Islam
SEMESTER 2	1. Memahami ketentuan zakat, haji dan wakaf	1) Menjelaskan undang-undang dan peraturan tentang zakat, haji dan wakaf 2) Menyebutkan contoh-contoh pengelolaan zakat, haji dan wakaf 3) Menerapkan ketentuan undang-undang dan peraturan tentang zakat dalam kepanitian
	2. Memahami shalat fardu dalam berbagai hal	1) Menjelaskan ketentuan shalat ketika safar 2) Menjelaskan ketentuan shalat khouf
	3. Memahami ketentuan shalat berjamaah	1) Menjelaskan ketentuan shalat berjamaah 2) Membiasakan shalat berjamaah

2) Materi Pembelajaran Kelas XI

Materi Mapel hukum Islam untuk kelas XI ada lima standar kompetensi yang harus ditempuh. Lima standar itu adalah (1) memahami muamalah, (2) memahami ariyah, luqathah, dan wadi'ah, (3) Memahami ketentuan pengurusan jenazah, (4) memahami qurban dan aqiqah, dan (5) memahami shalat jum'at. Materi poin 1 dan 2 (muamalah, ariyah, luqathah, dan wadi'ah) merupakan hokum yang ada kaitanya dengan dimensi hubungan dengan sesama manusia. Sementara itu, materi poin 3, 4, dan 5 (pengurusan jenazah, qurban, aqiqah, dan shalat jum'at) merupakan ibadah mahdhah. Hanya saja walaupun masalah jenazah, qurban, dan aqiqah masuk dalam kategori ibadah mahdhoh, ketiga hal tersebut masih ada hubunganya dengan *human relationsip*-nya. karena ketiga aspek ibadah itu, sangat terkait dengan bagaimana seorang mukmin memberikan pelayanan, membantu, dan berbagai dengan orang lain yang sedang dalam kesusahan, tidak punya, dan dalam kekurangan.

Table 11: Jumlah Materi dan Standar Kompetensi Kelas XI



Sehingga materi pembelajaran hukum Islam kelas xi walaupun masih sangat dominan tentang ibadah mahdhah yang bersifat ritualistic-praksis, nilai-nilai dasar muamalah masih menjadi bagian penting pembelajaran Hukum Islam. Hanya saja, kalau diperbandingkan

antara muamalah dan ibadah mahdhah masih sangat timpang, dimana ibadah mahdhoh masih dominan dibandingkan dengan muamalah. Hal ini terlihat dari komposisi muatan standar kompetensi untuk kelas XI, yaitu untuk standar kompetensi muamalah ada 2 materi dengan kompetensi dasarnya berjumlah 6, sedangkan untuk ibadah ada tiga standar kompetensi, dengan kompetensi dasarnya mencapai 10 hal. Sehingga perbandingan antara keduanya adalah 6:10.¹⁵²

Tabel 12: Standar Kompetensi & Kompetensi dasar kelas XI

	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
KELAS XI, SEMESTER I	1. Memahami ketentuan muamalah dalam Islam	1) Menjelaskan pengetahuan muamalah dan azas-azas transaksi ekonomi dalam Islam 2) Memberikan contoh transaksi ekonomi dalam Islam (musyarakah, mudhorobah dan murobahah) 3) Menghindari praktek transaksi jual beli ribawi 4) Menerapkan transaksi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari
	2. Memahami ketentuan shalat Jum'at	1) Menjelaskan tentang kaifiyat shalat Jum'at 2) Menjelaskan tentang kaifiyat khutbah Jum'at 3) Mempraktekkan khutbah Jum'at 4) 2.4 Melaksanakan shalat Jum'at
SEMESTER II	1. Memahami ketentuan pengurusan jenazah	1) Menjelaskan tata cara memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah 2) Melakukan praktek memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah
	2. Memahami ketentuan qurban dan aqiqah	1) Menjelaskan ketentuan penyembelih he-wan 2) Menjelaskan ketentuan qurban dan aqiqah 3) Berlatih dalam berqurban 4) Menyelenggarakan pelaksanaan qurban
	3. Memahami 'Ariyah, Wadi'ah dan luqotoh	1) Menjelaskan pengertian 'Ariyah, Wadi'ah dan luqotoh 2) Menjelaskan ketentuan 'Ariyah, wadi'ah dan luqotoh.

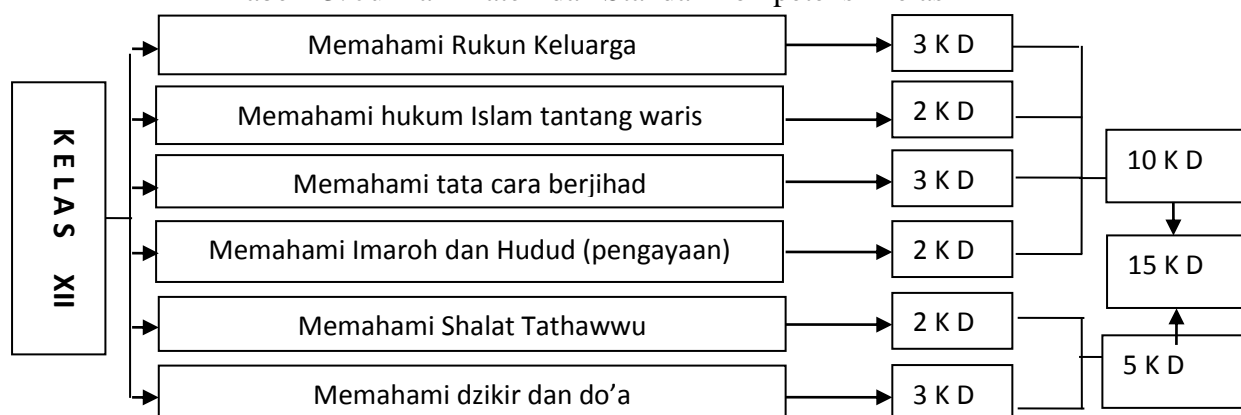
3) Materi Pembelajaran Kelas XII

Materi hukum Islam kelas XII ada enam standar kompetensi, yaitu (1) memahami rukun keluarga, (2) memahami hukum waris Islam, (3) memahami tentang tata cara jihad, (4) memahami tentang imarah dan hudud, (5) memahami shalat tathowu', (6) memahami zikir dan doa. Poin 1 dan 2 (rukun keluarga dan waris) adalah masuk dalam kategori ahkamul usrah (hukum keluarga), artinya bahwa kedua hal tersebut masuk dalam kajian tentang muamalah khusus, yaitu hubungan kekeluargaan. Sementara itu poin 3 dan 4 (jihad, imarah dan hudud) adalah masuk dalam kategori siyasah wal jinayah, yaitu masalah politik dan hukum pidana. Sehingga persoalan-persoalan siyasah dan jinayah ini dapat dikategorikan

¹⁵²Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, *Standar Isi dan Kompetensi Lulusan Pendidikan Al-Islam dan Kemuhimmadiyah*, (Jakarta: Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah, 2007), hlm. 71-72

dalam mumalah dalam pengertian yang sangat luas. Sementara shalat tathowu', zikir dan doa merupakan ibadah mahdhah (ritual).

Tabel 13: Jumlah Materi dan Standar Kompetensi Kelas XII



Dilihat dari gambaran dan penjelasan di atas, muatan (isi) kurikulum hukum Islam untuk kelas XII mengalami perubahan. Kalau kelas X dan XI, isi kurikulum hukum Islam sangat berorentasi pada muatan ibadah mahdhah yang bersifat praktis-ritual. Maka untuk kelas XII, muatan ibadah lebih sedikit dibandingkan dengan materi muamalah. Isu-isu muamalah ada 4 standar kompetensi dengan 10 kompetensi dasar, sedangkan ibadah ada 2 standar kompetensi dengan kompetensi dasar 5.¹⁵³

Tabel 14: Standar Kompetensi & Kompetensi Dasar Kelas XII

	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
KELAS XII, SEMESTER 1	1. Memahami hukum keluarga.	1) Menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam 2) Menjelaskan hikmah m`unakahat /perkawinan 3) Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia
	2. Memahami Shalat Tathawwu'	1) Menjelaskan ketentuan shalat Tathawwu' 2) Membiasakan melakukan shalat Tathawwu
	3. Memahami Dzikir dan Do`a (pengayaan)	1) Menjelaskan tentang dzikir dan doa 2) Menyebutkan hadis tentang dzikir dan doa 3) Membiasakan dzikir dan doa dalam kehidupan sehari-hari
	4. Memahami Imaroh dan Hudud	1) Menjelaskan ketentuan Imaroh berdasarkan Al-Quran dan Hadits 2) Menjelaskan ketentuan hudud berdasarkan Al-Quran dan Hadits
SEMESTER 2	1. Memahami Hukum Islam tentang Waris	1) Menjelaskan ketentuan hukum Waris 2) Menjelaskan contoh pelaksanaan hukum Waris
	2. Memahami tata cara berjihad	1) Menyebutkan pengertian jihad fi sabilillah 2) Menunjukkan contoh jihad fi sabilillah 3) Mempraktekkan jihad dalam kehidupan sehari-hari

¹⁵³Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, *Standar Isi dan Kompetensi Lulusan Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah*, (Jakarta: Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah, 2007), hlm. 72-73.

5. Kesesuaian Kurikulum dengan Kebutuhan Siswa

Berbicara tentang kesesuaian kurikulum sangat terkait erat dengan perkembangan jiwa, emosi, intelektual, dan juga sosial anak. Anak-anak SLTA merupakan anak-anak yang sudah masuk remaja. Masa remaja dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *adolescence*, sementara dalam bahasa Arab dikenal dengan *murahaqah*, yang artinya keremajaan yaitu dekat dengan kematangan.¹⁵⁴ Keremajaan (*adolescence/murahaqah*) menunjukkan masa perkembangan menjelang kematangan diri, baik secara fisik, akal, jiwa, maupun sosial. Menurut Hanan Athiyah ath-Thuri, keremajaan dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu (1) sebagai masa perkembangan, yaitu masa perkembangan yang terjadi setelah baligh dan belum dewasa; (2) sebagai perkembangan psikologis, yaitu masa tersebut merupakan masa perkembangan yang ditandai dengan jiwa yang labil, gejolak batin, dan perasaan ingin bebas. Pada masa-masa ini juga berbeda dengan masa-masa lain karena adanya berbagai perubahan dalam semua aspek kehidupan seseorang secara cepat baik psikologis, sosial, dan fisik.¹⁵⁵ Sementara itu Hartinah membagi perkembangan remaja dalam dua fase, yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir.¹⁵⁶

1) Masa Remaja Awal (Usia 13-16 Tahun)

Pada masa ini terjadi perubahan fisik secara cepat, yaitu dengan dimulai tumbuhnya ciri-ciri keremajaan yang terkait dengan matangnya organ-organ seks seperti, ciri primer (menstruasi pada wanita atau mimpi basah pada pria), dan ciri sekunder (tumbuhnya kumis, jakun, bulu-bulu di sekitar kemaluan, dan membesarnya buah dada pada wanita, membesarnya pinggul). Pertumbuhan fisik terkait dengan organ seksual mengakibatkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran pada diri remaja. Bahkan lebih jauh kondisi itu dapat mempengaruhi kesadaran beragamanya, apalagi jika remaja kurang mendapatkan pengalaman dan pendidikan agama sebelumnya. Penghayatan rohaninya cenderung sekptik (acuh tak acuh) cuek, atau waswas, sehingga muncul keengganan atau kemalasan untuk melakukan ibadah misalnya shalat. Kegoncangan dalam keagamaan tersebut mungkin muncul, karena disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, terkait dengan 2 hal. Pertama matangnya organ seksual yang mendorong remaja untuk memenuhi kebutuhan seks tersebut, namun di sisi lain ia tahu bahwa perbuatan itu dilarang agama. Kondisi ini menimbulkan konflik pada diri remaja, yang apabila tidak dapat diselesaikan (menghadapinya dengan sabar) maka mungkin remaja itu akan terjerumus ke dalam perilaku yang nista. Kedua, berkembangnya sikap independen, keinginan untuk bebas, tidak mau terikat dengan norma-norma keluarga, sekolah, atau agama. Apabila orang tua atau guru memahami dan mendekatinya dengan bijak, maka sikap perlakuan yang berdampak negatif terhadap pribadi remaja, seperti berkembangnya tingkah laku negatif, seperti membandel, menentang, menyendiri, acuh, dan sebagainya. Sementara faktor eksternal, terkait dua hal. Pertama, perkembangan kehidupan sosial budaya dalam masyarakat yang tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai agama, namun sangat menarik minta remaja untuk

¹⁵⁴ Hanan Athiyah ath-Thuri, *Mendidikan Anak Perempuan Di Masa Remaja*, alih bahasa Aan wahyudin, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2007), hlm. Xi.

¹⁵⁵ Hanan Athiyah ath-Thuri, *ibid*.

¹⁵⁶ Hartinah, *Perkembangan Moral dan Nilai-Nilai Agama Anak Masa Sekolah Menengah*, dalam <http://blog.tp.ac.id/perkembangan-moral-dan-nilai-nilai-agama-anak-masa-sekolah-menengah#ixzz2Jcnh3c4T>, diakses pada 31 Januari 2013.

mencobanya, seperti beredarnya film-film, vcd, dan foto porno. Kedua, perilaku orang dewasa, orang tua sendiri, para pejabat, dan warga masyarakat yang gaya hidupnya kurang mementingkan agama, bersifat munafik, tidak jujur, dan perilaku amoral lainnya. Apabila remaja kurang bimbingan keagamaan dalam keluarga, karena konsinya kurang harmonis, kurang memberikan kasih sayang, serta bergaul dengan teman-teman yang kurang menghargai nilai-nilai agama, maka kondisi tersebut menjadi pemicu berkembangnya sikap dan perilaku remaja yang kurang baik, asusila, atau dekadensi moral.¹⁵⁷

2) Masa Remaja Akhir (Usia 17-21)

Secara psikologis, masa usia remaja akhir sudah mulai stabil dan pemikirannya mulai matang. Dalam kehidupan beragama, remaja sudah melibatkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Remaja sudah dapat membedakan agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai penganutnya (ada taat ada yang tidak taat). Kemampuan ini memungkinkan remaja untuk tidak terpengaruh oleh orang-orang yang mengaku beragama, namun tidak melaksanakan ajaran agama atau perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai agama. Remaja dapat menilai bahwa ajaran agamanya yang salah, tetapi orangnyalah yang salah.¹⁵⁸

Untuk itu, maka pendidikan anak pada tahap remaja ini harus dapat memenuhi kebutuhan perkembangan remaja tersebut. Menurut Hanna Athiyah ath-Thuri, pendidikan anak pada usia remaja ini paling tidak memenuhi enam komponen penting yaitu, pendidikan rohani, jasmani, emosi, nalar, estetika, dan sosial.¹⁵⁹ Sementara itu Abdullah Nasih Ulwan, menjelaskan bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak itu paling tidak mencakup tujuh hal, yaitu pendidikan iman, moral, fisik, rasio, psikologis, sosial, dan seksual.¹⁶⁰ Untuk itulah, maka kurikulum AIK, khususnya hukum Islam tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat praktis dan teknis ibadah saja. Pengajaran yang lebih mementingkan pada ketrampilan ibadah saja (ritual), tanpa dibarengi dengan kemampuan lain seperti kecakapan individual yang berhubungan dengan dimensi sosial, maka pendidikan hukum Islam hanya sekedar kulit, dan tidak akan dapat menjadikan seorang siswa yang menjadi (being), yaitu qualified dalam kehidupan moral, spiritual, dan sosialnya. Padahal pelaksanaan ibadah harus mengantarkan seorang siswa mampu mengedalikan nafsu (*fakhsya*) dan perbuatan munkar.¹⁶¹

Dari penjelasan di atas, bahwa usia anak-anak SMA adalah masuk pada masa remaja akhir masa remaja awal dan masuk pada awal masa remaja akhir. Dengan demikian, usia anak-anak SMA merupakan usia peralihan pada tahap remaja dewasa, yaitu ditandai dengan semakin matangnya organ seksual, tumbuhnya kedewasaan, dan berfikir kritis, walaupun secara emosional masih labil karena masih mencari identitas diri dalam perilaku sosial dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pembelajaran agama dalam konteks usia remaja dewasa, maka agama harus menjadi kendali dan juga pengayom moral bagi orang yang sedang dalam tahap pencarian jati diri. Dalam kaitannya dengan pengajaran hukum Islam, lebih ditonjolkan bagaimana nilai-nilai hukum itu dipahami secara baik dalam kaitannya dengan dimensi sosial, disamping nilai-nilai ibadah. Sehingga pengajaran itu untuk menggugah kesadaran lebih

¹⁵⁷Hartinah, *Perkembangan Moral...*, *ibid*.

¹⁵⁸Hartinah, *Perkembangan Moral...*, *ibid*

¹⁵⁹Hanan athiyyah ath-thuri, *ibid*, hlm. 1-282.

¹⁶⁰Abdullah Nasih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, alih bahasa Jamaludin Miri, Lc. (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 157-435.

¹⁶¹Lihat QS ..

ditonjolkan daripada sekedar praktis ritual. Walaupun hal-hal yang praktis ritual tidak dikesampingkan. Karena praktis ritual adalah pembelajaran untuk kedisiplinan dan penghargaan pada waktu dan juga tanggungjawab terhadap suatu beban yang harus ditunaikan dan diselesaikan.

Menurut pengalaman sekolah Muhammadiyah, menyangkut kesesuaian materi hukum Islam dengan kebutuhan siswa, pada umumnya para guru berpendapat bahwa materi hukum Islam yang diajarkan kepada siswa sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Menurut Prayogo, beralasan bahwa materi hukum Islam sudah sesuai dengan aplikasi kehidupan sehari-hari siswa, terutama menyangkut ibadah. Hanya saja menurut pendapatnya, bahwa, memang diakui kurikulum hukum islam terlalu sempit.¹⁶² Hal senada juga diungkapkan oleh Murtadho, guru SMAM Kota Magelang. Menurut pendapatnya bahwa kurikulum hukum Islam sudah relevan dalam konteks untuk diamalkan dalam hubungan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi tidak cukup untuk bekal dalam rangka memberikan pencerahan kepada orang lain. Karena materi kurikulum selama ini lebih menekankan pada nilai praktis dibandingkan pada nilai filosofis atau pijakan dalil yang bersifat argumentatif.¹⁶³

Hal yang hampir sama juga disuarakan oleh Sundarto, guru di SMKM Salaman. Beliau berpendapat bahwa materi hukum Islam selama ini masih belum relevan dengan kebutuhan siswa. Alasan yang beliau berikan adalah adanya materi-materi yang sesungguhnya tidak perlu diberikan untuk siswa SLTA, tetapi malah diberikan secara mendetail. Beliau memberikan contoh, yaitu materi tentang faraidh yang terlalu detail. Tetapi materi-materi penting malahan tidak mendapatkan porsi yang layak bahkan tidak disinggung sama sekali. Sebagai contohnya materi seperti hudud, qiyas-diyat, (hukum perzinahan, narkoba, pencurian, merokok, dll).¹⁶⁴

6. Hambatan Kurikulum di sekolah Muhammadiyah

Mengajarkan pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyah, khususnya hukum Islam tidak mudah. Menurut pengakuan dan penuturan para guru, ada banyak faktor yang menjadi penghambat, baik dari faktor sekolah, guru, siswa, ataupun lingkungan sosial. Hal tersebut juga diakui dan diamini oleh pakar pendidikan, Prof. Ahmad tafsir. Menurut analisis Tafsir, paling tidak ada dua hambatan (kesulitan) dalam pengajaran al-Islam, yaitu: *pertama* ialah kesulitan yang datang dari sifat bidang studi pendidikan agama Islam itu sendiri.¹⁶⁵ *kedua* ialah kesulitan yang datang dari luar bidang studi itu, seperti latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Faktor Materi Kurikulum

Sedangkan Sundarto, berpendapat bahwa hambatan utama dari kurikulum AIK dalam konteks materi kurikulum bahwa materi kurikulum selama ini terlalu teoritis, sehingga belum

¹⁶²Wawancara dengan Prayogo, S.Ag, di SMKM Mertoyudan, 21 Januari 2013.

¹⁶³Wawancara dengan Murtadho NU, S.Pd.I, di SMAM Kota Magelang, 19 Januari 2013.

¹⁶⁴Wawancara dengan Sundarto, S.Ag, di Kantor SMKM Salaman, 18 Januari 2013.

¹⁶⁵Bahwa para ahli pendidikan sepakat bahwa bidang studi agama adalah bidang studi yang paling sulit pelaksanaan pendidikannya. Seandainya diurutkan, kita menemukan jenis pendidikan yang sulit dilaksanakan, pertama ialah Filsafat . Matematika sulit diajarkan karena matematika itu sebenarnya adalah filsafat dalam bentuk lain; kedua ialah Seni, seni sulit karena ia tidak memiliki teori yang universal; dan ketiga, dan ini yang paling sulit, ialah agama. Karena sulitnya melaksanakan pendidikan agama, maka banyak orang berpendapat pendidikan agama tidak usah diberikan di sekolah. Prof. Dr. Ahmad Tafsir, *Permasalahan Pendidikan Agama Bagi Remaja*, [Http://Rub13.Tripod.Com/Al - Ihsaan.Htm](http://Rub13.Tripod.Com/Al - Ihsaan.Htm), Diakses Pada 3 Januari 2013.

menjawab kebutuhan siswa. Disamping itu, materi yang ada terlalu banyak, sehingga hal ini menyebabkan banyak siswa yang ketinggalan, terutama siswa dari latar belakang agama yang kurang, seperti misalnya mereka belum bisa membaca al-qur'an dan sebagainya. Hal senada juga dikeluhkan oleh Widodo, guru SMKM Kota Magelang. Beliau menyinggung tentang keterbatasan waktu yang tersedia untuk pengajaran materi AIK, terutama hukum Islam.¹⁶⁶

Sementara itu untuk solusi mengatasi keterbatasan waktu, Karmadi memberikan alternatif pemecahan, yaitu (1) guru hanya mengajarkan materi tentang hal-hal yang bersifat praktis, sehingga konsekuensinya, materi-materi yang teoritis-kognitif, wawasan yang mendalam tidak tercapai. (3) Memberikan penugasan kepada siswa, sehingga materi-materi yang tidak sempat diajarkan di kelas dapat diselesaikan. Contohnya adalah shalat jum'at, siswa diminta membuat teks khutbah jum'at, dan praktek shalat, siswa diminta untuk menghafal bacaan shalat dan surat-surat pendek, dan doa-doa untuk disetorkan kepada guru. (4) Memberikan pemahaman tentang keragaman pemikiran keagamaan kepada siswa, sehingga walaupun mereka berlatar belakang berbeda, tetapi akan mengenal perbedaan tersebut.¹⁶⁷

Sedangkan, Sundarto memberikan solusi terhadap problem hambatan kurikulum yang selama ini dihadapi di sekolah dengan beberapa langkah. Dan ternyata langkah-langkah tersebut menjadi jurus manjur untuk anak didiknya. Gerakan yang dilakukan di sekolahnya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai, praktek, dengan kegiatan ekstrakurikuler siswa. Sehingga penghayatan keagamaan tidak saja di ruang kelas pada saat jam-jam pelajaran, akan tetapi nilai-nilai dasar keislaman itu terejawantah dalam kehidupan praktis dalam bentuk pembiasaan-pembiasaan di lapangan.¹⁶⁸ Dengan demikian siswa tidak hanya sekedar tahu (knowing), tetapi juga melakukan (doing), sekaligus menjadi kesadaran yang ditradisikan dalam kehidupan nyata (being). Berikut adalah table kegiatan yang ditradisikan di SMKM Salaman.

Tabel 15: Kegiatan Ekstra Keagamaan untuk Siswa dan Guru di SMKM Salaman

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Tausiyah	Guru	Tiap jum'at
2	Tadarus Al-qur'an	Guru dan Murid	Tiap Jum'at
3	Shalat malam	Siswa perkelas/bergilir	Tiap malam Ahad
4	Gerakan Infak	Siswa	Tiap jum'at dan kematian
5	Pengurusan jenazah	Siswa dan guru	Tiap ada kematian
6	Safari ramadhan	Siswa dan guru	Ramadhan
7	Mabit	Siswa	Ramadhan
8	Hafalan surat dan do'a	Siswa dan Guru	Tiap saat
9	Penugasan Khatib	Guru non Agama	Tiap jum'at
10	Pengajian Aisiyah	Guru dan Istri guru	Tiap bulan

Sumber: Wawancara dengan Sundarto, S.Ag, Guru SMKM Salaman.

¹⁶⁶Wawancara dengan Widodo, S.Ag, di kantor SMKM Kota Magelang, 21 Januari 2013

¹⁶⁷Wawancara dengan Karmadi, S.Ag, di Kantor SMKM Bandung, 18 Januari 2013

¹⁶⁸Wawancara dengan Sundarto, S.Ag, di Kantor SMKM Salaman, 18 Januari 2013

2) Faktor Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi keluarga banyak menentukan perkembangan kehidupan pendidikan dan karier anak. Kondisi sosial yang menggambarkan status orang tua merupakan faktor yang dilihat oleh anak untuk menentukan pilihan sekolah dan pekerjaan. Secara tidak langsung keberhasilan orang tua merupakan beban bagi anak, sehingga dalam menentukan pilihan pendidikan tersirat untuk ikut mempertahankan kedudukan orang tua. Di samping itu, secara eksplisit orang tua menyampaikan harapan hidup anaknya yang tercermin pada dorongan untuk memilih jenis sekolah atau pendidikan yang diidamkan oleh orang tua.

Faktor ekonomi mencakup kemampuan ekonomi orang tua dan kondisi ekonomi negara (masyarakat). Yang pertama merupakan kondisi utama karena menyangkut kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya. Banyak anak berkemampuan intelektual tinggi tidak dapat menikmati pendidikan yang baik disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ekonomi orang tuanya.

3) Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah komponen vital bagi berhasilnya suatu pendidikan. Dalam hal ini, Hadari Nawawi berpendapat bahwa yang bertanggung jawab terhadap maju dan mundurnya pendidikan adalah tergantung pada keluarga, sekolah, dan masyarakat.¹⁶⁹ Ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ketiganya juga harus mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana yang memberikan motivasi, fasilitas edukatif, wahana pengembangan potensi yang ada pada diri peserta didik dan mengarahkannya untuk mampu bernilai efektif-efisien sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zamanya, serta memberikan bimbingan dan perhatian yang serius terhadap kebutuhan moral spiritual peserta didiknya. Pengembangan dimaksudkan meliputi pengembangan potensi anak didik, transformasi ilmu pengetahuan dan kecakapan lainnya, dan membangkitkan motif-motif yang ada secara maksimal.¹⁷⁰ Dalam hadis Nabi SAW :

Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya (HR Mutafaqun 'alaih).

Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak saja ditumpukan pada keluarga, sekolah, pemerintah, tetapi setiap pribadi (individu) muslim bertanggungjawab terhadap terlaksanakannya kegiatan pendidikan.

a. Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak dan remaja. Pendidikan keluarga lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian daripada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual yang sesuai dengan pandangan hidup pada masing-masing keluarga, sekalipun secara nasional bagi keluarga-keluarga bangsa Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu Pancasila. Ada keluarga yang dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang saleh dan senantiasa takwa dan iman kepada Tuhan Yang maha Esa. Ada pula keluarga yang dasar

¹⁶⁹ Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas* (Jakarta: haji Masagung, 1989), hlm. 7. Lihat Juga Dr. Nur Ahid, M.Ag., *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 59.

¹⁷⁰ Dr. Nur Ahid, M.Ag, *ibid*, hlm 60

dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak dan remaja di dalam keluarga berkedudukan sebagai anak didik dan orang tua sebagai pendidiknya. Secara garis besar corak dan pola pada penyelenggaraan pendidikan keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu; pendidikan otoriter, pendidikan demokratis, dan pendidikan liberal. Berkaitan dengan itu, pendidikan yang bercorak otoriter memberikan kesan di mana anak-anak senantiasa harus mengikuti apa yang telah digariskan oleh orang tuanya, sedang pada pendidikan yang bercorak liberal, anak-anak lebih cenderung diberikan kebebasan oleh orang tuanya untuk menentukan tujuan dan cita-citanya. Dari beberapa pola pendidikan itu, diketahui bahwa kebanyakan keluarga di Indonesia mengikuti corak pendidikan yang demokratis. Selanjutnya, makna pendidikan yang demokratis itu oleh Ki Hadjar Dewantara dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan itu hendaknya *ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*, yang artinya: di depan memberi contoh, di tengah membimbing, dan di belakang memberi semangat.

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kurikulum di lapangan. Menurut Prayogo, Guru SMKM Mertoyudan menyatakan bahwa faktor keluarga, yaitu lingkungan keluarga yang tidak peduli terhadap pendidikan agama anaknya.¹⁷¹ Para siswa ketika disekolah diajarkan AIK tetapi setelah mereka kembali ke keluarga, maka kehidupannya kembali seperti semula, sehingga pengajaran di sekolah tidak berbekas. Di samping itu, ketidakmampuan dan ketidakpedulian keluarga dalam pendidikan agama kepada anak-anak berimplikasi pada kemampuan dasar anak dalam membaca al-Qur'an. Dan kebanyakan anak-anak yang tidak mampu membaca al-Qur'an berasal dari lingkungan yang tidak peduli terhadap pendidikan spiritual mereka. Menurut penuturan Widodo, pendidik di SMKM kota Magelang, menyatakan bahwa pada umumnya, anak yang tidak bisa membaca al-qur'an berasal dari kota, sebaliknya anak-anak yang berasal dari kampung /desa rata-rata bisa membaca al-Qur'an dengan baik. Disamping itu, latar belakang keluarga siswa yang beragam yang menyangkut pemahaman keagamaan juga menjadi kendala tersendiri. Hal ini juga diamini oleh Karmadi. Beliau menjelaskan bahwa latar belakang keagamaan siswa yang beragam menjadi tantangan tersendiri. Karena siswa di sekolahnya tidak hanya dari Muhammadiyah tapi juga dari NU dan latar belakang lain.¹⁷² Sedangkan Sundarto, berpendapat bahwa hambatan utama dari kurikulum AIK adalah dari latar belakang siswa adalah latar belakang yang sangat heterogen. Siswa berasal dari beragam latar belakang baik dari sisi pengetahuan agama atau juga ketrampilan agama. Siswa yang berasal dari sekolah yang berlatar belakang agama pada umumnya memiliki ketrampilan agama yang cukup baik dibandingkan dengan siswa yang berasal dari non agama. Demikian juga siswa yang berasal dari Muhammadiyah memiliki pengetahuan agama dan ketrampilan agama yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang bukan Muhammadiyah. Implikasi lebih lanjut adalah, banyak siswa yang mengalami hambatan karena tidak ada ketersambungan materi dari level/sekolah sebelumnya.

¹⁷¹Wawancara dengan Prayogo, S.Ag, di Kantor SMKM Mertoyudan, 21 Januari 2013

¹⁷²Wawancara dengan Karmadi, S.Ag, di kantor SMKM Bandongan, 18 Januari 2013

Dari temuan di atas, menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran vital bagi keberhasilan pendidikan agama anak. Karena keluarga merupakan lembaga yang paling pertama dikenal oleh anak. Karena anak pertama kali mengenal orang tuanya yang mendidik mereka dari semenjak masih kecil. Bimbingan, perhatian, dan kasih sayang yang terjalin antara anak dengan orang tua merupakan dasar yang ampuh bagi pertumbuhan dan perkembangan psikis serta nilai-nilai social dan religious pada diri anak.¹⁷³ Proses sosialisasi dan penanaman nilai pada anak secara praktis dimulai sejak anak dilahirkan. Dalam Islam secara teoritis upaya penanaman nilai-nilai pendidikan sudah dimulai sejak awal pemilihan jodoh. Dalam konteks ini, Nabi saw telah memberikan isyarat dengan empat criteria, yaitu kecantikan, kekayaan, keturunan, dan agama. Dan diantara empat hal tersebut, agama merupakan pilihan utama dalam rangka untuk terbinanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah.¹⁷⁴

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir problem-problem yang berpangkal dari lingkungan keluarga, menurut Prayogo, paling tidak ada dua arah, yaitu kesadaran orang tua tentang pentingnya kehidupan Islami melalui forum pengajian bulanan yang diselenggarakan di sekolah. Dengan forum pengajian tersebut, memberikan suatu pemahaman kepada orang tua, bahwa keluarga merupakan fondasi penting bagi penyemaian nilai-nilai Islam. Kedua, dari arah siswa, yaitu disamping siswa mendapatkan materi pengajaran di sekolah melalui struktur kurikulum yang ada. Siswa juga digerakan melalui forum-forum pengajian di sekolah. Khusus di SMK Mertoyudan ada dua pengajian rutin yang diselenggarakan oleh siswa yaitu pengajian bulanan dan pengajian jurusan tiap triwulan sekali. Prayogo, menegaskan, bahwa forum-forum tersebut disamping memberikan kesadaran kepada siswa juga dapat memberikan keterampilan beragama dan berorganisasi.¹⁷⁵

b. Lingkungan Masyarakat

Masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok individu pada suatu komunitas yang terikat oleh satu kesatuan visi kebudayaan yang mereka sepakati bersama. Setidaknya ada dua macam bentuk masyarakat dalam komunitas kehidupan manusia. Pertama, kelompok primer, yaitu kelompok manusia mula-mula berinteraksi dengan orang lain secara langsung, seperti keluarga dan masyarakat secara umum. Kedua, kelompok sekunder, yaitu kelompok yang dibentuk secara sengaja atas pertimbangan dan kebutuhan tertentu, seperti perkumpulan profesi, sekolah, partai politik dan sebagainya. Kesatuan ini kemudian membentuk hubungan yang komunikatif dan dinamis, sesuai dengan dinamika tuntutan perkembangan zaman.¹⁷⁶

Masyarakat merupakan lingkungan alami kedua yang dikenal anak-anak. Anak remaja telah banyak mengenal karakteristik masyarakat dengan berbagai norma dan keragamannya. Kondisi masyarakat amat beragam, tentu banyak hal yang harus diperhatikan dan diikuti oleh anggota masyarakat, dan dengan demikian para remaja perlu memahami hal itu. Sehubungan dengan itu, maka tidak jarang para remaja memiliki perbedaan pandangan dengan para orang tua, sehingga norma dan perilaku remaja dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat yang sedang berlaku. Hal ini tentu saja akan berdampak pada pembentukan pribadi remaja. Perbedaan ini dapat mendorong para remaja untuk membentuk kelompok-kelompok sebaya

¹⁷³ Dr. Nur Ahid, M.Ag, ibid, hlm. 61.

¹⁷⁴ Dr. Nur Ahid, M.Ag, ibid, hlm. 61-62.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Prayogo, S.Ag, di Kantor SMK Mertoyudan, 21 Januari 2013

¹⁷⁶ Dr. Nur Ahid, M.Ag, ibid, 70.

yang memiliki kesamaan pandangan. Di balik itu di dalam masyarakat terdapat tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh kuat terhadap pola hidup masyarakatnya. Namun hal itu terkadang tidak mampu mempengaruhi kehidupan remaja, akibatnya para remaja kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat, atau para remaja dengan sengaja menghindar dari aturan dan ketentuan masyarakat.

Eksistensi masyarakat sangat besar peranan dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik. Karena, keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh alternative di dalam pelaksanaan proses pendidikan. Untuk itu, anggota masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab moral terhadap terlaksananya proses pendidikan. Untuk itulah pendidikan harus mampu mengakumulasi seluruh potensi dan nilai kebudayaan masyarakat dan system pendidikannya.¹⁷⁷

Dalam menjalankan fungsi pendidikan, masyarakat banyak membentuk atau mendirikan kelompok-kelompok atau paguyuban-paguyuban atau kursus-kursus yang secara sengaja disediakan untuk anak remaja dalam upaya mempersiapkan hidupnya dikemudian hari. Kursus-kursus yang dimaksud pada umumnya berorientasi kepada dunia kerja. Namun, banyak kelompok kegiatan atau kursus-kursus yang dibangun masyarakat tersebut kurang menarik perhatian remaja; oleh para remaja apa yang disediakan itu dinilainya tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kondisi semacam itu banyak merangsang pemikiran remaja yang responnya belum tentu positif. Banyak kelompok remaja yang membayangkan masa depannya suram dan mereka membentuk kelompok yang diberi nama “Madesu”.

Murtadho, dari SMAM Kota Magelang, berpendapat bahwa hambatan kurikulum AIK dari factor masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan bagi keberhasilan pembelajaran agama di sekolah. Beliau menyatakan bahwa budaya di masyarakat selama ini belum mendorong siswa untuk giat belajar, terutama motivasi untuk menimba dan menuntut ilmu agama. Hal ini karena masyarakat pada umumnya, tidak peduli pada kehidupan spiritual anak mereka dan lebih banyak fokus pada kehidupan material belaka.

c. Lingkungan Teman Sebaya

Bahwa pergaulan teman sebaya akan memberikan pengaruh langsung terhadap kehidupan pendidikan masing-masing remaja. Lingkungan teman sebaya akan memberikan peluang bagi remaja (laki-laki atau wanita) untuk menjadi lebih matang. Di dalam kelompok sebaya seorang gadis berkesempatan untuk menjadi seorang wanita dan perjaka untuk menjadi seorang laki-laki serta belajar mandiri sesuai dengan kodratnya. Hanya saja teman sebaya yang tidak baik akan berpengaruh pada perilaku yang bersangkutan. Fenomena geng motor yang berkembang di kota-kota besar merupakan pergaulan yang terbentuk di kalangan teman sebaya yang selama ini dicap sebagai perilaku yang menabrak norma masyarakat yang anti kekerasan.

Untuk membendung pergaulan antar teman sebaya yang tidak baik, sekolah Muhammadiyah sebagaimana yang dilakukan oleh SMK Bandongan, menciptakan suasana sekolah yang mendukung dengan menggunakan konsep sekolah full day school. Dengan konsep sekolah full day, diharapkan guru dapat mengontrol perilaku siswa dalam sehari,

¹⁷⁷ Dr. Nur Ahid, M.Ag, ibid, 70

karena siswa sekolah tinggal di sekolah hampir satu hari, yaitu, dari jam 07.00-16.00. Dengan konsep tersebut, berbagai macam kegiatan keislaman dapat dirancang termasuk didalamnya adalah shalat berjama'ah, dan lain-lain.

d. Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan, tempat peserta didik melaksanakan interaksi proses belajar mengajar secara formal. Batasan ini memberikan suatu fenomena, bahwa sekolah merupakan suatu lembaga pelaksana internalisasi nilai-nilai dari suatu kebudayaan, kepada peserta didik secara terarah dan memiliki tujuan.¹⁷⁸ Oleh karena itu kesiapan sekolah baik dari sisi manajemen, kurikulum, perlengkapan, dan sumberdaya manusia seperti guru dan tenaga kependidikan lainnya sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum di lapangan.

Dalam kaitanya dengan kesiapan sekolah, Widodo menegaskan bahwa tidak ada laboratorium dan alat peraga pendidikan juga menjadi kendali tersendiri dalam pengajaran AIK. Sebagai contoh untuk mempraktekan manasik haji perlu peralatan pendukung. Hal senada juga disampaikan oleh Murtadho, guru SMAM Kota Magelang. Beliau berpendapat bahwa hambatan kurikulum AIK dari sisi sekolah, adalah menyangkut kualitas pembelajaran AIK sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam menyediakan fasilitas. Kalau sekolah memiliki laboratorium yang lengkap, maka akan berimplikasi pada kualitas pengembangan pendidikan agama pada anak, tapi kalau sebaliknya, maka sulit diharapkan untuk dicapainya pendidikan agama Islam yang ideal.¹⁷⁹

Gambaran di atas menyiratkan problem umum sekolah swasta di Indonesia. Hal ini berbeda dengan sekolah-sekolah negeri yang fasilitasnya semuanya mendapatkan suport anggaran dari pemerintah. Bagi sekolah-sekolah swasta tertentu, termasuk sebagian sekolah Muhammadiyah, masalah sarana fisik menjadi kendala utama. Hal ini karena pada umumnya sekolah-sekolah Muhammadiyah tumbuh dan berkembang berasal dari bawah (*Bottom Up*). Ketika sekolah yang bersangkutan mendapatkan sokongan yang kuat dari masyarakat, dengan ditunjukkannya antusiasme masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah Muhammadiyah, maka sekolah tersebut akan dapat berdiri dengan fasilitas yang berasal dari masyarakat yang bersangkutan. Ketika sekolah tersebut minim dukungan, dengan murid-murid yang terbatas, maka sudah dipastikan masalah fasilitas fisik, sarana belajar, menjadi persoalan yang serius. Dengan demikian, proses belajar mengajar pada gilirannya akan terganggu dan tidak optimal.

Sementara kendala lain yang sering muncul adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) guru. Hal ini diungkapkan oleh Karmadi, dari SMK Bandongan, berpendapat bahwa kesulitan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan kurikulum dalam kaitanya dengan lingkungan sekolah adalah kesiapan guru dalam pembelajaran. Dari sisi guru, pada umumnya guru kurang menguasai IT dalam pembelajaran. Padahal di sekolah disediakan, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan karakter guru yang malas tidak mau belajar perkembangan teknologi pendidikan. Disamping itu, ketidaksiapan guru dalam memberikan materi dan pengayaan kepada siswa. Hal ini dikarenakan waktu guru tersita untuk mengajar, sehingga guru tidak sempat untuk mencari materi pembelajaran. Terhadap problematika

¹⁷⁸ Dr. Nur Ahid, M.Ag, ibid, 66

¹⁷⁹ Wawancara dengan Murtadho NU, S.Pd.I di kantor SMAM Kota Magelang, 19 Januari 2013.

tersebut, Karmadi memberikan alternatif pemecahan, yaitu (1) Guru harus terpacu untuk menguasai teknologi pembelajaran, terutama IT. Usaha tersebut, menurutnya dapat dilakukan dengan belajar secara bertahap, terutama power point, sehingga kualitas pembelajaran di kelas menjadi lebih baik.

Sekolah merupakan lingkungan artifisial yang sengaja diciptakan untuk membina anak-anak ke arah tujuan tertentu, khususnya untuk memberikan kemampuan dan keterampilan sebagai bekal kehidupannya di kemudian hari. Bagi para remaja pendidikan jalur sekolah yang diikutinya adalah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di mata remaja sekolah dipandang sebagai lembaga yang cukup berpengaruh terhadap terbentuknya konsep yang berkenaan dengan nasib mereka di masa mendatang. Mereka menyadari jika prestasi atau hasil yang dicapai di sekolah itu baik, maka hal itu akan membuka kemungkinan hidupnya di kemudian hari menjadi cerah, tetapi sebaliknya apabila prestasi yang dicapainya kurang baik, maka hal itu dapat berakibat pada gelapnya masa depan mereka. Kegagalan sekolah bagi remaja dipandang sebagai awal dari kegagalan hidupnya. Dengan demikian, sekolah dipandang banyak mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, remaja telah memikirkan benar-benar dalam memilih dan mendapatkan sekolah yang diperkirakan mampu memberikan peluang baik baginya di kemudian hari. Pandangan ini didasari oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, dan harga diri (status dalam masyarakat). Akan tetapi, dalam menentukan pilihan sekolah masih banyak terjadi campur tangan orang tua yang terlalu besar. Hal itu sering membawa akibat kegagalan dalam pendidikan sekolah karena anak terpaksa mengikuti pelajaran yang tidak sesuai dengan pilihan dan minatnya.

Dunia pendidikan, baik jalur sekolah maupun jalur luar sekolah, menyediakan berbagai jenis program yang diperkirakan relevan dengan kebutuhan jenis tenaga kerja di masyarakat. Untuk menetapkan pilihan jenis pendidikan dan pekerjaan yang diidamkan banyak faktor yang harus dipertimbangkan yang meliputi: (1) Faktor prediksi masa depan; (2) Faktor prestasi yang menggambarkan bakat dan minat remaja; (3) Faktor kehidupan yang dapat diamati dari kondisi beragamnya lapangan kerja di masyarakat; (4) Kemampuan daya saing setiap individu.

4) Faktor Pandangan Hidup

Pandangan hidup merupakan bagian yang terbentuk dari lingkungan. Pengejawantahan pandangan hidup tampak pada pendirian seseorang, terutama dalam menyatakan cita-cita hidup bagi remaja. Dalam memilih lembaga pendidikan, seorang individu dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang melatarbelakangi. Remaja yang berasal dari kalangan keluarga kurang, umumnya bercita-cita untuk di kemudian hari menjadi orang yang berkecukupan (kaya), dan dengan demikian dalam memilih jenis pendidikan berorientasi kepada jenis pendidikan yang dapat mendatangkan banyak uang, misalnya; kedokteran, ekonomi, dan ahli teknik.

Faktor pandangan hidup tersebut berkorelasi positif dengan apa yang terjadi di lapangan. Yaitu, pada umumnya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kebanjiran murid adalah sekolah-sekolah kejuruan yang secara khusus mendidik siswa untuk siap kerja. Sebagai misal, SMK Salaman, SMK Bandongan, dan SMK Mertoyudan dalam setiap tahun ajaran, siswa yang mendaftar menunjukkan grafik meningkat. Hal ini berkebalikan dengan sekolah menengah (SMA) yang akhir-akhir ini siswa minat berkecenderungan menurun. Ini misalnya dialami oleh SMA Muhi Kota Magelang.

Di samping itu, kecenderungan modernitas yang berorientasi pada pandangan hidup materialistis, maka pendidikan agama juga kurang mendapatkan perhatian yang serius oleh orang tua. Indikasi ini dapat dilihat, dimana siswa-siswa yang berasal dari komunitas kota pinggiran lebih banyak yang tidak kenal agama dan tidak bisa membaca al-Qur'an dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Fenomena ini ditemukan di SMK Kota Magelang. Munculnya kecenderungan ini (trend), karena masyarakat kota pinggiran pada umumnya adalah orang-orang pekerja baik sebagai buruh atau pedagang, sehingga pada umumnya perhatian pada anak sangat terbatas waktunya, orang tua hanya berfikir untuk kepentingan material anak dibandingkan dengan kepentingan spritual. Ini artinya giliran modernitas zaman sangat nampak bagi masyarakat urban atau sub urban dibandingkan dengan masyarakat pedesaan yang relative masih resisten dengan dampak buruk modernitas.

5) Faktor Modernitas dan Globalisasi

Tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam sangat kompleks dan beragama. Dalam kaitan ini, Ahmad Tafsir, menggarisbawahi bahwa budaya modern dan globalisasi menjadi tantangan tersendiri.¹⁸⁰ Beliau menegaskan "Bahwa kesulitan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan agama (Islam) saat ini ialah kesulitan yang datang dari pengaruh budaya modern". Semakin kuat budaya modern itu mencengkrum masyarakat, maka pendidikan agama Islam akan mendapat kesulitan yang lebih besar lagi.¹⁸¹ Menurut Ahmad tafsir, ada beberapa ciri budaya modern¹⁸² yang bisa jadi menjadi musuh pendidikan agama Islam, yaitu: *Pertama*, budaya modern adalah budaya yang menggunakan akal sebagai pengukur kebenaran. Cara ini adalah cara yang digunakan oleh paham rasionalisme. Rasionalisme mengajarkan bahwa akal itulah alat pencari dan pengukur kebenaran. Para remaja kita sringkali, sambil bercanda dengan temannya, berkata, kalau logis oke, kalau tidak logis nanti dulu. Banyak atau sedikit, ungkapan itu telah menggambarkan bahwa remaja kita itu telah menganut rasionalisme.¹⁸³ *Kedua*, dalam budaya modern itu manusia akan semakin materialis.

¹⁸⁰ Beliau menjelaskan diantaranya adalah dedikasi guru agama mulai menurun, orang tua dirumah mulai kurang memperhatikan pendidikan agama bagi anaknya, orientasi tindakan semakin materialis, berpikir semakin rasional, orang semakin bersifat rasional, orang semakin bersifat individualis, kontrol sosial semakin melemah, dan lain-lain. Kelihatannya, semuanya itu besumber pada watak budaya modern.

¹⁸¹ Menurut Geller (1992) ada tiga world view yang dapat dipilih saat ini. Pertama, agama; kedua, relativisme; dan ketiga, rasionalisme tercerahkan. Paham ketiga ini meyakini ada suatu kebenaran yang unik, tetapi ia menolak adanya masyarakat yang mampu memilikinya secara pasti. Relativisme itulah menurut Gellner paham yang dianut oleh gerakan pasca Modern. Budaya yang dihasilkan oleh ketiga paham itu diidentifikasi berikut ini sebagai ciri-ciri budaya modern. Prof. Dr. Ahmad Tafsir, *Permasalahan Pendidikan Agama Bagi Remaja*, ibid

¹⁸² Kata "modern" tidaklah muncul sekaligus untuk seluruh atau berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang seni kata modern digunakan untuk membedakan sifat seni lukis dan seni pahat yang eksperimental dan dinamis pada abad kedua puluh dengan seni lukis dan seni pahat masa sebelumnya (Encyclopedia Americana, 1977). Di dalam filsafat kata modern itu digunakan untuk menyebutkan periode filsafat setelah Abad Tengah. Ini dimulai pada pertengahan abad ketujuh belas. Pada zaman Yunani (Ancient Philosophy) yang mendominasi filsafat yang sain adalah tokoh-tokoh agama Kristen. Pada zaman modern (Modern Philosophy) yang mendominasi ialah akal. Menurut Reese (1980), istilah "modern" sesungguhnya lebih mengacu pada pemikiran keagamaan. Jadi, meskipun kita mengenal kata modern dalam bidang seni dan filsafat, toh yang berperan utama sebagai penilai tetap saja agama, demikian kira-kira yang dimaksud Reese. Menurut Huston Smith (1989), sesuatu perubahan yang amat mendasar telah terjadi di Barat. Perubahan itu berjalan melalui empat tahap. Pertama zaman Graeco-Roman yaitu zaman Yunani Lama, kedua zaman Abad Tengah, ketiga zaman Modern, dan keempat ialah zaman Pasca Modern. Jika pada zaman modern pegangan orang adalah *world view*, maka pada zaman Pasca Modern orang mulai memegang *world view*. Prof. Dr. Ahmad Tafsir, *Permasalahan Pendidikan Agama Bagi Remaja*, ibid

¹⁸³ Penggunaan akal dalam Islam bukan saja dibolehkan tetapi diharuskan. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menyuruh kita menggunakan akal. Tetapi Al-Quran juga menjelaskan bahwa banyak juga kebenaran lain yang tidak dapat diperoleh dan dipahami dengan akal. Banyak ajaran dalam Al-Quran yang tidak dipahami oleh akal. Hakikat Allah, surga, neraka, malaikat, haramnya babi, mengapa puasa harus di bulan Ramadhan, mengapa shalat subuh dua raka'at sedang shalat dhuhur empat, adalah beberapa contoh ajaran Al-Qur'an yang supra-rasional. Bila remaja kita terlalu terbiasa menggunakan

Ada dua macam pengertian materialis. Pertama berarti orang yang senang kepada materi, yaitu orang yang senang pada kekayaan. Materialis seperti ini diperolehkannya dalam Islam, bahkan mungkin tidak hanya boleh melainkan wajib. Banyak item ajaran Islam yang hanya dapat kita lakukan bila kita kaya. Islam memberikan aturan tentang cara memperoleh kekayaan itu. Kedua berarti orang yang tidak dapat menerima sesuatu sebagai benar bila sesuatu itu tidak didukung data empirik. Bagi materialis seperti ini yang benar hanyalah yang empirik. Tatkala kita katakan padanya bahwa surga itu ada, maka ia akan menjawab bahwa ia percaya bila ada buktinya secara empirik. Salah satu idiologi yang menganut paham materialis seperti ini ialah idiologi komunis. Paradigma sains modern yang mengatakan bahwa yang benar ialah yang logis dan empiris, juga termasuk yang menganut paham ini.¹⁸⁴

Dan tantangan yang paling menonjol di era globalisasi terhadap pendidikan di antaranya, krisis moral. Melalui tayangan acara-acara di media elektronik dan media massa lainnya, yang menyuguhkan pergaulan bebas, sex bebas, konsumsi alkohol dan narkoba, perselingkuhan, pornografi, kekerasan, liar dan lain-lain. Hal ini akan berimbas pada perbuatan negatif generasi muda seperti tawuran, pemerkosaan, hamil di luar nikah, penjangbretan, pencopetan, penodongan, pembunuhan oleh pelajar, malas belajar dan tidak punya integritas dan krisis akhlak lainnya. Yang ke-dua dampak negatif dari era globalisasi adalah krisis kepribadian. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di suatu negara yang menyuguhkan kemudahan, kenikmatan dan kemewahan akan menggoda kepribadian seseorang. Nilai kejujuran, kesederhanaan, kesopanan, kepedulian sosial akan terkikis. Untuk ini sangat mutlak diperlukan bekal pendidikan agama, agar kelak dewasa akan tidak menjadi manusia yang berkepribadian rendah, melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, melakukan kejahatan intelektual, merusak alam untuk kepentingan pribadi, menyerang kelompok yang tidak sepaham, percaya perdukunan, menjadi budak setan dan lain-lain. Faktor pendorong adanya tantangan di atas dikarenakan longgarnya pegangan terhadap agama dengan mengedepankan ilmu pengetahuan, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh kepala rumah tangga yaitu dengan keteladanan dan pembiasaan, derasnya arus informasi budaya negatif global diantaranya, hedonisme, sekulerisme, pornografi dan lain-lain, tidak ada tindakan efektif dari pemerintah karena sibuk memikirkan perebutan jabatan.

Selain adanya hambatan akibat dampak negatif era global juga terdapat tantangan pendidikan untuk membekali generasi muda mempunyai kesiapan dalam persaingan. Kesiapan itu Deliar Noer memberikan ilustrasi ciri-ciri manusia yang hidup di zaman global adalah masyarakat informasi yang merupakan kelanjutan dari manusia modern dengan sifatnya yang rasional, berorientasi ke depan, terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri dan inovatif juga mampu bersaing serta menguasai berbagai metode dalam memecahkan

akalnya, dengan itu dilatih menggunakan akalannya dalam menanggapi setiap persoalan, maka ia akan sulit menerima ajaran agama yang supra-rasional tersebut. Sementara itu di sekolah, melalui pengajaran matematika dan sains, anak-anak kita secara sistematis dan telaten dilatih menjadi penganut Rasionalisme. Prof. Dr. Ahmad Tafsir, *Permasalahan Pendidikan Agama Bagi Remaja*, ibid

¹⁸⁴ Paham ini dilatihkan di sekolah. Sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi (terutama di perguruan tinggi) pelajar itu diajar agar berpikir ilmiah, yaitu berpikir logis-empiris. Di perguruan tinggi, sebelum mahasiswa mengadakan penelitian untuk menulis skripsi atau tugas akhir, mereka belajar Metodologi Riset, di situ mereka pasti diajari metode ilmiah (scientific method). Rumus metode ilmiah ialah logico-hypotetico-verificatif. Artinya, sesuatu yang benar itu haruslah logis dan didukung data empiris. Metode ilmiah inilah yang merupakan grand theory yang darinya diturunkan metode-metode penelitian. Rumus logico-hypotetico-verifikatif adalah tulang punggung teori penelitian ilmiah, sedangkan penelitian ilmiah itu adalah cara yang sah dalam memperoleh kebenaran ilmiah. Prof. Dr. Ahmad Tafsir, *Permasalahan Pendidikan Agama Bagi Remaja*, ibid

masalah. Dengan demikian pendidikan dituntut untuk mampu membekali peserta didik nilai-nilai moral, kepribadian, kualitas dan kedewasaan hidup guna menjalani kehidupan bangsa yang multi cultural, yang sedang dilanda krisis ekonomi agar dapat hidup damai dalam komunitas dunia di era globalisasi.

Dari penjelasan di atas, hambatan kurikulum ternyata sangat kompleks dan banyak. Hambatan tersebut tidak hanya datang dari materi kurikulum itu sendiri, tetapi juga mencakup banyak hal, seperti guru, murid, sekolah, lingkungan, dan orang tua. Dan ketika komponen-komponen di atas tidak saling mendukung, memperkuat terciptanya suasana yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan pendidikan maka tujuan yang hendak dicapai dari kurikulum yang bersangkutan tidak akan tercapai dengan baik.

Walaupun banyak hambatan dalam implementasi pembelajaran hukum Islam, guru dituntut untuk kreatif dan inovatif, sehingga hambatan tidak dimaknai sebagai suatu jalan buntu yang tidak ada solusinya, tetapi hambatan harus menjadi pemicu untuk terus berusaha sehingga nilai-nilai Islam, terutama hukum Islam dapat dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan dan pemaparan di atas, memperlihatkan bahwa usaha untuk mengatasi berbagai kendala dalam pembelajaran AIK, khususnya hukum Islam, ada banyak cara dan strategi yang dilakukan oleh guru dan sekolah. Di samping sekolah dan juga guru meningkatkan kapasitas layanan dan juga kemampuannya, sekolah dan guru juga melibatkan orang tua untuk mengatasi kendala sehingga tujuan pembelajaran hukum Islam dapat tercapai dengan baik. Di samping melibatkan orang tua, guru dan juga sekolah mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang ada di kurikulum sekolah dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dan ternyata, apa yang dilakukan oleh SMKM Salaman dan juga SMKM Mertoyudan bernilai positif bagi siswa.

7. Perubahan Kurikulum di Sekolah Muhammadiyah

Ada sebuah pameo yang menyatakan bahwa di dunia ini, tidak ada yang tidak berubah (permanen) kecuali perubahan itu sendiri. Ini artinya bahwa perubahan itu terus terjadi, tidak kecuali dalam konteks kurikulum pendidikan. Dalam sejarah kurikulum di Indonesia, kita mengenal beberapa kurikulum. Pada Masa orde lama, dikenal kurikulum 1947, 1952 dan 1964. Masa orde baru muncul kurikulum 1975 yang disempurnakan menjadi Kurikulum CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) dan disempurnakan lagi menjadi kurikulum 1994. Era reformasi, muncul kurikulum 2004, yang diberi nama kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Selama masa berlakunya, KBK ini mengalami perubahan pada pola standar isi dan standar kompetensi sehingga melahirkan kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)¹⁸⁵

¹⁸⁵Setiap kurikulum yang pernah dipakai masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan KTSP dibandingkan dengan kurikulum pendahulunya adalah bahwa KTSP dapat mendorong terwujudnya otonomi penyelenggaraan pendidikan oleh Sekolah. Dengan otonomi tersebut, sekolah bersama dengan komite sekolah dapat secara bersama-sama merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi lingkungan sekolah tersebut. Dalam merumuskan KTSP, sekolah tidak bisa berjalan sendiri tetapi harus bermitra dengan stakeholder pendidikan, misalnya, dunia industri, kerajinan, pariwisata, petani, nelayan, organisasi profesi, dan sebagainya agar kurikulum yang dibuat oleh sekolah benar-benar mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan di daerah di mana sekolah tersebut berada. KTSP juga dapat mendorong guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kreativitas mereka dalam penyelenggaraan program pendidikan. Sekolah dan guru diberi keleluasaan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan KTSP tersebut sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan oleh sekolah. Sekolah dan guru dapat

Dari berbagai kurikulum yang pernah dilalui di Indonesia, kiranya dapat ditelisik bahwa kurikulum tersebut mengalami pembaharuan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kondisi zaman yang menuntut suatu kurikulum harus berubah atau karena ketidakkonsistenan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Problem seperti ini bukan suatu hal baru bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pada era sebelum reformasi banyak kalangan, para pakar pendidikan mengkritik hal itu dengan istilah ganti menteri, ganti kebijakan. Menurut pendapat tokoh pendidikan Ki Supriyoko bahwa pergantian kurikulum biasanya terjadi sepuluh tahun kemudian dari kurikulum sebelumnya. Namun yang terjadi, ternyata tidak begitu, sebagai contoh adalah perubahan dari KBK ke KTSP atau kurikulum 2004 ke kurikulum 2006 menunjukkan kurang dari sepuluh tahun.¹⁸⁶

Menurut Brown, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Zainur Raziqin, bahwa ada tiga prinsip secara sosiologis, dalam memandang kurikulum, yaitu (1) bahwa perubahan kurikulum bersifat gradual, mencerminkan nilai-nilai dasar cultural dari sebuah masyarakat, dan pada saat yang sama menunjukkan pekerjaan yang efektif dalam pengarahannya nilai-nilai yang paling tinggi; (2) kurikulum di sekolah berfungsi dalam hubungan dengan orang dewasa, dan serempak dengan itu disesuaikan dengan tingkat perkembangan murid; (3) kurikulum pasti terus berubah menuju pada suatu bentuk yang efektif dari tujuan sosial yang telah ditentukan.¹⁸⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kurikulum harus bersifat fleksibel dan elastis. Elastisitas kurikulum ini tentu harus disesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Dengan demikian bahwa tujuan spesifik dari implementasi kurikulum dapat diwujudkan.

Menurut, S. Nasution bahwa pembaharuan kurikulum mengikuti dua prosedur, yaitu *administrative approach* dan *grass roots approach*. *Administrative approach*, yaitu suatu perubahan atau pembaharuan yang direncanakan oleh pihak atasan untuk kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru-guru, jadi *from the top down*, dari atas ke bawah, atas inisiatif para administrator. Yang kedua, *grass roots approach*, yaitu yang dimulai dari akar, *from the bottom up*, dari bawah ke atas, yakni dari pihak guru atau sekolah secara individual dengan harapan agar meluas ke sekolah-sekolah lain. Namun, pola seperti itu bergantung kepada pengelolanya, yakni pemerintah sebagai pengambil

dengan leluasa mengembangkan standar yang lebih tinggi dari standar isi dan standar kompetensi lulusan yang telah ditentukan. KTSP juga memberikan ruang bagi setiap sekolah untuk lebih menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. Sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luar biasa untuk mengembangkan kompetensi siswanya sesuai dengan lingkungan dan kultur daerahnya., karena KTSP tidak mengatur secara rinci kegiatan belajar mengajar di kelas. Surya Hanafi, *Kurikulum KTSP Dan Implementasinya*, Dalam <http://sahabatguru.wordpress.com/2011/02/24/kurikulum-ktsp-dan-implementasinya/>, diakses pada 31 Januari 2013.

¹⁸⁶Kalau kita mencermati secara mendalam implementasi KBK pada tingkat grassroot, yakni sekolah sebagai pelaksana dari KBK tersebut. Pada kenyataannya tidak setiap sekolah sudah mampu melaksanakan KBK ini, bahkan mungkin sekolah tersebut masih taraf trial and error terhadap KBK. Karena kurangnya dukungan dari SDM sekolah tersebut yang belum menguasai tentang KBK. Nah, apakah ini tidak secara langsung menunjukkan bahwa penentu kebijakan tersebut terlalu tergesa-gesa dalam mengadakan perubahan, tanpa harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, misal ketidaksiapan para tukang didik (pendidik/guru) yang akan terjun langsung mengoperasikan mesin pendidikan. Karena suatu konsep yang ideal tetapi belum mampu terapkan dalam realita akan menghasilkan suatu kesia-siaan. Tentu menjadi renungan bagi kita. M. Asrori Ardiansyah, M.Pd, *Tantangan Kurikulum*, diakses pada 31 Januari 2013.

¹⁸⁷Muhammad Zainur Raziqin, *Moral Pendidikan...*, hlm 46.

kebijakan. Dan bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Kita tentu dapat obyektif dalam mencermatinya.¹⁸⁸

Dalam konteks pendidikan di Muhammadiyah, perubahan kurikulum pada umumnya diinisiasi dari bawah (*grassroots approach*), walaupun kebijakan kurikulum AIK ada di tingkat nasional. Sehingga kurikulum al-islam dan kemuhammadiyah walaupun kornya sama, yaitu AIK (ISMUBA), tetapi muatan (standard isi) antar satu sekolah dengan sekolah yang lain, satu daerah dengan daerah lain, dimungkinkan berbeda antara satu dengan yang lain, terutama menyangkut alokasi waktu. Hal ini terjadi karena, majelis DIKDASMEN sebagai pemangku kepentingan selama ini tidak berperan secara optimal dalam kaitannya dengan kebijakan penyelenggaraan sekolah. Disamping itu, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang memiliki karakter tumbuh dari bawah, juga berdampak pada kebijakan kurikulum AIK yang ada. Hal ini, juga karena factor watak dasar pendidikan Muhammadiyah dari semenjak awal berangkat dari *grassroots*. Sehingga tidak aneh manakala perubahan kurikulum al-Islam dan Kemuhammadiyah banyak diinisiasi dari bawah, bukan berasal dari kebijakan atas (DIKDASMEN).

Ketika disinggung tentang perubahan kurikulum yang diharapkan, para guru juga mempunyai satu pendapat bahwa kurikulum hukum islam harus ada perubahan. Hal ini, menurut prayogo, bahwa selama ini pembelajaran materi hukum islam hanya terfokus tentang ibadah, sehingga ke depan harus ada pengembangan lebih lanjut terutama materi-materinya lebih diperkaya. Di samping itu, menurutnya, pengajaran hukum islam juga harus disertai praktek di lapangan, sehingga, para siswa lebih peka terhadap persoalan yang ada. Sebagai contoh adalah di pengadilan agama ada NTCR (nikah, talak, cerai dan ruju'), kalau siswa memahami dan mengetahui praktek di lapangan, maka pengetahuan siswa di kelas yang bersifat teoritis itu, akan semakin melekat dan kuat, sehingga siswa suatu ketika tidak gagap ketika melihat realitas dan praktek di lapangan.¹⁸⁹

Sementara itu, Widodo berpendapat bahwa perubahan yang diharapkan dari kurikulum yang ada adalah menyangkut alokasi waktu yang selama ini diakui sangat kurang. Dia memberikan contoh materi hukum Islam di kelas 2 sangat banyak dan bisa dikatan overload, sementara waktu yang disediakan sangat terbatas.¹⁹⁰ Pendapat Widodo tersebut diamini oleh Murtadho. Beliau mengakui bahwa alokasi waktu yang ada, sangat terbatas, sehingga perlu adanya penambahan. Lebih lanjut dia memberikan contoh, bahwa di beberapa daerah, misalnya Jawa Timur, sudah memberikan penambahan waktu menjadi 3 jam. Disamping itu, beliau menambahkan bahwa pemerintah seharusnya juga peduli terhadap penambahan dan pengembangan fasilitas yang ada di sekolah. Karena selama ini guru/ sekolah harus mencari dan mencukupi sendiri kebutuhan laboratorium pendidikan Agama. Padahal ekspektasi terhadap output pendidikan agama sangat besar, sementara fasilitas yang ada sangat terbatas. Seharusnya ketimpangan yang demikian itu tidak terjadi, karena buktinya mata pelajaran lain seperti fisika, bahasa, seni, dan sebagainya dapat dipenuhi dan difasilitasi oleh pemerintah.¹⁹¹

Sementara itu Karmadi berpendapat bahwa rancangan kurikulum hukum Islam harus dapat memberikan dampak pada sisi dan psikomotor siswa, yaitu bahwa kurikulum PAI

¹⁸⁸M. Asrori Ardiansyah, M.Pd, *Tantangan Kurikulum ...*

¹⁸⁹Wawancara dengan Prayogo, S.Ag., di kantor SMK Mertoyudan, 21 Januari 2013.

¹⁹⁰Wawancara dengan Widodo, S..Ag, di Kantor SMK Kota Magelang, 21 Januari 2013

¹⁹¹Wawancara dengan Murtadho, S.Pd.I, di Kantor SMAM Kota Magelang, 19 Januari 2013

paling tidak harus memberikan perubahan sikap dan kesadaran untuk melaksanakan hukum Islam itu baik di rumah atau di sekolah, tanpa perlu disuruh atau dikomando. Contohnya kesadaran untuk melaksanakan shalat.¹⁹² Hal tersebut juga diamini oleh Sundarto dari SMKM salaman. Beliau berpendapat bahwa kurikulum hukum Islam (fiqh) paling tidak dapat berimplikasi bagi Perubahan perilaku siswa. Artinya, siswa setelah lulus dari SMK sangat kelihatan sekali perubahan perilaku siswa baik dari kejujuran, ataupun yang lainnya. Di samping itu beliau menambahkan, selain dari sisi goal, kurikulum hukum Islam harus ada penambahan materi, yaitu tentang hukum-hukum had. Yaitu lebih banyak diajarkan atau dimasukkan dalam materi kurikulum yang ada.¹⁹³

Sesuai dengan tema persyarikatan pasca muktamar Malang, revitalisasi, maka keperluan untuk melakukan revitalisasi dalam berbagai bidang, terutama pada bidang-bidang yang menjadi core activity muhammadiyah, seperti pendidikan, merupakan gerakan vital persyarikatan. Otokritik yang selama ini berkembang, menyatakan bahwa titik lemah dari gerakan Muhammadiyah yang termutakhir adalah dalam bidang pendidikan. Terutama menyangkut kualitas, termasuk juga tentang keterkaitan output dari lembaga pendidikan Muhammadiyah dengan Muhammadiyah itu sendiri. Memang belum ada survey tetapi disinyalir keterkaitan antara output lembaga pendidikan Muhammadiyah dengan Muhammadiyah baik sebagai organisasi, maupun kemuhammadiyah sebagai nilai ideology itu sangat-sangat rendah.¹⁹⁴ Oleh karena itu, hal tersebut perlu untuk dicarikan jalan keluarnya.

Khusus mata pelajaran al Islam dan Kemuhammadiyah, ini memang dirancang oleh perumusnya dulu, sebagai ciri khas lembaga pendidikan Muhammadiyah. Ciri khas inilah yang membedakan sekolah Muhammadiyah dengan sekolah non-Muhammadiyah. Maka posisi dari mata pelajaran ini, Al Islam dan Kemuhammadiyah ini memang sangat-sangat sentral. Oleh karena itu sekali lagi mata pelajaran ini sangat sentral dan juga sebagai medium untuk menyebarkan paham keagamaan Muhammadiyah. Apalagi kita sekarang menghadapi masalah lemahnya penghayatan nilai-nilai ideologis yang menjadi anutan Muhammadiyah, sebab tidak hanya di sekolah-sekolah Muhammadiyah, termasuk juga di kalangan Pimpinan, dan juga anggota Muhammadiyah. Sekarang ini kita menghadapi ada tawaran-tawaran ideologi oleh sales-sales ideologi yang banyak berkeliaran. Terdapat fakta, ada pimpinan Muhammadiyah, yang terpengaruh pada pesona ideologi-ideologi itu yang kemudian mereka ikuti.¹⁹⁵

¹⁹²Wawancara dengan Karmadi, S.Ag., di Kantor SMKM Bandung, 18 Januari 2013

¹⁹³Wawancara dengan Sundarto, S.Ag., di kantor SMKM Salaman, 18 Januari 2013.

¹⁹⁴Dien Syamsuddin, *Meneguhkan Ideologi Muhammadiyah Lewat Pendidikan*, ceramah tanggal 5 Pebruari 2006, dalam Workshop Pendidikan al-Islam di SMP-SMU Muhammadiyah, yang diselenggarakan oleh JIMM Yogyakarta. Lihat <http://muhammadiyahstudies.blogspot.com/search/label/Education>, diakses 22 Januari 2013

¹⁹⁵Dien Syamsuddin, *Meneguhkan* ..ibid.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa poin berikut ini, yaitu:

1. Bahwa kurikulum hokum Islam di SLTA (SMK dan SMA) Muhammadiyah masih didominasi oleh ibadah mahdhah yang bersifat praktis. Sementara muamalah, yang merupakan hokum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesame, alam sekitar, dan lingkungannya mendapatkan porsi yang sangat kecil, apabila dibandingkan dengan ibadah.
2. Karena kurikulum hokum yang lebih banyak berorientasi pada iadah praktis tersebut, maka kurikulum hokum Islam belum menjawab kebutuhan siswa sepenuhnya. Padahal siswa SMA/SMK merupakan siswa yang sudah beranjak dewasa, sehingga kebutuhan terhadap materi hokum yang sesuai dengan usianya sangat penting untuk diperkenalkan. Materi-materi tersebut misalnya menyangkut tentang perzinahan, minuman keras, narkoba, pencurian, korupsi, dan sebagainya.
3. Kurikulum AIK, yang selama ini diajarkan di sekolah Muhammadiyah terbagi dalam 6 materi pelajaran, dan masing-masing diajarkan secara mandiri tidak integrative. Konsekuensinya adalah para guru banyak mengalami kendali alokasi waktu yang terbatas, yaitu 1 jam. Sehingga banyak materi yang tidak dapat tersampaikan, dan banyak guru yang kemudian hanya menekankan pada hal-hal yang bersifat praktis. Disinilah perlunya perubahan pola pembelajaran, sehingga waktu yang tersedia dapat digunakan sebaik mungkin.
4. Perubahan kurikulum perlu dilakukan sehingga, kurikulum yang baru dapat menjawab kebutuhan siswa. Materi hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pengenalan ibadah yang bersifat praktis saja, akan tetapi memberikan pengetahuan, wawasan dan juga ketrampilan dalam kaitanya dengan hukum muamalah secara lebih luas dan mendalam. Karena siswa setelah lulus sekolah tidak saja tahu tentang bagaimana ibadah secara benar, tetapi juga harus tahu hokum muamalah dan pidana karena tuntutan hidup dalam konteks pergaulan manusia secara luas.

B. SARAN

1. Bagi peneliti: temuan dari penelitian ini masih memerlukan penelitian tindak lanjut terutama menyangkut tentang pembelajaran yang tepat untuk maple AIK dan juga model-model perubahan untuk kurikulum AIK baru yang lebih relevan untuk kebutuhan siswa.
2. Bagi stakeholder: kurikulum hokum Islam memerlukan perubahan fundamental, karena selama ini hanya menekankan pada aspek yang bersifat ritual, ibadah praktis. Sementara mamalah kurang mendapatkan porsi yang layak. Demikian juga, kurikulum yang tidak integrative, terpisah-pisah, atoomistik, dikotomis sangat tidak menguntungkan bagi pembelajaran AIK, siswa merasakan overload materi, sementara guru mengalam kesulitan terhadap alokasi waktu yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'thi dan Fajar Reza Ulhaq, (2009), *Kristen Muhammadiyah: Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan*, Jakarta: al-Wasat.
- Abdul Mu'ti, (2010), "mencari Identitas Pendidikan Muhammadiyah, dalam Muhammad Ali Reinvensi pendidikan Muhammadiyah, Jakarta: al-wasat.
- Abdul Munir Mulkhan, Dr. Prof., (2000), "Pembaharuan Muhammadiyah dalam Ilmu dan gerakan Sosial", dalam Maryadi dan Abdullah Aly (ed), *Muhammadiyah dalam Kritik*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Abdul Munir Mulkhan,dkk (2005), *Kepemimpinan Profetik untuk Gerakan Tajdid :Jelang se-Abad Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Abdul Wahhab Khallaf,(1968), *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, Kairo: Dar al-fikr.
- Abdullah Nasih 'Ulwan, (1999), *Pendidikan Anak Dalam Islam*, alih bahasa Jamaludin Miri, Lc.(Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Abu Ahmadi, (1991), *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Agus Miswanto, (2010), *Introducing Human Rights Education in Indonesia: The Experience of Muhammadiyah School 2005-2010*, The Hague, ISS: Thesis MA
- Agus Miswanto, (2012), *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*, Magelang: P3SI UMM.
- Ahmad Hanafi, M.A., (1990)*Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. IV.
- Ahmad Syafii Maarif, (2009),*Ke Arah Perumusan Filsafat Pendidikan Islam/Muhammadiyah*, dalam Ahmad Syafii. *Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan: Sebuah refleksi sejarah*. Bandung: Mizan.
- Ahmad Tafsir,Prof. Dr., *Permasalahan Pendidikan Agama Bagi Remaja*, <http://Rub13.Tripod.Com/Al - Ihsaan.Htm>, Diakses Pada 3 Januari 2013.
- Asep Saeful Muhatadi dan Agus Ahmad Safei, (2003), *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bachtiar S. backhri, (2010), *Implementasi Pengembangan Content Curriculum dalam proses Perencanaan Pembelajaran*, dalam Jurnal Teknologi Pendidikan, Surabaya: Fakultas Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Surabaya, 2010, Vol.10 No. 2.
- Bambang Surendro, Dr. MT, M.Ag,(2013), *Pidato Pembukaan pada Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang*, di SMA Muhammadiyah Muntilan, pada Ahad, 27 Januari 2013.
- Barlett, L. (2008), "Paulo Freire and Peace education" dalam *Encyclopedia of Peace Education*, America: Teachers College, Colombia University.
- Daoed Joesoef, (2006), *Dia Dan Aku: Memoar Pencari Kebenaran*, Jakarta: Kompas.
- Darajat, D. (2002). *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII
- Denise Cush, (2007), "Should religious Studies be part of the Compulsory state school Curriculum?" *British Journal Of Religious Education*, 29 (3), september 2007.
- Depdikbud, (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dien Syamsuddin, (2006), *Meneguhkan Ideologi Muhammadiyah Lewat Pendidikan*, ceramah tanggal 5 Pebruari 2006, dalam Workshop Pendidikan al-Islam di SMP-SMU Muhammadiyah, yang diselenggarakan oleh JIMM Yogyakarta. Lihat <http://muhammadiyahstudies.blogspot.com/search/label/Education>, diakses 22 Januari 2013
- E. Kristi Poerwandari, (1998), *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, Fakultas Psikologi UI.

- Glass, R. D. (2001). "On Paulo freire's Philosophy of Praxis and the Foundations of Liberation Education", dalam *Educational Reseacher*, Vol. 30.no.2.
- H.Larry Winecoff, Dr., (1988), *Curriculum Development And Instructional Planning*, Tt:Ttp.
- Hadari Nawawi, (1989), *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta: haji Masagung, 1989.
- Hanan Athiyyah ath-Thuri, (2007), *Mendidikan Anak Perempuan Di Masa Remaja*, alih bahasa Aan wahyudin, Jakarta: Penerbit Amzah.
- Hartinah, *Perkembangan Moral dan Nilai-Nilai Agama Anak Masa Sekolah Menengah*, dalam <http://blog.tp.ac.id/perkembangan-moral-dan-nilai-nilai-agama-anak-masa-sekolah-menengah#ixzz2Jcjh3c4T>, diakses pada 31 Januari 2013.
- <http://www.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html>, diakses 22 januari 2013
- Hudala, J. (2005), *Transforming My Curriculum, Transforming My Classroom*, USA: EdChange and the Multicultural Pavilion. [Online]. Tersedia: <http://www.EdChange.org/multicultural>. [5 April 2012]
- Imam Mawardi Rz, (2012), *Pranata Sosial dalam Islam*, (Magelang: P3SI UMM
- Imam Mawardi, (2010), "Internalisasi Nilai Softskills dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Model Alternatif Pengembangan Kurikulum PAI)" dalam *Jurnal Cakrawala Studi Islam*. Vol. VII, No. 1, Juli 2010.
- Imam Robandi, (2008), *Becoming the Winner: Riset, Menulis Ilmiah, Publikasi Ilmiah, dan Prsesentasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jabrohim (Ed.), dkk, (2010), *Membumikan Gerakan Ilmu Dalam Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jackson, Elisabeth. (2007), "Crafting A New Democracy: Civic Education In Indonesian Islamic Universities". *Asia Pacific Journal Of Education*. 27 (1).
- Jalaluddin Rakhmat, (2007), *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqh*, Bandung: Mizan.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, (1995), *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Khallaf, A.W. (1995), *Usul al-Fiqh al-Islami*. Bairut: dar al-Fikr
- Khozin, (2005), *Menggugat Pendidikan Muhammadiyah*, (Malang: UMM Press.
- Krawietz, B. & Reifeld, H. (2008), *Islam and The Rule of Law: Between Sharia and Secularization*, Berlin, Germany: KAS.
- Kull, A. (2009), "At the Forefront of a Post-Patriaarchal Islamic Education Female Teachers in Indonesia", Dalam *Journal Of International Women's Studies*, Vol. 11 # 1.
- Kuntowijoyo, (1999), "Konvergensi dan Politik Baru Islam", dalam Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Yogyakarta: Soproess.Cet.ke-2.
- Listia, et al, (2007), *Problematikan Pendidikan Agama di Sekolah: Hasil Penelitian Tentang Pendidikan Agama di Yogyakarta 2004-2006*, Yogyakarta: Interfidei.
- M Rusli Karim (ed), (1986), *Muhammadiyah dalam kritik dan Komentar*, Jakarta: CV.Rajawali.
- M Saerozi, (2004), *Politik Pendidikan Agama dalam era Pluralisme*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M. Yunan Yusuf, et al, (2005), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada dan Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah.
- Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, (2007), *Standar Isi dan Kompetensi Lulusan Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah*, Jakarta: Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah, 2007.
- Mashur Muslich, (2008), *Seri Standar Nasional Pendidikan Ktsp (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan): Dasar Pemahaman Dan Pengembangan*, (Jakarta: Bumi Aksara.

- Muhaimin, (2003). *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan Pengembangan Kurikulum, hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*. Bandung: Nuansa.
- Muhaimin, (2009), *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhaimin, MA, Prof. Dr. H.,(2005), *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Ali, (2010), *Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah*, (Jakarta: al-Wasat.
- MuhammadFuad, (2004), *Islam, modernity and Muhammadiyah's educational Programme*, Inter-Asia Cultural Studies, (Routledge, part of the Taylor & Francis Group, 2004) Volume 5, Number 3.
- Muhammad Nasiruddin, et al, (2006), *Sejarah Muhammadiyah Magelang: Ada Untuk Bermakna*, (Magelang: PDM Kabupaten Magelang.
- Muhammad Zainur Raziqin, MM, Dr.,(2007) *Moral Pendidikan di Era Global: Pergeseran Pola Interaksi Guru-Murid di Era Global*, (Malang: Averroes Press.
- Nana Sudjana, Dr. H.,(2005), *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo.
- Noor Chozin Agham, (2010), *Teologi Muhammadiyah dan Penyelewenganya: Agenda Persyarikatan Abad ke-AKAN-an*, (Jakarta: UHAMKA Press.
- Nur Ahid, M.Ag., Dr., (2010), *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasha, M.K et al (2005), *Fiqh Islam sesuai dengan Tuntunan Tarjih*. Yogyakarta: Pustaka Hidayah
- R. Masykur, (2008). *Model Pembelajaran Kreatif dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Madrasah Aliyah dalam Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Disertasi Doktor pada SPS Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Tidak diterbitkan.
- Radjasa Mu'tasim, (2006), "Metode Analisis Data", dalam M. Amin Abdullah, et al, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Ramayulis, (2008), *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Rasyid, S. (2005). *Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah
- Robbin dan Coulter, (2007), *Manajemen (edisi VIII)*, Jakarta: PT Indeks, 2007.
- Ruswan, (1997), *Colonial experience and Muslim educational reforms: A Comparison of the Aligarh and the Muhammadiyah Movements*, (M.A. Thesis), Canada: McGill University.
- Shaleh, AR (2005). *Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa*. Jakarta: PT rajagrafindo Persada.
- Sondang P Siagian, (1990), *Filsafah Administrasi*, Jakarta: CV Masaagung.
- Sukmadinata, N.S. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Surjanto, (2006), "Teknik Pengumpulan Data" dalam M. Amin Abdullah, et al, *Metodologi Penelitian Agama: Multi Disipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Surya Hanafi, (tt) *Kurikulum KTSP Dan Implementasinya*, Dalam <http://sahabatguru.wordpress.com/2011/02/24/kurikulum-ktsp-dan-implementasinya/>, diakses pada 31 Januari 2013.

- Yahdan Ibnu Human Saleh,(1991), “Colonial Educational Policy And Muhammadiyah's Education (Analitical History Of Muhammadiyah In Yogyakarta 1912-1942)”, *Al-Jami'ah* No. 47 Th. 1991
- ZakiyuddinBaidhawiy, (2007),“Building harmony and peace through multiculturalist theology-based religious education: an alternative for contemporary Indonesia”, *British Journal of Religious Education*, (London:Routledge, part of the Taylor & Francis Group, Volume 29, Number 1
- Zamakhsyari Dhofier, (1984), *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Zamroni. (2000). *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Wawancara:

- Wawancara dengan Prayogo, S.Ag., di kantor SMKM Mertoyudan, 21 Januari 2013.
- Wawancara dengan Widodo, S..Ag, di Kantor SMKM Kota Magelang, 21 januari 2013
- Wawancara dengan Murtadho, S.Pd.I, di Kantor SMAM Kota Magelang, 19 Januari 2013
- Wawancara dengan Karmadi, S.Ag., di Kantor SMKM Bandongan, 18 Januari 2013
- Wawancara dengan Sundarto, S.Ag., di kantor SMKM Salaman, 18 Januari 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 :Pedoman wawancara

1. Nama Informan :
2. Guru PAI pada :
3. Masa Kerja :
4. Tanggal wawancara :

Pertanyaan wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut bapak apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari kurikulum PAI sekarang	1.
2	Dari materi yang ada di rumpun PAI, apakah materi hukum islam merupakan materi yang harus diajarkan kepada siswa, mohon penjelasan alasannya?	1.
3	Menurut bapak, apakah susunan materi hukum islam dalam kurikulum PAI sudah sesuai dengan standar kebutuhan siswa, mohon penejelasan alasannya?	1.
4	Apa yang menjadi penghambat pelaksanaan materi hukum islam dalam pembelajaran PAI yang bapak ampu selama ini? Bagaimana cara mengatasinya?	1.
5	Peningkatan/perubahan apa yang diharapkan oleh bapak dalam pengembangan kurikulum PAI khususnya materi hukum Islam	1.

Lampiran 2: Biodata Peneliti

1. Biodata Peneliti

a. Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Dr. IMAM MAWARDI, M.Ag
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 6 Januari 1973
N I S : 017308176
Pekerjaan : Dosen Fakultas Agama Islam
Disiplin Ilmu : Pendidikan Islam
Jabatan Fungsional : Lektor / III d
Alamat Kantor : Kampus II: FAI Jl. Mayjend
Bambang Sugeng Mertoyudan Km. 4
Magelang 56172. Telp/Fax.. (0293)
326945
Alamat Rumah : Perum Bumi Gemilang C-1 RT 01/
RW 14 Banjarnegoro, Mertoyudan,
Magelang – Jawa Tengah 56172.
Telp. 0293-3215694
HP : 08122514462
http : //mawardiumm.blogspot.com
E-mail : Mawardi_rz@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

1.	S 1 IAIN Sunan Kalijaga Fak. Tarbiyah	Yogyakarta	1998
2.	S 2 IAIN Sunan Kalijaga Prodi Pend. Islam	Yogyakarta	2000
3.	S3 UPI Prodi Pengembangan Kurikulum	Bandung	2012

Karya Ilmiah

TAHUN	JUDUL	PENERBIT
2005	Implikasi Filosofis Pendidikan Islam dalam Pembinaan Etika Sosial	Cakrawala Jurnal Studi Islam
2005	Kebenaran Ilmiah dalam Perspektif Filsafat Ilmu	Refleksi Majalah Ilmiah
2005	Sunnah Nabi: Signifikansi Sistem Pembinaan Anak Didik (Perspektif Psikologi Pendidikan Islam)	Cakrawala Jurnal Studi Islam
2006	Kesehatan Mental dan Pengembangan Kepribadian dalam Pendidikan Islam (Konseptualisasi Kecerdasan Qalbiah)	Cakrawala Jurnal Studi Islam

2007	Mendidik ESQ: Pola Pengembangan Kepribadian Anak	Paedagogie Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan
2007	Dinamika Masyarakat Madani	Refleksi Majalah Ilmiah
2007	Pembudayaan Etika Sosial Masyarakat (Tantangan Transformasi Pendidikan Islam)	Cakrawala Jurnal Studi Islam
2007	Pembaharuan Tradisi Pemikiran Islam: Sebuah Transformasi Pendidikan Islam	Cakrawala Jurnal Studi Islam
2008	Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia	Jurnal Studi Islam Al 'Ulum STAIMUS Surakarta
2008	Pendidikan Islam dan Ide-Ide Sentral Pengembangan Masyarakat (Menata Kurikulum Berbasis Masyarakat)	Islamadina Jurnal Pemikiran Islam
2009	Pengaruh Metode Keteladanan Guru PAI terhadap perilaku Keagamaan Siswa di SMP Negeri 1 Mungkid Kabupaten Magelang	Tarbiyatuna
2009	Pola Religiusitas Pedagang Migran (Kasus Pedagang Kaki Lima "Pecel Lele" di Kota Magelang)	LP3M UMM
2010	Internalisasi Nilai Softskills dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Model Alternatif Pengembangan Kurikulum PAI)	Cakrawala Jurnal Studi Islam
2012	Model Pembelajaran Untuk Meningkatkan Soft Skills Siswa (Penelitian dan Pengembangan Model Pembelajaran Model Pembelajaran Kontekstual pada mata Pelajaran Aqidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Magelang)	LP3M UMM

b. Anggota:

Nama Lengkap : Agus Miswanto, MA
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Dosen Fakultas Agama Islam
 Disiplin Ilmu : Hukum Islam
 Jabatan Struktural : Ka. P3SI
 Jabatan Fungsional : -
 Alamat Kantor : Kampus II: FAI Jl. Mayjend Bambang Sugeng Mertoyudan Km. 4 Magelang 56172. Telp/Fax.. (0293) 326945
 Alamat Rumah : Karanganyar, RT 03 RW 01 Bondowoso Mertoyudan

HP : 085228254276
Email : Agus_miswanto08@yahoo.com

Riwayat Pendidikan:

1.	S 1 IAIN Fakultas Syariah Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2000
2.	S 2 ISS The Development Studies	The Hague, Netherlands	2010

Karya Ilmiah

TAHUN	JUDUL	PENERBIT
2005	Tuntunan Jenazah	Suara Muhammadiyah
2005	Pedoman Hidup Islam: Khutbah Jum'at	P3SI UMM+PWM Jawa Tengah
2012	Agama, Keyakinan, dan Etika	P3SI UMM
2012	Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah	P3SI UMM
2012	Pranata Sosial dalam Islam	P3SI UMM
2012	Human Rights Education in Indonesia: the experience of Muhammadiyah School between 2005-2010	Hurights Osaka:Asia Human Rights Journal



Universitas Muhammadiyah Magelang

Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)

Alamat : Gedung Rektorat, Lantai 3, Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang
Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km. 5 Magelang 56172

Telepon : 0293-326945 psw. 132

Faksimil : 0293-326945

Email : lp3m@ummgl.ac.id

PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN

Nomor : 178/LP3M/II.3.AU/F/2012

Pada hari ini, Sabtu tanggal 30 Juni 2012 yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag. selaku Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Dr. Imam Mawardi, M.Ag., selaku peneliti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut :

Pasal 1 Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul :

HUKUM ISLAM DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA DI SLTA (Studi Analisis Isi Kurikulum Mata Pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di SMA/SMK Muhammadiyah Kota dan Kabupaten Magelang)

Pasal 2 Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan jiplakan/plagiat).
- (2) PIHAK KEDUA menjamin judul penelitiannya tidak merupakan penelitian yang sedang mendapat bantuan pihak luar atau penelitian yang sudah selesai dilakukan.
- (3) Apabila di kemudian hari ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian dinyatakan batal, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 3 Biaya Penelitian

Penelitian ini dibiayai atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun Akademik 2011/2012 sebesar Rp. 4.250.000 ,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4 Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran biaya penelitian dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang, meliputi :
 - (a) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak diterimakan setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

- (b) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan 2 (dua) eksemplar laporan penelitian lengkap, ditambah 2 (dua) eksemplar artikel ilmiah, dan satu disket atau CD yang berisi *file* laporan lengkap dan *file* artikel ilmiah.
- (2) Untuk keperluan pencarian dana penelitian Tahap II, PIHAK KEDUA harus menunjukkan dan menyerahkan Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan laporan akhir penelitian yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pasal 5
Laporan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil penelitiannya kepada PIHAK PERTAMA melalui LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Format Laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun sistematika laporan.
- (3) Pada sampul bagian tengah dituliskan nama peneliti atau tim peneliti secara lengkap (tidak menggunakan kata *dan kawan-kawan (dkk.)*), dan pada bagian bawah dari laporan tersebut harus dituliskan pernyataan yang berbunyi :

**PENELITIAN INI DILAKSANAKAN ATAS BIAYA
DARI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
NOMOR KONTRAK : 002/KEP/LP3M/IL.3.AU/F/2012**

- (4) Laporan akhir penelitian (2 eksemplar) harus ditandatangani oleh ketua peneliti dan pendamping atau konsultan (jika ada), dan Dekan Fakultas kepada Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Laporan Akhir Penelitian yang telah diseminarkan sebanyak 2 (dua) eksemplar ditambah artikel ilmiah yang siap diterbitkan (*hardcopy* dan disket) untuk jurnal ilmiah lembaga penelitian (15-20 halaman, spasi ganda) dengan format tertentu.
- (6) Naskah ilmiah yang siap dipublikasikan sesuai pasal 5 ayat (5) dapat digunakan sebagai bahan untuk presentasi dalam Seminar Hasil Penelitian.

Pasal 6
Pembimbingan / Konsultan Penelitian

- (1) Penelitian yang dilakukan oleh dosen yang belum berjabatan akademik merupakan Penelitian Pemula.
- (2) Peneliti pada Penelitian Pemula wajib menunjuk seorang pembimbing/konsultan untuk usulan dan pelaksanaan penelitiannya.
- (3) Pembimbing/Konsultan dimohon penelitian yang dimaksud dalam ayat (2) pasal 7 ini adalah seorang dosen yang minimal berjabatan akademik Lektor atau Master (S2).
- (4) Peneliti yang telah menunjuk seorang Pembimbing, diharuskan berkonsultasi dengan pembimbing berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan serta laporan hasil penelitiannya.
- (5) Pembimbing atau Konsultan dimohon dengan sangat memberikan konsultasi dan bimbingan serta hadir pada seminar hasil penelitian.
- (6) Honorarium Pembimbing/Konsultan ditanggung oleh Tim Peneliti, dan dibayarkan setelah laporan hasil penelitian diserahkan ke LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pasal 7
Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut :

- (1) Ketua Peneliti : Dr. Imam Mawardi, M.Ag
- (2) Anggota Peneliti : Agus Miswanto, MA

Pasal 8
Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak sesuai, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- (1) Diberhentikannya bantuan keuangan, dan PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima dari PIHAK PERTAMA, atau
- (2) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tersebut dan berikutnya sampai laporan penelitian diserahkan atau mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 9
Pengawasan Pelaksanaan Penelitian


Wewenang sepenuhnya dalam administrasi, monitoring, evaluasi, dan penetapan sanksi terhadap pelaksanaan penelitian ini ada di LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pasal 10

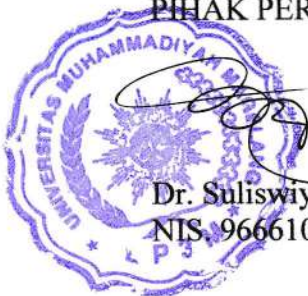
Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Magelang, 30 Juni 2012


PIHAK PERTAMA,



Dr. Suliswayadi, M.Ag.
NIS. 966610111



PIHAK KEDUA,



Dr. Imam Mawardi, M.Ag
NIS. 017308176